Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan
Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua

SERI MEMORIA PASSIONIS NO.37

PAPUA BUKAN TANAH KOSONG

Beragam Peristiwa dan Fakta Hak Asasi Manusia di Tanah Papua 2018

BERNARD KOTEN DANIEL GOBAY, OFM TIM KERJA SKPKC FP

SERI MEMORIA PASSIONIS NO.37

PAPUA BUKAN TANAH KOSONG

Beragam Peristiwa dan Fakta
Hak Asasi Manusia di Tanah Papua 2018

Undang-undang Republik Indonesia

No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak ekslusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SERI MEMORIA PASSIONIS NO.37

PAPUA BUKAN TANAH KOSONG

Beragam Peristiwa dan Fakta
Hak Asasi Manusia di Tanah Papua 2018

Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan
Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua

Papua Bukan Tanah Kosong:
Beragam Peristiwa dan Fakta Hak Asasi Manusia
di Tanah Papua 2018

Copyright©2019, SKPKC Fransiskan Papua

Cetakan Pertama, September 2019

Penerbit
SKPKC Fransiskan Papua
Jl. Kemiri Kompleks Misi Katolik
Biara St. Antonius Sentani, Jayapura
Papua 99352
www.fransiskanpapua.org
Email: skpkc2010@gmail.com

Tim Penulis:
Bernard Koten
Daniel Gobay, OFM
Tim Kerja SKPKC FP

Editor: Basilius Triharyanto

Lay out: Anastasia Lintang

ISBN : 978-602-74463-8-0

DAFTAR ISI

Kata Pengantar — iii
Pengantar dari Tim Penulis — vii

Bab 1 — 1
Tragedi Asmat: Bencana Kemanusiaan

Bab 2 — 19
Pelarangan Berpendapat di Muka Umum

Bab 3 — 33
Konflik Bersenjata di Tanah Ndugama

Bab 4 — 65
Sengketa Wuluwaga: Potret Militerisasi di Tanah Papua

Bab 5 — 79
Penghancuran Hutan Papua

Bab 6 — 97
Kasus Ja'far Umar Thalib:
Tumbuhnya Kelompok Radikalisme di Tanah Papua

Bab 7 — 111
Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Proses dan Janji

Bab 8 — 123
Penutup

Lampiran — 127
Kronik Memoria Passionis 2018

KATA PENGANTAR

PAPUA pada awal tahun 2018 telah menjadi perbincangan nasional, situasi hak asasi manusia terkait hak-hak dasar pelayanan kesehatan menjadi perhatian di kalangan masyarakat luas. Bermula dari kabar buruk di Tanah Asmat selama sekitar empat bulan, dari Januari hingga April 2018. Wabah dan gizi buruk telah memakan korban anak-anak Papua.

Jumlah korban anak-anak dan wabah campak di Kabupaten Asmat yang terus meluas itu, Pemerintah kemudian menetapkan peristiwa tersebut sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Kejadian Luar Biasa di Tanah Asmat ini seolah-olah membuka jalan bagi kesakitan dan penderitaan yang sama di wilayah lain di Tanah Papua. Kesakitan ini akhirnya merepotkan para pegiat kesehatan, para medis, Pemerintah Kabupaten Asmat, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat di Jakarta.

Sesudah tragedi Asmat mulai mereda, muncul kembali tragedi konflik bersenjata di Tanah Ndugama, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Bunyi senjata itu terdengar di Tanah Papua, yaitu di Kampung Alguru, Kabupaten Nduga pada Juni 2018. Konflik bersenjata ini mengakibatkan banyak warga sipil yang mengungsi, korban di antara kedua belah pihak tak dapat dielakan.

Belum selesai persoalan di Kampung Alguru, bunyi tembakan senjata terdengar lagi di Tanah Ndugama, yaitu di Kali

Yigi. Konflik kedua ini semakin mengancam suasana kedamaian dan ketenangan. Pengiriman pasukan militer ke Tanah Papua tak dapat dibendung. Operasi pengejaran dan pembangunan Jalan Trans Papua di Wilayah Ndugama, Kabupaten Nduga tetap dilaksanakan. Warga sipil harus kehilangan rumah tinggalnya, sanak saudaranya dan terpaksa meninggalkan kampung halamannya.

Di sisi lain, perang idealisme, pelurusan sejarah dan perjuangan untuk keadilan dan kedamaian di Tanah Papua juga dilakukan melalui jalur lain. Suara-suara manusia Papua yang terus terdengar di jalan-jalan melalui aksi demonstrasi menyampaikan pendapat di muka umum harus juga berhadapan dengan kekuatan Negara yakni militer. Ruang ini dikuasai oleh pihak militer sepanjang tahun 2018. Peristiwa hak asasi manusia lain terdengar dari belahan internasional, yang mendesak penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Tanah Papua, juga mengenai aspirasi bangsa Papua terhadap hak penentuan nasib sendiri.

Persoalan lain di Tanah Papua pada 2018 adalah mengenai akses akan kesehatan. Selain tragedi di Asmat yang telah di sebut, anak-anak Papua yang menghadapi kematian lebih cepat karena buruknya pelayanan kesehatan di sejumlah wilayah, seperti di Korowai, Kabupaten Yahukimo, dan di wilayah Saminage. Kasus yang juga terus memakan korban orang-orang Papua adalah kasus HIV/AIDS, yang terus memprihatinkan situasinya dan menambah penderitaan masyarakat di Tanah Papua.

Di samping hilangnya manusia Papua, kehancuran dan kehilangan juga terjadi pada alam Papua. Hutan dan tanah sebagai tempat yang memberikan kehidupan manusia Papua terpaksa hancur karena kerakusan akan kuasa, uang dan kepentingan golongan tertentu. Tanah dan hutan Papua dijadikan lahan bisnis dan juga karena alasan pembangunan infrastruktur.

Persoalan baru yang lainnya mulai muncul adalah kehadiran kelompok radikalisme agama di Tanah Papua. Benih-benih konflik yang digiring ke konflik berbau SARA mulai tumbuh di Tanah Papua. Munculnya Jafar Umar Thalib (JUT) dan kelompoknya yang sengaja 'dipelihara' di Tanah Papua sepertinya akan menambah benih konflik.

Segala persoalan yang disebutkan di atas membangkitkan orang-orang (individu, kelompok, organisasi) untuk terus berjuang meyakinkan yang lainnya bahwa keadilan, kedamaian dan kebebasan merupakan tujuan dan dambaan dari setiap manusia. Apakah kita harus menyalahkan sistem yang terjadi? Apakah Negara ini secara jujur mengakui dan menerima 'dosanya' sehingga bisa diperbaiki? Apakah perlu diam ketika melihat ketidakadilan dan segala pelanggaran yang terjadi?

Buku serial Memoria Passionis yang secara berkelanjutan diterbitkan oleh Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua (SKPKC FP) ini merupakan salah satu bagian untuk memberitahukan kepada semua orang dan berbagai pihak yang berkewajiban bahwa penderitaan dan air mata itu masih tetap ada dan mungkin akan selalu ada di Tanah Papua. Penderitaan dan kesakitan yang tergambar dalam buku ini bukannya untuk membangkitkan kemarahan tetapi dijadikan bahan untuk melihat diri demi sebuah keadilan, kedamaian dan pembebasan di Tanah Papua.

Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Kenambai Umbay, Juni 2019

Wilhelmus Irenius Gonsalit Saur, OFM
Direktur SKPKC Fransiskan Papua

PENGANTAR TIM PENULIS

Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua (SKPKC FP) terus merawat dan mempertahankan tradisi menulis laporan dan dokumentasi terkait peristiwa di Tanah Papua dari perspektif Hak Asasi Manusia sejak tahun 1999. Menulis segala peristiwa dan situasi HAM di Tanah Papua merupakan salah satu kewajiban moral yang terus dijaga dan dilaksanakan. Pada 2019 ini, SKPKC FP kembali menerbitkan buku Seri Memoria Passionis No. 37, berjudul "Papua Bukan Tanah Kosong: Berbagai Peristiwa dan Fakta Hak Asasi Manusia di Tanah Papua tahun 2018".

Judul "Papua Bukan Tanah Kosong" diangkat ke dalam buku ini untuk kembali menegaskan bahwa Tanah Papua memiliki sumber daya alam dan manusia yang harus dihormati dan dihargai. Konflik yang berkepanjangan, generasi-generasi Papua yang mati muda, ruang demokrasi yang dibungkam, praktik-praktif represif:

intimidasi, penangkapan, perampasan lahan, menandakan bahwa Tanah dan Manusia Papua sebagai lahan perebutan kekuasaan kaum elit dan kapitalis. Keadilan, kebenaran, dan kebebasan yang didambakan tak pernah terwujud di Tanah Papua.

Istilah dan slogan "Papua Bukan Tanah Kosong" disuarakan oleh orang-orang muda Papua yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat Papua atau GEMPAR Papua. Pesannya ditujukan kepada semua manusia (masyarakat adat Papua) untuk bangkit dan bangun dari tidurnya, untuk berjalan bersama merebut segala hal yang hilang dan punah dari Tanah Papua. "Papua Bukan Tanah Kosong" memberi gambaran kepada semua pihak, bahwa "kami (tuan rumah) harus dihargai dan dihormati di tanah kami."

Buku "Papua Bukan Tanah Kosong" menarasikan berbagai peristiwa dan fakta hak asasi manusia di Tanah Papua yang menjadi perhatian publik luas di media, ruang-ruang diskusi, dan forum-forum publik. Buku ini merupakan kisah-kisah HAM di Tanah Papua yang terkumpul dari berbagai peristiwa di media cetak dan online, hasil riset SKPKC FP, dan laporan dari para mitra atau jaringan serta pos kontak yang selama ini terlibat bersama SKPKC FP dalam mengadvokasi persoalan HAM di Tanah Papua.

Buku ini terdiri beberapa bagian. Pada Bab I membahas persoalan kesehatan di beberapa daerah di Tanah Papua. Kejadian Luar Biasa di Kabupaten Asmat, Kematian Balita di Pegunungan Bintang dan Yahukimo adalah bagian yang diceritakan pada bagian ini. Lalu Bab II mengenai ruang menyampaikan pendapat di muka umum. Bagian ini membahas kisah pembungkaman ruang demokrasi, penangkapan, intimidasi bahkan sampai pada penyiksaan terhadap 'mereka' yang bersuara akan keadilan, kebenaran dan pelurusan sejarah.

'Perang' atau konflik bersenjata yang dilakukan pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) dengan

militer Indonesia dengan alasan menolak segala pembangunan di wilayah Pegunungan Tengah Papua, serta dampak dari konflik tersebut, diulas dalam Bab III.

Lalu pada Bab IV, kita akan mengungkap gerakan militerisasi di Tanah Papua dengan studi kasus di Lahan Wuluwaga, Kimbim, Lembah Balim. Bagaimana negosiasi mendapatkan lahan oleh militer demi pembangunan Markas Brigade serta penolakan masyarakat pemilik hak ulayat akan ditemukan dalam bab ini.

Selanjutnya Bab V dibahas soal hutan, tanah dan alam yang menjadi sumber kehidupan manusia, khususnya di Tanah Papua semakin hancur. Kerusakan hutan dan alam ini disebabkan derasnya arus investasi dan kepentingan pihak-pihak tertentu untuk menguras sumber daya alam Papua. Derasnya arus investasi perusahaan Kelapa Sawit yang berpindah ke Tanah Papua menjadi kisah menarik dalam bab ini.

Laporan Memoria Passionis kali ini memberikan perhatian terhadap kelompok radikalisme berbasis agama yang muncul di Tanah Papua. Dalam Bab VI dibahas mengenai hasil studi kasus terhadap kehadiran Ustad Ja'far Umar Thalib dan kelompoknya di Kabupaten Keerom, Papua. Ustad Ja'far atau yang biasa dikenal dengan singkatan JUT merupakan eksekutor kasus konflik SARA di Ambon dan Poso, yang kini dibiarkan hadir dan berkeliaran di Tanah Papua. Dalam bab ini, dikisahkan bagaimana kehadirannya, beberapa peristiwa konflik yang sudah dilakukan dan dampak dari JUT di Tanah Papua, terutama dalam konteks kehidupan umat beragama, khususnya di Kabupaten Keerom dan lebih luas di Tanah Papua.

Buku "Papua Bukan Tanah Kosong" mencoba membantu pembaca untuk memahami dinamika persoalan HAM yang terjadi di Tanah Papua pada tahun 2018. Kiranya kehadiran buku ini menjadi bagian dalam setiap pribadi, komunitas untuk bersama membantu para korban (manusia) dan alam di Papua mendapatkan

keadilan dan kebebasan, mendapatkan penghargaan sebagai 'tuan rumah' di atas tanahnya sendiri.

Selamat membaca!

Kenambai Umbay, Jayapura, Agustus 2019

Tim Penulis SKPKC FP

Bab 1

TRAGEDI ASMAT BENCANA KEMANUSIAAN

SETIAP TAHUN pada bulan Oktober, daerah Asmat akan banyak mendapatkan perhatian media karena ada satu festival besar, yaitu Festival Budaya Asmat. Inilah bagian terpenting para seniman Asmat menunjukan karya-karyanya kepada dunia. Namun, sejak awal 2018, sebelum festival itu digelar, Asmat telah menjadi kepala berita di suratkabar-suratkabar nasional dan media online. Bukan berita festival seni Asmat tapi tentang kelaparan, gizi buruk, dan serangan wabah campak.

Anak-anak Asmat sedang diberikan imunisasis campak. Foto: Dok. SKPKC FP

Situasi buruk kesehatan di Asmat itu pun kemudian ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa atau KLB. Sebenarnya, peristiwa itu terjadi berulang kali, namun 'tangan pemerintah' Jakarta terlalu jauh untuk digapai dari Asmat, atau, kabar tak sampai masuk ke 'telinga' pemerintah di Jakarta, bahkan juga di Provinsi Papua.

Daerah Asmat adalah tragedi kesehatan di Tanah Papua yang diputar ulang. Sebelum Asmat, daerah lain juga mengalami tragedi kesehatan, dalam waktu yang berulang juga. Dari tahun ke tahun, Tanah Papua diselimuti tragedi kematian karena warganya terserang wabah penyakit dan kelaparan. Kejadian Luar Biasa di Asmat menjadi bencana kemanusiaan pada 2018.[1]

1 Laporan tentang KLB di Kabupaten ini sudah diterbitkan oleh SKPKC Fransiskan Papua dengan judul "Derita dan Duka Manusia Asmat". Laporan ini dapat diakses di www.fransiskanpapua.org

Kabupaten Asmat, Papua, dikenal sebagai kota seribu papan, karena hamparan papan kayu sebagai jalan di atas rawa atau daerah rendah, perairannya juga terbentang luas. Luas wilayahnya mencapai sekitar 23.746 Km^2, bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Nduga dan Yahukimo, bagian selatan berbatasan dengan Laut Arafuru dan Kabupaten Mappi, bagian barat berbatasan dengan Laut Arafuru dan Kabupaten Mimika, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi.[2] Sebagian besar wilayah ditumbuhi hutan. Maka, alam dan hutan, bagian utama sumber kehidupan penduduk Asmat. Sagu dan ikan, adalah makanan utama orang-orang Asmat.

Menembus Batas Informasi

Jelang Natal 2018, Uskup Keuskupan Agats, Mgr. Aloysius Murwito, OFM melakukan perjalanan pelayanan Misa Natal ke kampung-kampung. Pada 23-25 Desember 2018, Mgr. Aloysius Murwito memimpin misa di Kampung As dan Atat, Distrik Pulau Tiga. Ia menyaksikan umatnya yang mengalami kondisi kesehatan yang buruk. Situasi buruk ini pun dikabarkan kepada rekan kerjanya dan diteruskan informasinya kepada seorang wartawan *Kompas*.

Sebenarnya peristiwa buruk yang dialami oleh penduduk Asmat sebelumnya pernah terjadi. Menurut laporan yang dirilis oleh Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Agats, peristiwa buruk yang dialami penduduk Asmat pernah terjadi pada September 2017. Namun, tak banyak pihak memberikan perhatian terhadap laporan tersebut.

Maka, tanggapan media *Kompas* atas laporan dari Keuskupan Agats ini mengejutkan, ketika pada 10 Januari muncul berita, dan menjadi headline utama suratkabar *Kompas*, dengan judul "Krisis Kesehatan di Asmat: Sebulan, 13 Anak Balita

2 Bdk. www.asmatkab.go.id/page/geografi, diakses Kamis, 24 Mei 2018

Meninggal." [3] Berita ini menghentakan publik dan pemerintah, baik di Jakarta maupun Papua. Hampir dua bulan, Januari hingga Februari 2018, *Kompas* yang diikuti oleh media-media nasional dan lokal, dan media-media online dan sosial media, terus mengabarkan dan menceritakan kesakitan dan penderitaan orang-orang Asmat.

Pada 13 dan 14 Januari 2018 suratkabar *Kompas* kembali menurunkan berita berjudul "Bencana Kesehatan di Asmat". Kali ini *Kompas* menyebut peristiwa di Asmat sebagai sebuah "bencana" karena sebanyak 28 anak di Asmat meninggal akibat campak dan gizi buruk.

Sejak beberapa kali *Kompas* menurunkan kejadian Asmat pada halaman muka, mulai banyak pihak tergerak untuk melakukan penyelamatan. Gerakan itu terjadi setelah persoalan yang mungkin 'terbungkus' itu terbuka. Hampir sepanjang Januari 2018, wajah orang-orang Asmat dengan situasi buruk dan menderita terus ditampilkan di media cetak, TV, online, baik lokal atau nasional, bahkan media internasional.

Kejadian luar biasa ini mengundang perhatian yang juga sangat luar biasa dari pemerintah setempat, Papua dan Jakarta. Di Harian *Cenderawasih Pos* (15/1) dan Harian *Kompas* (16/1), mulai dengan memberitakan penanggulangan bencana kemanusiaan tersebut. Pemerintah Kabupaten Asmat mulai membentuk Tim Terpadu untuk turun lapangan ke-23 distrik yang berada di wilayah Kabupaten Asmat.

Data terkait jumlah korban meninggal terus beredar, sejumlah media mempublikasikan jumlah korban yang berbeda. Suratkabar lokal Papua, *Cenderawasih Pos* mengutip data dari Dinas Kesehatan Asmat yang menyebutkan jumlah korban sebanyak 59 anak. Sementara itu suratkabar nasional *Kompas* mempublikasikan korban berjumlah 61 orang meninggal

3 Lihat *Kompas*, Rabu, 10 Januari 2018, Hlm. 1

KOMPAS/P. RADITYA MAHENDRA YASA

re untuk mendapatkan layanan kesehatan di Puskesmas Ayam, Distrik Akat, Kabupaten
a, Jumat (26/1). Layanan kesehatan dan pendidikan masih menjadi persoalan terbesar di
pua.

LAYANAN KESEHATAN

Warga Asmat Butul
Pendampingan

AGATS, KOMPAS — Perubahan menuju perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan warga Kabupaten Asmat, Papua, harus diajarkan melalui pendampingan jangka panjang. Diperlukan tenaga kesehatan dan pendidikan untuk pendampingan itu.

Rendahnya kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat itu menjadi salah satu faktor yang memicu masalah kesehatan, seperti penyakit infeksi di Asmat saat ini. Warga Distrik Suru-Suru, Asmat, Yohana Berpit (40), mengatakan, anaknya tidak dibiasakan cuci tangan sebelum makan. "Sesudah main lumpur, dia langsung makan saja," katanya.

Alfons, warga Asmat lainnya, mengatakan, mereka memerlukan pendampingan dari petugas kesehatan saat nanti kembali ke kampung masing-masin
dampingan hendaknya l
tensif, terutama untuk pe
an, sehingga jika ada ya
bisa segera tertolong. Un
kunjungan petugas ke
yang lebih intensif jadi p

Saskar, warga lainny
berharap pendampinga
masyarakat. Jika tak dida
dikhawatirkan saat war
akan sulit berobat dan
kesehatan akan meluas l

Wakil Bupati Asmat
Eppe Santanpo menutur
yoritas warga Asmat m
lam masa transisi budaya
mu ke budaya agraris. Lah
reka terbatas dan sebagia
adalah rawa yang terpe
pasang surut air laut.

(Bersambung ke hlm 15 kol 1-

Satu potongan berita koran Kompas yang memberitakan situasi KLB di Asmat.
Foto: Dok. SKPKC FP

dunia. Data korban yang lain yang berbeda disampaikan oleh Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agats, yang mengungkapkan data korban meninggal dunia sejak September 2017 hingga 29 Januari 2018 berjumlah 71 jiwa.

Di media online seperti *kompas.com* menyebutkan sebanyak 71 orang meninggal dalam kasus gizi buruk dan campak di Asmat.[4] Jumlah kematian ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan RI Nila Djuwita Moeloek setelah rapat terbatas mengenai penanggulangan KLB Asmat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, pada 31 Januari 2018.

Sementara itu *BBC Indonesia* menyebutkan sekitar 60 anak telah meninggal dalam KLB di Asmat. Menariknya, BBC memberikan ilustrasi situasi ironi karena sejumlah dana yang jumlahnya triliunan rupiah yang dikucurkan untuk daerah ini.[5]

4 Bdk.https://nasional.kompas.com/read/2018/01/31/15410691/menkes-71-orang-meninggal-dalam-kasus-gizi-buruk-dan-campak-di-asmat, diakses Kamis, 17 Mei 2018.

5 Bdk. http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42799894, diakses Kamis, 17 Mei 2018.

Media ini menyebutkan dana APBD Asmat untuk kesehatan mencapai 1 triliun rupiah. Dana ini masih ditambah lagi dengan dana Otsus sebesar 106 miliar rupiah. Media *VOA Indonesia* menyebutkan sedikitnya 70 orang meninggal di Asmat akibat gizi buruk dan campak.[6] Lain halnya *tirto.id* yang menyebut korban campak dan gizi buruk sekitar 63 anak meninggal dunia.[7]

Pemberitaan yang sangat luar biasa tentang KLB Asmat tersebut mengganggu Presiden Joko Widodo. Ia kemudian mengundang Bupati Asmat, Elisa Kambu dan Bupati Kabupaten Nduga, Wentius Nimiangge untuk menjelaskannya di Istana Presiden Jakarta. Pada pertemuan ini, Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan rencana untuk melakukan relokasi masyarakat Asmat.[8]

Tragedi buruk kesehatan di Asmat ini mendapatkan perhatian serius dari Pelapor Khusus Hak Atas Pangan PBB, Hilal Elver, saat berkunjung ke Indonesia pada 9-18 April 2018. Pada kesempatan itu, Hilal Elver menyampaikan bahwa kondisi ini tidak hanya memalukan, tapi merugikan masyarakat Papua, karena pelayanan kesehatan merupakan kewajiban negara. Masyarakat dapat mengguggat negara karena lalai memberikan pelayanan publik (kesehatan).[9]

Kalau kita merujuk pada peraturan atau perundangan yang berlaku, sangat jelas dirincikan di dalam UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam Bab II, Pasal 4 dijelaskan pelayanan publik harus berasaskan partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, fasilitas dan perlakuan

---

6 Bdk.https://www.voaindonesia.com/a/sedikitnya-70-orang-meninggal-di-asmat-akibat-gizi-buruk-dan-campak/4226320.html, diakses kamis, 17 Mei 2018.

7 Bdk. https://*tirto.id*/negara-indonesia-tidak-adil-terhadap-orang-papua-cD4d, diakses kamis, 17 Mei 2018.

8 Bdk. https://www.youtube.com/watch?v=rol9jDAtg74, diakses Senin, 4 Juni 2018.

9 Bdk.http://tabloidjubi.com/artikel-15589-pbb--papua-adalah-contoh-luar-biasa-darurat-pangan-saat-ini.html, diakses Senin, 4 Juni 2018. Dalam UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Bab IV, Pasal 18 dijelaskan masyarakat berhak mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan.

khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan. Selanjutnya di Bab IV, pasal 15 point d penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang berkualitas. Poin e, dijelaskan penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas. Poin f, dijelaskan penyelenggara berkewajiban melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

Tabel Daftar Korban KLB

Berdasarkan Laporan Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agats (September 2017 – Januari 2018)

No	Distrik	Kampung	Gizi Buruk	Campak	Jumlah
1	Pulau Tiga	As	0	8	8
		Atat	0	23	23
		Kapi	0	2	2
		Nakai	0	4	4
2	Fayit	Isar	0	1	1
		Nanai	0	1	1
		Pirien	0	12	12
		Ocenep	0	1	1
3	Aswi	Bawos	0	5	5
		Tauro	0	3	3
4	Akat		0	4	4
5	RSUD		4	3	7
Total					**71**

Pasien campak dan gizi buruk kampung Birak

Asmat Sebelum KLB 2018

Krisis kesehatan Asmat sesungguhnya memiliki cerita panjang. Sebelum kasus gizi buruk dan wabah campak di Asmat, yang kemudian ditetapkan status Kejadian Luar Biasa pada 15 Januari 2018, sesungguhnya peristiwa yang sama pernah diderita oleh masyarakat Asmat. Namun, karena tidak terpublikasi secara luas oleh media, peristiwa itu tak mendapatkan banyak perhatian.

Situasi buruknya kesehatan di Asmat terungkap dalam penelitian dan publikasi sebuah buku karya Willem Bobii, "Dukun Asmat: Tragedi Misi Kemanusiaan Indonesia". Buku ini merupakan potret kesehatan Asmat dari hasil penelitian dan pengalaman hidup atau tinggal bersama penduduk Asmat selama tiga tahun, 2007-2010.

Buku yang tebalnya sekitar 600 halaman ini mengulas secara baik persoalan kesehatan Manusia Asmat. Bahkan di dalam bukunya itu, Willem sudah menyampaikan bahwa sudah terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) pada tahun 2005.[10] Dia mengutip hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Asmat Tohap Capa, "Wabah melanda 27 kampung di lima distrik yakni Distrik Pantai Kasuari, Sawatima, Akat, Atsy dan Distrik Fayit. Sejak pertengahan Juni 2005 sampai kemarin (akhir Juni 2005) dilaporkan 25 Balita meninggal dunia dan itu merupakan kejadian luar biasa".[11] Jelas bagi kita bahwa sudah ada 25 Balita yang meninggal, sebelum kabar buruk terungkap oleh media, yang memberitakan tentang kematian anak-anak Asmat yang jumlahnya hingga 71 orang pada Januari 2018.

Dalam bagian pertama pada bukunya, yang berjudul "Pasien dan Penyakit", Willem mengulas segala jenis penyakit, kesusahan dan penderitaan penduduk Asmat dalam memperoleh

10 Willem Bobi, "Dukun Asmat: Tragedi Misi Kemanusiaan Indonesia", 2015, hal. 30.
11 *Ibid*., hal.31

hak hidup sehat, persoalan sarana dan prasarana kesehatan, pola hidup sehat, dan satu poin khusus Willem menceritakan kasus campak, yang menjadi topik hangat dalam pemberitaan media di awal tahun 2018. Ia mengungkapkan kejadian campak sudah terjadi pada tahun 2006 di Kampung Ayan, Warse dan Kampung Pau Luar. Pada tahun itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat memberikan imunisasi dan vitamin A sekitar 372 anak.

Salah satu hal yang perlu dilihat secara bijaksana adalah adanya tradisi budaya yang melekat pada Manusia Asmat. Seperti di daerah lainnya, Asmat juga memiliki kepercayaan dan tradisi untuk menyembuhkan segala jenis penyakit melalui ritual adat dan tanaman herbal. 'Mungkin' saja situasi ini diamini oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat dan tim medis yang bertugas di Asmat. Hal lainnya adalah medan yang sulit, terisolir dan ketidaksetiaan para petugas medis melakukan pelayanan kesehatan di daerah tersebut.

Mengapa Terjadi Kejadian Luar Biasa

Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat, khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat bersama timnya sudah berusaha melakukan pencegahan. Tim Dinkes Kabupaten Asmat melakukan kegiatan pengobatan dan imunisasi dengan jasa Puskesmas keliling. Walaupun demikian, ada kendala yang dihadapi yakni tidak semua wilayah di Kabupaten Asmat bisa dijangkau dan pola hidup masyarakat kadang berpindah-pindah. Selain itu para petugas medis yang jumlahnya sangat terbatas harus melayani 23 distrik dan 224 kampung.[12]

Kalau kita merujuk pada Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia tahun 2015 yang dikeluarkan *World Food*

12 Berdasarkan data BPS Kabupaten Asmat di tahun 2014, sekitar 224 orang tenaga medis yang melayani di Kabupaten Asmat.

Programme (WFP) dan Kementerian Pertanian, Kabupaten Asmat termasuk dalam prioritas dua. Daerah yang masuk dalam prioritas 1 dan 2 merupakan kabupaten dengan kecenderungan kerawanan pangan dan gizi yang sangat rendah.

Peristiwa kesakitan, penderitaan atau bencana yang menimpa Manusia Asmat, membangkitkan rasa empati, kecewa, sedih, marah. Bencana itu dialami sebagian besar anak-anak, generasi penerus masa depan Asmat. Direktur Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agats, Linus Dumatubun, Pr, ketika diwawancarai pada 23 Januari 2018, menjelaskan bahwa peristiwa ini tidak terlepas dari pola hidup masyarakat dan perhatian dari Pemda Kabupaten Asmat, khususnya Dinas Kesehatan Asmat.

"Kasus ini sebenarnya sudah lama dialami oleh masyarakat di Asmat. Kasus ini juga sudah pernah kami sampaikan ke Pemkab Asmat. Para petugas medis memang sangat jarang untuk melakukan pelayanan di daerah-daerah terkena musibah tersebut. Selain itu, pola (hidup) masyarakat yang kebanyakan mulai berubah dengan segala tawaran yang ada. Dulu masyarakat biasa tangkap ikan dan pergi tokok sagu untuk kebutuhan perutnya. Sekarang berubah. Harus beli supermie, ikan sardin".[13]

Pernyataan Pater Linus ini coba digambarkan lagi oleh Pater Alexandro Rangga, OFM di dalam tulisannya "Melihat KLB Asmat dari Dekat".[14] Di dalam tulisan ini Pater Sandro menjelaskan ada dua hal mengapa terjadi KLB tersebut. Pertama adalah pola hidup masyarakat yang berubah, secara khusus pola konsumsi. Manusia Asmat yang sebelumnya rajin dan pintar meramu makanan yang disediakan alam, kini berubah. Pasca kucuran dana yang berlimpah ruah entah itu bantuan dana desa, proyek pemberdayaan dan dana Otsus, model atau gaya konsumsi masyarakat turut berubah. Alam

13 Wawancara dengan Pater Linus Dumatubun, Pr, 20 April 2018.

14 Bdk. http://fransiskanpapua.org/2018/01/31/melihat-klb-asmat-dari-dekat/, diakses pada 24 Mei 2018.

atau hutan yang dulunya dijadikan 'supermarket, toko atau kios' untuk memenuhi kebutuhan mereka, kini jarang dikunjungi.

Saat ini sebagian masyarakat Asmat lebih senang dan mungkin merasa gampang berkunjung ke supermarket, toko dan kios yang sebenarnya. Masyarakat bukan mencari makanan di alam atau hutan tetapi mencarinya di kios yang ada. Selain itu kepercayaan akan penyembuhan secara tradisional masih kuat. Bukannya tidak mempercayai pengobatan yang dilakukan secara tradisional melainkan Asmat yang sekarang berbeda dengan Asmat yang dulu. Asmat sekarang sudah banyak terpengaruh dan dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan luar.

Hal kedua yang dijelaskan Pater Sandro dalam tulisannya adalah buruknya layanan publik kepada masyarakat Asmat. Keadaan semakin buruk karena tidak adanya sinergitas antara pemerintah kampung, petugas kesehatan dan pemerintah kabupaten. Kebanyakan petugas kesehatan menerima "gaji buta" tanpa melakukan pelayanan di tempat tugasnya. Banyak balai kesehatan (Puskesmas dan Pustu) menjadi bangunan tua, tidak ada aktivitas dan menjadi tidak terawat. Masyarakat tetap menjadi korban. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Asmat tidak melakukan pengawasan yang ketat terhadap para petugasnya yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Ketika kita merujuk pada penjelasan materi yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua dr. Silvanus Sumule, ada pola yang sama untuk Kejadian Luar Biasa. Dalam pemaparan materinya, dr. Sumule menyebutkan beberapa hal antara lain, kematian yang terjadi pada bayi dan anak-anak karena tidak mendapatkan imunisasi, lokasi kejadian pada daerah terisolir, petugas kesehatan tidak ada atau tidak berada di tempat tugasnya, fasilitas kesehatan yang sangat minim dengan sanitasi yang jelek, penduduk menyebar dengan jarak ke fasilitas kesehatan yang sangat

jauh dan sulit dan kondisi gizi buruk atau busung lapar.[15]

Penanganan yang Terlambat

Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pusat, tak belajar dari tragedi kesehatan yang berulang terjadi di Tanah Papua. Peristiwa yang mendera masyarakat Asmat, bagian buruk dari pelayanan publik di bidang kesehatan di Tanah Papua. Sebelum tragedi kelaparan, gizi buruk, dan wabah campak di Asmat, pada 2015 hingga 2016 terjadi peristiwa serupa di wilayah Mbua, Kabupaten Nduga, Papua. Lalu, masih di kabupaten yang sama di Distrik Yigi kembali terjadi pada 2017, di Saminage, Kabupaten Yahukimo pada April 2013 dan September 2017, di Suku Korowai pada 2016-2017, di Tigi Barat, Kabupaten Deiyai pada Januari-Juni 2017, di Lanny Jaya pada 2017, dan di Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang pada Januari 2018. Barangkali masih banyak bencana kesehatan lainnya yang belum terungkap.

Beberapa kasus yang disebutkan ini, proses penanganannya pun hampir sama dengan Kejadian Luar Biasa yang terjadi di Asmat. Penanganan bantuan kesehatan dari pihak yang berwenang selalu terlambat. Bantuan baru diberikan ketika kasus atau peristiwanya sudah diberitakan oleh media dan mendapatkan tekanan publik. Institusi Kesehatan Pemerintah bahkan kaget dengan peristiwa tersebut.

Pada kasus di Asmat, Tim Pemda Asmat mulai menggelar pertemuan untuk membentuk tim penanggulangan kasus gizi buruk dan wabah campak sesudah pemberitaan surat kabar *Kompas* pada 8 Januari 2018. Tim ini melakukan survei atau pengamatan pada keesokan harinya pada 9 Januari di wilayah Nakai.[16]

---

15 Materi yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Silvanus Sumule pada diskusi dialog sektoral yang diselenggarakan oleh Jaringan Damai Papua (JDP) di Aula Susteran DSY Maranatha Waena, Kota Jayapura, 29 September 2017

16 Bdk. Laporan Tim Pemda dalam rangka penanganan wabah campak dan dampak gizi buruk. Laporan ini diperoleh dari Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agats.

Tim bersepakat untuk menetap selama tiga hari di daerah-daerah yang terjangkit campak. Bantuan pelayanan kesehatan dan pemberian imunisasi dilaksanakan selama tiga hari, yaitu pada 10-13 Januari 2018. Kemudian pada 14 Januari 2018 dibentuk sebuah tim besar untuk menjangkau ke-23 distrik di Kabupaten Asmat.[17]

Berdasarkan hasil penanganan ini, dilaporkan bahwa sebanyak 933 anak mendapatkan imunisasi campak dan pemberian vitamin A serta makanan tambahan. Pada 17 Januari 2018, Tim Terpadu Penanggulangan KLB Asmat yang melibatkan Dinas Kesehatan Asmat, Kementerian Kesehatan RI, TNI dan Polri, melakukan pelayanan di 117 kampung dari 19 distrik. Tim terpadu ini dibagi menjadi 8 Satuan Tugas (Satgas). Mereka memeriksa sebanyak 12.398 anak. Dari jumlah ini ditemukan 646 anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk.[18]

Pada 12 April 2018, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungannya ke Asmat. Sebelumnya, pada 22 Februari 2018, Asmat mendapat kunjungan dari empat menteri, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Sosial. Mungkin dilihat sudah cukup bantuannya dan pengobatan yang dilakukan, pada 5 Februari 2018, Bupati Asmat, Elisa Kambu mengeluarkan surat resmi untuk pencabutan status KLB Asmat.

Walaupun status KLB telah dicabut, bukan berarti mengakhiri tugas dan tanggung jawab para tenaga medis atau pelayanan kesehatan. Tim dari Keuskupan Agats juga membantu melakukan pelayanan. Tim ini bergerak di Kampung Warse, Akamar, Birak, Distrik Jetsi, Kampung Sesakam, Pau, Katew, Amborep dan Kampung Dawer.[19]

---

17 *Ibid.,*

18 Bdk. https://regional.kompas.com/read/2018/01/25/14070311/satgas-terpadu-klb-asmat-temukan-646-kasus-campak-dan-144-gizi-buruk, diakses pada Kamis, 17 Mei 2018.

19 Bdk. Laporan Tim Penanganan Kasus Campak dan Gizi Buruk dari SKP Keuskupan Agats yang tidak dipublikasikan.

Di Luar Tanah Asmat

Persoalan kesehatan yang merenggut nyawa manusia Papua usia muda terjadi juga di Kabupaten Pegunungan Bintang dan Yahukimo. Informasi yang dirillis oleh beberapa media di Kota Jayapura seperti *tabloid Jubi dan Antara Papua*, menceritakan bahwa sekitar 23 Balita meninggal dunia karena gizi buruk.[20] Sementara itu dalam situs *www.bbc.com* menyebutkan sebanyak 28 orang meninggal di Kampung Pedam, Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang. Menurut Dinas Kesehatan Pegunungan Bintang, kematian ini karena dehidrasi berat akibat diare, campak dan gizi buruk.[21]

Mengenai informasi kematian itu juga didengar oleh Kepala Dinas Kesehatan Pegunungan Bintang dari seorang mahasiswa yang sedang berlibur di kampungnya. "Saya juga kaget saat mendapat laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua terkait kematian di Kampung Pedam".[22]

Setelah mendengarkan informasi tersebut, pihak Dinas Kesehatan mengutus dua orang dokter dari RSUD Pegunungan Bintang, empat perawat dan dua tenaga gizi. Sedangkan di Kabupaten Yahukimo, khususnya di Distrik Saminage, pada periode Januari-Februari 2018, ada 12 orang meninggal dunia karena mengalami penyakit malaria dan diare. Menurut Bupati Yahukimo Abock Busup, tidak adanya tenaga medis dan hanya kader kesehatan semakin mempersulit penanganan persoalan kesehatan di Saminage.[23]

---

20 Bdk.https://tabloidjubi.com/artikel-13128-sebanyak-23-balita-di-pegunungan-bintang-meninggal-karena-gizi-buruk.html, diakses pada Senin, 22 Januari 2018.

21 Bdk.http://www.bbc.com/indonesia/majalah-42758636,https://suarapapua.com/2018/01/22/setelah-asamat-warga-pegunungan-bintang-juga-terserang-campak-dan-kurang-gizi/ diakses pada Selasa, 23 Januari 2018.

22 Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Pegunungan Bintang Yeremias Tapyor yang dikutip oleh media Liputan06.com. Bdk. http://regional.liputan6.com/read/3233848/lagi-wabah-campak-dan-gizi-buruk-menyerang-pegunungan-bintang, diakses pada Selasa, 23 Januari 2018.

23 Bdk.https://papua.antaranews.com/berita/466228/bupati-yahukimo-tidak-ada-tenaga-kesehatan-di-samenage, diakses pada Rabu, 7 Maret 2018.

REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Asmat

1. Pengawasan atau kontrol yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Kabupaten Asmat terkait kinerja setiap instansi atau SKPD yang ada.
2. Penyuluhan dan pelayanan medis dilakukan secara berkelanjutan.
3. Pembekalan kepada setiap petugas medis yang melayani di daerah Asmat tentang budaya dan tradisi manusia Asmat.
4. Merencanakan dan menjalankan program kerja yang memberdayakan manusia Asmat dengan kearifan lokal yang ada di Asmat.
5. Pengelolaan dana kesehatan secara bijak dan tepat.
6. Pengawasan jenis-jenis makanan dan obat-obatan yang kedaluwarsa yang beredar di daerah Asmat.
7. Tidak menciptakan produk hukum/Perda/kebijakan yang membuat masyarakat menjadi sangat tergantung kepada pemerintah.

Pemerintah Provinsi Papua

1. Menseriusi program 1 juta imunisasi yang sudah diprogramkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
2. Program penyediaan makanan yang bernutrisi.
3. Melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap petugas kesehatan di setiap kabupaten.

Pemerintah Pusat

1. Pemerintah pusat meminimalisir kematian yang terus terjadi di Tanah Papua. Menjamin kesehatan ibu menyusui, ibu hamil, anak-anak.
2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap SKPD, khususnya SKPD Kesehatan di Kabupaten Asmat.

Masyarakat Asmat

1. Melakukan pengaduan atau melaporkan setiap petugas kesehatan yang tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan membentuk unit pengawasan dari masyarakat. Unit pengawasan ini bisa terdiri dari Kepala suku, pegiat kesehatan/ LSM, Tokoh Gereja, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

LSM/CSO, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Gereja

1. Bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah untuk melakukan pengawasan petugas yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya
2. Memfasilitasi masyarakat dengan melakukan pendampingan agar masyarakat dapat memahami kebutuhan akan kesehatannya.
3. Membantu atau memfasilitasi masyarakat untuk meneruskan pengaduan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang buruk.

Bab 2

PELARANGAN BERPENDAPAT DI MUKA UMUM

Diskusi tentang situasi hak asasi manusia dikekang. Ruang berkumpul dan berdiskusi diintimidasi. Aksi menyalurkan suara ke muka umum dan publik dilarang. Saluran-saluran terbuka untuk menyuarakan hak asasi manusia di Tanah Papua sulit didapatkan.

Perjuangan menyuarakan situasi hak asasi manusia dan pandangan politik orang-orang Papua tetap dilakukan. Konsekuensinya, aksi-aksi demonstrasi damai, yang menyuarakan aspirasi dibubarkan. Bahkan, para mahasiswa, yang menyuarakan pendapatnya di muka umum diancam dan ditangkap.

Aksi 9 Agustus 2018 di Jayapura, Dok. GempaR Papua

Tahun 2018, sejak pertengahan hingga akhir tahun, tepatnya pada Juli, September, dan Desember, para aktivis, mahasiswa, dan masyarakat Papua yang menyuarakan pendapat di muka umum menghadapi tindakan represif. Hak kebebasan berpendapat di muka umum benar-benar terenggut. Kebebasan demokrasi bagi Tanah Papua benar-benar menuju kepada titik rendah di dalam negeri ini.

Dan, desakan penyelesaian hak asasi manusia, pandangan dan aspirasi politik referendum, adalah paling keras mendapatkan tindakan-tindakan represif, baik dari aparat keamanan maupun dari kelompok-kelompok organisasi masyarakat yang berbeda sikap dan pandangannya terkait persoalan Papua. Hal ini dialami oleh para mahasiswa dan orang-orang muda di daerah luar Papua.

Membungkam Suara dengan Represif

"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk meliputi kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas".[24]

Pada 6 Juli 2018, mahasiswa yang berada di Kota Surabaya menggelar diskusi di asrama mahasiswa terkait kasus pelanggaran HAM berat pada kasus Biak 6 Juli 1998. Namun, kegiatan diskusi ini dibubarkan oleh aparat kepolisian dan Ormas di kota Surabaya. Aksi pembubaran ini pun

24 Bdk. Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 19, 20 (dokumen A.2)

mendapatkan sorotan dari kelompok prodemokrasi. Sebanyak 57 organisasi prodemokrasi mengutuk tindakan yang berlebihan dari dari aparat keamanan dan Ormas di Surabaya.[25] Walaupun demikian, pihak kepolisian membantah, bahwa mereka tidak terlibat dalam pembubaran diskusi tersebut. Kepolisian mengungkapkan bahwa yang membubarkan diskusi adalah kelompok masyarakat. "Kalau (pembubaran) dari kami tidak ada. Penolakan murni dari warga (kota Malang)".[26]

Sedangkan di Kota Jakarta, mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia (FRI) untuk West Papua menggelar aksi turun jalan di Taman Aspirasi Istana Negara, Jakarta, pada 1 Juli 2018, tentang hari aneksasi Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain menuntut pelurusan sejarah, masa aksi juga meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk menutup dan menghentikan aktivitas eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan-perusahaan asing, menarik militer organik dan nonorganik dari Tanah Papua serta memberikan jaminan kebebasan pers dan akses terhadap informasi di Papua.[27]

Pada 4 September 2018, massa aksi United Liberation National for West Papua (ULMWP) yang berada di Tanah Tabi Jayapura melakukan aksi dukungan terhadap negara-negara PIF yang membawa isu Papua ke Sidang Umum PBB. Dalam aksi itu, sebanyak 79 orang demonstran ditahan saat menyampaikan pendapat di muka umum.[28]

Aksi menyampaikan pendapat di muka umum kembali dilakukan pada 24 September 2018. Generasi muda Papua yang

---

25 Bdk.http://suarapapua.com/2018/07/17/diskusi-amp-surabaya-dibubarkan-paksa-pada-6-juli-57-organisasi-ini-bersolidaritas/, diakses pada Senin, 18 Juli 2018.

26 Ungkapan yang disampaikan oleh Kapolres Malang Kota, AKBP Asfuri, Senin (02/07), seperti dilaporkan wartawan di Malang, Eko Widianto, untuk BBC News Indonesia, bdk. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44682734, diakses pada Selasa, 4 Juli 2018.

27 Bdk.https://*tirto.id*/aliansi-mahasiswa-tuntut-papua-bebas-dari-kolonialisme-indonesia-cNlm, diakses pada 3 Juli 2018.

28 Bdk.https://tabloidjubi.com/artikel-19165--demo-ulmwp-total-ada-79-pendemo-ditangkap-polisi.html, diakses pada Rabu, 5 September 2018.

dimotori oleh mahasiswa di Kota Jayapura menggelar aksi demonstrasi damai untuk mendukung agenda negara-negara Pasifik yang membawa isu Papua ke Sidang Umum PBB ke-73. Aksi ini dihadapi represif oleh kepolisian; melakukan penghadangan, penangkapan dan pemukulan terhadap massa aksi. Bahkan, mahasiswa Universitas Sains Teknologi Jayapura (USTJ) yang melakukan demonstrasi dihadang di halaman kampusnya. Menurut Sekretaris Aksi Kris Dogopia, polisi membubarkan massa aksi tetapi ditolak oleh massa. Pihak kepolisian menahan massa aksi dan mengangkut ke mobil Dalmas. Di antara anggota massa mengalami pemukulan. "Satu mahasiswa, Petrus Kosamah dipukul di halaman kampusnya. Polisi bubarkan tetapi mahasiswa tidak mau. Polisi paksa tarik (pendemo), naikkan ke truk Pengendali Massa (Dalmas). Saat itulah terjadi pemukulan".[29]

Peristiwa lain, sebelum aksi pada 24 September 2018, salah satu anggota Solidaritas Nasional Mahasiswa Papua (SoNaMaPa) berinisial PR mendapatkan teror dan intimidasi dari pihak kepolisian di Kota Jayapura. Beberapa anggota kepolisian mendatangi rumah dan keluarganya, agar melarang PR dan teman-temannya untuk tidak melakukan aksi turun ke jalan.

"Ada dua anggota intelijen datang ke rumah saya. Salah satunya memperkenalkan diri sebagai Kanit Intelkam Polsek Dok 8 Jayapura Utara. Tujuan kedatangan mereka adalah perintah langsung dari Kapolresta Jayapura AKBP Urbinas. Mereka mengatakan bahwa kalau ada aksi besok (24/09/2018), kami akan ditangkap. Kedatangan mereka ini membuat istri dan orang tua saya panik. Tidak ada prosedural seperti surat perintah yang mereka bawakan".[30]

---

29 Pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Aksi ULMWP Kris Dogopia, bdk. https://tabloidjubi.com/artikel-19741-demo-ulmwp-67-mahasiswa-ditangkap-satu-dipukul-polisi.html, diakses pada Selas, 25 September 2018.

30 Wawancara dengan korban PR pada Selasa, 25 September 2018 di Jayapura.

Pada saat aksi demonstrasi itu, massa aksi yang berkumpul di beberapa tempat di Kota Jayapura ditangkap oleh pihak kepolisian. Beberapa titik lokasi penangkapan terletak di Terminal Expo Waena, halaman kampus USTJ, depan Kantor Pos Abepura. Berdasarkan data yang dimiliki oleh kelompok massa aksi itu, sekitar 67 orang ditangkap oleh kepolisian.

Aksi menyampaikan mendapat ini semakin kuat dan menyebar di sejumlah wilayah, baik di Tanah Papua maupun di luar Papua. Aksi menyampaikan pendapat di muka umum itu untuk mendesak Negara Indonesia menyelesaikan persoalan hak asasi manusia di Tanah Papua serta mendesak penentuan nasib sendiri.

Tanggal 1 Desember merupakan momen bersejarah bagi bangsa Papua, merayakan hari kelahiran (kemerdekaan) Bangsa Papua. Biasanya, perayaan ini dilakukan oleh masyarakat hampir di seluruh Tanah Papua. Pada 1 Desember 2018 ini, peringatan peristiwa itu dengan menggelar aksi menyampaikan pendapat di muka umum. Menjelang 1 Desember situasi di Tanah Papua selalu 'panas'. Pada tahun 2018, militer melakukan aksi sweeping. Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melalui Juru Bicara Ones Suhuniap, mengungkapkan Sekretariat Pusat KNPB di Kota Jayapura di-sweeping oleh aparat gabungan TNI dan Polri.

"Aparat gabungan menggunakan 9 truk tentara/polisi, 3 mobil Polantas, 5 mobil strada milik polisi, 6 mobil Avanza, motor dan dengan senjata lengkap. Mereka juga melakukan intimidasi kepada Ketua Umum KNPB Agus Kossay dan beberapa aktivis KNPB lainnya. Selain itu terdengar 3 kali bunyi tembakan ke udara. Penggerebekan ini telah dilakukan sebanyak empat kali. Perkakas dapur dan makan dihancurkan dan dihambur oleh mereka. Pada kesempatan ini, mereka menangkap salah satu mahasiswa atas nama Larius Heluka".[31]

31 Penjelasan yang disampaikan oleh Jubir KNPB Ones Suhuniap dalam laporannya.

Aksi 9 Agutus 2018 di Merauke, Dok. GempaR Papua

Tindakan sweeping di Sekretariat Pusat KNPB juga terjadi dengan mahasiswa Papua yang sedang melanjutkan studinya di Kota Malang dan Surabaya. Sekitar 50 anggota Ormas Pemuda Pancasila dan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri (FKPPI) datang ke Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, Jumat, 30 November 2018.[32] Tujuan kedatangan mereka adalah mendesak mahasiswa Papua tidak turun jalan untuk melakukan aksi dengan membawa isu Papua Merdeka pada Sabtu, 1 Desember 2018. Pada kesempatan ini juga Ormas membawa spanduk yang bertuliskan "Arek Suroboyo Menolak dan Siap Melibas Gerakan Separatis dan Tangkap Provokator yang Berusaha Pecah Belah NKRI".

Meski mengalami sweeping dan tindakan intimidasi, para mahasiswa di kota Malang dan Surabaya serta massa KNPB di Tanah Papua tetap menggelar aksi turun ke jalan menyampaikan pendapat di muka umum, menyuarakan penentuan nasib sendiri dan pelurusan sejarah Papua. Aksi ini juga mendapatkan solidaritas dari kelompok Front Rakyat Indonesia (FRI) untuk

32 Bdk.https://nasional.tempo.co/read/1151111/pp-dan-fkppi-bakal-hadang-demo-mahasiswa-yang-usung-papua-merdeka/full&view=ok, diakses pada Senin, 3 Desember 2018.

West Papua. Aksi bersama itu dilakukan di beberapa kota, seperti di Kupang, Ambon, Ternate, Surabaya, dan Manado.

Aksi-aksi yang menyuarakan pelurusan sejarah dan penentuan nasib sendiri dianggap berseberangan dengan negara, bahkan dianggap makar. Sebaliknya, bagi generasi muda Papua, suara itu bagian dari perjuangan mendapatkan kebenaran sejarah. Maka, pihak kepolisian pun melakukan penangkapan terhadap massa aksi.

Berdasarkan laporan KNPB Pusat melalui Juru Bicaranya Ones Suhuniap, sekitar 309 orang ditangkap dalam aksi memperingati 1 Desember 2018. Berikut data jumlah massa yang ditangkap; di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur berjumlah 18 orang, Ambon sebanyak 43 orang, Ternate sebanyak 99 orang, Surabaya 16 orang, Manado (Sulawesi Utara) sebanyak 211 orang, Sentani (Kabupaten Jayapura) sebanyak 44 orang, Manokwari sebanyak 37 orang, Abepura dan Kota Jayapura sebanyak 16 orang, Fait Asmat 1 orang.[33]

Sedangkan dari pantauan koalisi Pengacara HAM di Papua (LBH Papua, KPKC Sinode GKI di Tanah Papua dan PAHAM Papua) terdapat 85 orang Papua yang ditangkap dalam acara peringatan dan ibadah syukur 1 Desember 2018.[34] Lalu media *BBC Indonesia* melaporkan penangkapan massa aksi prokemerdekaan berjumlah sekitar 600 orang, yang tersebar di berbagai kota; Ternate, Ambon, Makasar, Kupang, Jayapura, dan Manado.[35]

Semangat untuk meluruskan sejarah dan memperjuangkan kemerdekaan bagi manusia dan Tanah Papua didukung oleh pernyataan sikap dari organisasi perjuangan dan gerakan yakni United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). "Kami terus memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri

---

33 Laporan dari Juru Bicara KNPB Pusat Ones Suhuniap.

34 Bdk. Laporan Koalisi Pengacara HAM Papua (LBH Papua, KPKC Sinode GKI di Tanah Papua dan PAHAM Papua), video siaran persnya diakses di https://www.youtube.com/watch?v=rpLySNZ_x1s,

35 Lihat, "Peringati 1 Desember Papua, organisasi proPapua merdeka: Hampir 600 orang ditangkap di berbagai kota", https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46411149, diakses 3 Desember 2018.

bagi rakyat dan bangsa Papua sebagai solusi demokratis".[36] ULMWP merupakan sebuah payung organisasi untuk menyuarakan kemerdekaan di Tanah Papua.

Aksi perlawanan damai yang ditunjukan oleh generasi muda Papua masih terus berlanjut. Mereka terus menyuarakan pelurusan sejarah tanahnya dan segala pelanggaran HAM yang terjadi dari waktu ke waktu. Tanggal 10 Desember yang diperingati sebagai Hari HAM Internasional digunakan oleh generasi muda Papua untuk menyuarakan segala pelanggaran HAM di Tanah Papua. Di Kota Jayapura, mahasiswa dan kaum muda Papua turun ke jalan menggelar aksi menuntut penuntasan dan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Tanah Papua.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Fajar Timur Jayapura melakukan aksi diam di jalan di kota Jayapura. Massa ini menyuarakan dan mendesak penyelesaian berbagai pelanggaran hak asasi manusia di Tanah Papua dengan membentangkan spanduk dan poster-poster. Kelompok massa ini juga menyuarakan dan menyampaikan kepada publik mengenai masih berlangsungnya pelanggan HAM di Papua melalui pertunjukan fragmen.[37]

Selain aksi diam berjubah dari BEM STFT Fajar Timur, aksi turun ke jalan memperingati hari HAM Internasional juga dilakukan kelompok muda: KNPB dan mahasiswa Papua lainnya. Di Kota Jayapura, aksi peringatan HAM ini dihadang dan dibubarkan oleh TNI dan Polri.

Aksi yang sama dilakukan di beberapa daerah di Tanah Papua seperti di Timika, Sorong Raya, Manokwari, Fakfak dan Merauke. Di Kota Timika, aksi memperingati HAM terpaksa dibubarkan oleh aparat gabungan TNI-Polri dan sejumlah

---

36 Pernyataan sikap ini dapat diakses di http://fransiskanpapua.org/2018/12/03/pernyataan-sikap-ulmwp/

37 Bdk. http://fransiskanpapua.org/2018/12/11/diam-untuk-sadarkan-negara/, diakses pada 11 Desember 2018. Video aksi bisa diakses di https://www.youtube.com/watch?v=XwLcrOw-sWLM

anggota massa ditangkap. Berdasarkan laporan dari Juru Bicara KNPB Pusat, Ones Suhuniap, sebanyak 90 orang masa aksi yang merayakan hari HAM ditangkap. Rencana aksi dengan melakukan long march ke Kantor DPRD Mimika tidak berjalan karena dihadang oleh aparat gabungan.[38]

Sementara itu di Kota Merauke sebanyak 41 orang peserta aksi, yang di antaranya anak-anak ditangkap oleh pihak kepolisian. Di Kota Jayapura, aksi yang rencananya ke Kantor DPR Papua tidak diizinkan oleh pihak kepolisian. Massa semuanya berkumpul di putaran taksi Perumnas 3 Waena dan melakukan orasi. Di Kota Sorong, Fakfak dan Manokwari, aksi memperingati hari HAM Internasional ini berjalan walaupun mendapatkan tekanan dari aparat keamanan.[39]

Ada beberapa pesan yang disampaikan dalam peringatan Hari HAM Internasional tahun 2018, yaitu: 1) Negara Indonesia bertanggung jawab menuntaskan kasus pelanggaran HAM seperti Kasus Wamena 2003, Wasior 2001, Paniai 2014 dan Biak 1998. 2) Stop militerisme di Tanah Papua: tarik semua militer organik dan nonorganik dari Tanah Papua. 3) Segera kembalikan hak politik bangsa Papua Barat. 4) Stop kekerasan dan pembunuhan di Tanah Papua. 5) Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. 6) Stop eksploitasi sumber daya alam Papua dengan menutup semua perusahaan yang beroperasi di Tanah Papua. 7) Segera menutup semua usaha penjualan Miras. 8) KNPB mengajak semua rakyat Papua untuk melakukan mobilisasi menuju mogok sipil demi agenda hak penentuan nasib sendiri bagi Bangsa Papua.

Pasca perayaan Hari HAM Internasional, generasi muda terus mendesak negara dan dunia internasional terkait pelurusan sejarah dan pemberian hak penentuan nasib sendiri. Momen

---

38 Laporan yang disampaikan oleh Jubir KNPB Pusat.

39 *Ibid*., video masa aksi Hari HAM 10 Desember 2018 yang dihadang oleh pihak TNI dan Polri, https://www.facebook.com/westpapuaupdates/videos/372441966894544/

yang digunakan adalah peringatan Hari Trikora, 19 Desember. Massa aksi menolak operasi Trikora yang dikumandangkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1961. Operasi ini merupakan salah satu operasi militer Indonesia yang menggagalkan kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Hindia Belanda bagi Bangsa Papua Barat. Aksi turun jalan ini tetap mendapat perlawanan dari aparat gabungan TNI-Polri. Operasi Trikora juga merupakan salah satu operasi pendudukan Negara Indonesia di Tanah Papua. Selain itu operasi Trikora dinilai juga sebagai malapetaka dan pemusnahan manusia Papua. Selain menolak bahwa adanya Operasi Trikora, massa aksi juga menuntut agar Indonesia membuka akses bagi jurnalis asing melakukan investigasi di Tanah Papua, seperti pada Kasus Nduga Desember 2018.

Di Tanah Papua, massa aksi dikoordiniir oleh KNPB, sedangkan di luar Tanah Papua, massa dikoordinasi oleh AMP dan FRI West Papua. Di Tanah Papua aksi dilakukan di Merauke, Timika dan Jayapura.

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh KNPB Pusat massa aksi di Kota Jayapura sebanyak 29 orang ditangkap oleh kepolisian, 15 orang di Sentani, 9 orang di Expo Kota Jayapura, Kampus Uncen 2 orang, Rusunawa Perumnas III Waena 3 orang. Di Kota Merauke ada 4 orang ditangkap, di Timika ada 130 orang ditangkap.[40] Di kota luar Papua, seperti Malang sebanyak 64 orang ditangkap; 16 orang dipukul oleh aparat kepolisian dan Ormas, di Bali sebanyak 66 orang massa aksi dibubarkan oleh aparat kepolisian; 4 orang dipukuli, di Kota Ternate sebanyak 7 orang ditangkap dan dipukuli oleh aparat gabungan.[41]

Perlawanan dari Negara melalui aparat keamanan TNI dan Polri, bukan saja melakukan pembubaran, pemukulan dan

---

40 *Ibid*.,bdk.https://kbr.id/nasional/122018/knpb__aparat_bubarkan_aksi_tolak_trikora_19_desember__ratusan_orang_ditahan/98489.html, diakses pada Kamis, 20 Desember 2018

41 *Ibid*.,bdk.https://*tirto.id*/demo-menolak-trikora-kembali-berujung-penangkapan-aktivis-papua-dcia, diakses pada Sabtu, 22 Desember 2018.

penangkapan terhadap massa tetapi juga melakukan perusakan asrama mahasiswa Tolikara dan Lani Jaya di Waena, Kota Jayapura dan menyita handphone milik mahasiswa di asrama tersebut.[42]

Sebulan sebelumnya, ruang gerak organisasi KNPB semakin ditekan. Kesempatan untuk merayakan hari berdirinya organisasi KNPB, yang lazim dilakukan seperti organisasi lainnya terpaksa berurusan dengan aparat keamanan. Perayaan Dies ke-10 KNPB dilarang oleh TNI-Polri. Padahal, perayaan ini diisi dengan kegiatan diskusi tentang persoalan di Tanah Papua. Sebanyak 126 orang yang terlibat dalam diskusi tersebut diangkut ke Mapolresta Jayapura.[43]

Selanjutnya sesudah beberapa aksi itu, KNPB menjadi sasaran 'amukan' dari aparat keamanan Indonesia. Anggota dan Sekretariat KNPB di Kota Jayapura dan beberapa wilayah lainnya, terus diteror, digeledah dan dirusak oleh aparat gabungan. Di Timika, ketika merayakan hari lahirnya, aparat gabungan terpaksa membubarkan perayaan ibadah yang dilaksanakan oleh KNPB wilayah Mimika. Sekretariat KNPB Mimika juga dirusak oleh aparat polisi.[44]

Di dalam siaran persnya, KNPB menilai bahwa tindakan dari pihak kepolisian di Mimika merupakan tindakan 'premanisme' yang mengambil alih bangunan KNPB tanpa ada surat perintah. Selain itu pihak kepolisian menangkap 3 anggota KNPB Mimika yang dijadikan tersangka.[45] Di Kota Agats, sekretariat KNPB di wilayah Fait juga dibakar oleh pihak kepolisian setempat.

Hal menarik lainnya adalah salah satu mantan tahan an Politik Papua Filep Karma menginisiasi pelaksanaan Aksi

---

42 Video penjelasan dan pernyataan terkait pengrusakan asrama yang dilakukan TNI/Polri pada 19 Desember 2018, https://www.facebook.com/westpapuaupdates/videos/597243524037687/ atau https://youtu.be/rOQsxBFd1zE,https://www.facebook.com/westpapuaupdates/videos/329528970968420/ atau https://youtu.be/144865MH7wU

43 Bdk. http://fransiskanpapua.org/2018/11/19/perayaan-dies-ke-10-knpb-dibubarkan/, diakses pada Senin, 19 November 2018

44 Bisa nonton video pengrusakan Sekretariat KNPB Mimika di https://www.facebook.com/westpapuaupdates/videos/1976231089348121/

45 Bdk. Siaran Pers KNPB pada 3 Januari 2019.

Kamisan. Seperti halnya dengan Aksi Kamisan yang dilakukan di depan Istana Negara Jakarta, Aksi Kamisan di Papua juga dilakukan untuk mendesak Negara Indonesia menyelesaikan segala kasus pelanggaran HAM, bukan saja di Tanah Papua tetapi di seluruh tanah Indonesia. Aksi Kamisan pertama di Papua dilakukan di Kota Jayapura pada Kamis, 20 Desember 2018 di depan Kantor DPR Papua dan Gedung Sarinah Jayapura. Aksi Kamisan kedua dilaksanakan pada Kamis, 27 Desember 2018.[46] Namun aksi yang kedua ini dibubarkan oleh pihak kepolisian Kota Jayapura. Menurut pengakuan Filep Karma bahwa pihak kepolisian tidak mengizinkan untuk melaksanakan aksi tersebut.

Peristiwa pembungkaman suara-suara mengenai Papua juga terjadi di kota Denpasar, Bali, saat para pegiat hak asasi manusia dan orang-orang muda dari beberapa daerah di Indonesia berkumpul pada 12-14 Desember 2018. Kegiatan yang diprakarsai oleh Elsam Jakarta ini mendapatkan tekanan dan teror dari pihak kepolisian setempat, karena di dalam pertemuan itu dibahas tentang persoalan HAM di Tanah Papua.

"Beberapa kali mengikuti pertemuan yang melibatkan teman-teman Papua dan sejauh itu pula saya merasa situasi tidak cukup aman. Intel ada di setiap kegiatan dan diskusi terpaksa dialihkan ke hal lain, hanya untuk tidak dicurigai dan terjadi hal-hal yang lebih buruk terutama terhadap teman-teman dari Papua. Selain keterlibatan intel, saya kira masyarakat sipil juga turut berdosa dalam hal diskriminasi terhadap teman-teman Papua. Pandangan merendahkan seringkali ditemui. Bahkan saat masuk ke hotel, tas kawan-kawan Papua diperiksa tapi hal itu tidak diberlakukan ke saya dan Dara".[47]

---

46 Bdk. http://fransiskanpapua.org/2018/12/21/aksi-kamisan-di-tanah-papua/, diakses pada Jumat, 21 Desember 2018.

47 Pernyataan yang disampaikan oleh salah satu peserta diskusi dalam kegiatan tersebut, bdk. http://fransiskanpapua.org/2018/12/17/diskusi-tentang-papua-diintimidasi-di-bali/,diakses pada 17 Desember 2018.

REKOMENDASI

1. Pemerintah dan DPR di Papua dan Papua Barat, MRP serta MRPB, menjamin hak kebebasan berkumpul dan hak kebebasan mengungkapkan pendapat secara damai bagi setiap warga negara di Tanah Papua tanpa pengecualian.
2. Negara Indonesia wajib memberikan kebebasan kepada masyarakat Papua untuk menyampaikan pendapatnya, termasuk pendapat pelurusan sejarah Tanah Papua.
3. Negara Indonesia, melalui alat negaranya: TNI dan Polri, wajib menjunjung dan memberlakukan segala peraturan atau perundangan terkait penyampaian pendapat di muka umum seperti yang tertuang dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
4. Negara Indonesia memberikan akses yang seluas-luasnya bagi jurnalis atau media (nasional dan internasional) untuk melakukan kerja-kerja jurnalis di Tanah Papua.
5. Negara Indonesia memberikan akses kepada Pelapor Khusus Bidang HAM PBB ke Papua untuk melakukan investigasi dan mengetahui apa yang terjadi di Tanah Papua.
6. Kelompok, organisasi, solidaritas maupun pribadi yang menyampaikan pendapat di muka umum harus menjaga keamanan dan ketertiban bersama.

Bab 3

KONFLIK BERSENJATA DI TANAH NDUGAMA

TANAH NDUGAMA, sebutan lain dari wilayah Nduga, pada 2018 kembali bergejolak dalam konflik bersenjata, TNI-Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB). Konflik bersenjata ini telah berdampak buruk bagi kemanusiaan. Konflik bersenjata membuka luka penderitaan orang-orang Nduga dan Papua yang belum pulih benar. Pada 2016 hingga 2017 lalu, warga di daerah Mbua, Kabupaten Nduga, terserang penyakit yang menyebabkan banyak anak meninggal dunia.

Para pengungsi di hutan Nduga, Dok. Tim Relawan Nduga

Saat itu, pada Agustus hingga Oktober 2017, Tim Solidaritas Yigi menemukan 35 anak meninggal karena wabah penyakit.[48] Yigi adalah daerah paling berdampak dalam konflik bersenjata saat ini.

Selain Yigi, satu lagi daerah Nduga berdampak buruk karena konflik bersenjata adalah Alguru, sebuah kampung yang disebut-sebut sebagai markas TPN PB. Kampung Alguru menjadi area kontak senjata, penduduknya mengungsi dan menjadi korban.

Operasi militer Indonesia di dua wilayah Yigi dan Alguru telah menciptakan situasi buruk bagi kehidupan warga sipil di kedua kampung itu, juga di sejumlah kampung lain di distrik-distrik wilayah Nduga. Warga sipil menjadi korban kekerasan dan tindakan represif aparat keamanan.

Operasi militer ini dilakukan sesudah insiden kekerasan dan penembakan kelompok TPN PB yang mengesekusi para tenaga kerja pelaksana proyek jembatan di daerah Nduga. Belasan pekerja ditemukan tewas, sebagian selamat. Sejak itu, situasi buruk menyelimuti orang-orang Ndugama.

1. Peristiwa Alguru

Konflik senjata bermula ketika peristiwa penembakan pesawat Dimonim pada 22 Juni 2018 di Bandara Kenyam, Nduga, Papua. Dalam penembakan itu, seorang Co-pilot Irena Nur Fadila terkena serpihan peluru di bagian pergelangan kaki kanan. Pesawat ini membawa 17 anggota BKO Brimob yang ditugaskan mengamankan Pemilihan Gubernur Papua. Penembakan ini diduga dilakukan oleh TPN PB.

Tiga hari kemudian, 25 Juni 2018, penembakan terjadi kembali pada pesawat Twin Otter Trigana Air, yang membawa

48 Peristiwa ini dapat dilihat dalam video konferensi pers oleh mahasiswa Nduga di Kota Jayapura di https://www.youtube.com/watch?v=fjuutUVWny0&t=12s

15 anggota BKO Brimob dengan tujuan yang sama. Akibatnya, Pilot Abdulah Kamil terkena serpihan peluru di bagian bahu sebelah kanan dan kepala bagian belakang. Pada 6 Juli 2018 terjadi penembakan lagi. Kali ini sasarannya anggota Brimob yang melakukan pengamanan di Bandara Kenyam, Nduga. Seorang anggota Brimob terkena tembakan.

Sejumlah peristiwa penembakan itu mengawali pecahnya konflik bersenjata. Militer Indonesia mengerahkan kekuatan untuk menyerang TPN PB. Pasukan TNI dan Polri melakukan pengejaran dan penyisiran. Sejumlah kekuatan pasukan militer dikirim ke wilayah Alguru, Nduga. Solidaritas HAM untuk Nduga, dalam siaran persnya, mencatat sekitar 1000 personel gabungan TNI Polri dikirim untuk melakukan pengejaran kepada para pelaku penembakan.[49] Pihak kepolisian Papua menyatakan bahwa operasi itu merupakan operasi penegakan hukum.[50] Sementara itu Bupati Nduga, Yairus Gwijangge, menanggapi operasi militer tersebut tanpa berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Nduga. Menurut Yairus, ada penembakan yang dilakukan dari udara melalui helikopter.[51]

Pernyataan Bupati Yairus itu ditanggapi oleh pihak kepolisian. Menurut Kapolres Jayawijaya yang membawahi Polres Nduga, AKBP Yan Pieter Reba, helikopter yang digunakan adalah untuk mengangkat logistik Pilkada, obat-obatan dan bahan makanan. Sedangkan Kapolri Jendral Pol. Tito Karnavian menjelaskan bahwa pengiriman pasukan tambahan ke Nduga untuk melakukan pengamanan pelaksanaan Pilkada. "Kita tidak akan mundur, kita akan tetap kirim pasukan.

---

49 Siaran persnya dapat diakses di http://fransiskanpapua.org/wp-content/uploads/2018/07/SIARAN-PERS-SOHAM-NDUGA.pdf

50 Bdk.https://tabloidjubi.com/artikel-17626-kapolda--di-nduga-tidak-ada-operasi-militer-namun-operasi-penegakan-hukum.html, diakses pada Senin, 16 Juli 2018.

51 Bdk.https://kbr.id/nasional/072018/baku_tembak_di_nduga__200an_warga_kampung_alguru_mengungsi/96566.html, diakses 16 Juli 2018 atau https://tabloidjubi.com/artikel-17688-klasis-kingmi-keneyam-tiga-orang-meninggal-paska-penyisiran-aparat-keamanan.html, diakses pada 16 Juli 2018.

Saya sudah sampaikan ke Pak Kapolda, kalau kurang, kita akan tambah lagi".[52]

Dari pihak TPN PB melalui Komandan Operasi Lapangan Kodap III Ndugama, Egianus Kogeya menyatakan bertanggung jawab terhadap peristiwa penembakan tersebut. "Semua rangkaian kasus penembakan pesawat tanggal 22 Juni, 25 Juni dan 27 Juni adalah murni perjuangan kami TPN PB Kodap III Ndugama. Maka kami siap bertanggungjawab. Dan perjuangan kami akan berakhir sampai titik darah penghabisan".[53]

Operasi militer di Nduga tersebut kurang terpantau oleh media, karena akses bagi jurnalis tidak ada. Berdasarkan informasi yang diperoleh SoHAM Nduga, tidak ada ruang dan kesempatan bagi jurnalis atau pihak yang mencari data lapangan. Semua akses mendapat pengawalan dan pemeriksaan ketat oleh pihak keamanan. Bahkan ketika SoHAM beraudiensi dengan Majelis Rakyat Papua (MRP), salah satu anggota MRP menjelaskan bahwa MRP juga tidak diberikan ruang tersebut. "Kami memang hendak ke Alguru, tetapi di Wamena kami ditahan. Kami sempat berkomunikasi dengan Bupati Nduga agar bisa memberikan kami akses tetapi tidak bisa".[54]

Publik yang tidak mengetahui secara benar kejadian dan operasi pengejaran pelaku penembakan, hanya mencerna dan menafsirkan informasi-informasi yang beredar. Ada pihak yang mendukung operasi yang dilakukan militer tetapi ada yang menolak keras karena mengorbankan warga sipil yang tak bersalah.

Kasus foto hutan yang terbakar yang dikabarkan terjadi saat operasi militer di Nduga, menjadi kajian dan perhatian bagi media *Tirto.id*. Dalam artikel Tirto, 13 Juli 2018, berjudul "Periksa Fakta: Kabar Kabur tentang Kejadian di Nduga, Papua", mengulas

---

52 Bdk.https://tabloidjubi.com/artikel-17625-bupati-nduga--saya-minta-warga-tidak-lari-sembunyi-ke-hutan.html, diakses pada Senin, 16 Juli 2018

53 Bdk.http://suarapapua.com/2018/07/09/TPN PB-kodap-iii-ndugama-mengaku-bertanggungjawab-atas-penembakan-di-kenyam/, diakses pada Selasa, 10 Juli 2018.

54 Ungkapan ini disampaikan oleh angota MRP.

tentang verifikasi kebenaran foto tersebut. Berdasarkan hasil investigasi Tirto, sumber foto hutan yang terbakar itu tidak benar. Hutan yang terbakar itu bukan di Papua atau pun di Kalimantan. Tetapi, terungkap fakta bahwa ada kontak senjata di Alguru, Nduga dan operasi militer untuk mengejar pelaku penembakan.

Pasca Penyisiran

Menurut Juru Bicara Lembaga Masyarakat Adat Nduga, John Beon, ratusan warga Kampung Alguru belum pulang ke rumahnya pasca operasi penyisiran yang dilakukan oleh pihak militer. Tempat tinggal warga hancur dirusak oleh aparat gabungan TNI-Polri.[55] Sekitar 200 warga sipil harus mengungsi ke hutan Wamena, Yahukimo, dan Asmat. Pasca operasi penegakan hukum ini ditemukan ada tiga warga sipil yang meninggal.[56] Dampak lainnya aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik lumpuh.

Peristiwa konflik bersenjata di wilayah Alguru dan nasib warga sipil mengundang banyak pihak memberikan reaksi dan tanggapan. Pihak-pihak yang disebutkan di sini adalah pihak-pihak yang mengutamakan keselamatan warga sipil.

Di Tanah Papua, para pegiat HAM (NGO, Advokat, Mahasiswa, Lembaga Gereja) membentuk solidaritas hak asasi manusia untuk Nduga yang disingkat dengan SoHAM Nduga. Solidaritas ini melakukan audiens ke pihak DPR Papua, MRP untuk memberikan tekanan kepada pihak militer agar tidak berlebihan melakukan penyisiran di wilayah Alguru, Nduga. Di dalam siaran persnya yang dikeluarkan pada 13 Juli 2018, SoHAM Nduga menyatakan beberapa sikapnya: [57]

---

55 *Ibid*.,

56 Bdk.https://tabloidjubi.com/artikel-17688-klasis-kingmi-keneyam-tiga-orang-meninggal-paska-penyisiran-aparat-keamanan.html, diakses pada Senin, 16 Juli 2018.

57 Siaran persnya dapat diakses di http://fransiskanpapua.org/wp-content/uploads/2018/07/SIARAN-PERS-SOHAM-NDUGA.pdf

1. Mendesak Aparat Polisi dan TNI menghentikan operasi ke Kampung Alguru, Kabupaten Nduga;
2. Mendesak Pemerintah Provinsi Papua, Kabupaten Nduga, TNI dan Polri untuk menjamin keamanan dan keselamatan warga Nduga tanpa terkecuali;
3. Mendesak dibuka akses dan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi Pekerja HAM, jurnalis dan medis;
4. Mendesak Komnas HAM untuk segera melakukan investigasi dan langkah-langkah selanjutnya terkait peristiwa penyerangan tersebut.
5. Mendesak Pemerintah Pusat dan Provinsi Papua bertindak proaktif dalam penyelesaian konflik Nduga;
6. Mendesak segera dibentuknya Tim Pencari Fakta Gabungan (TPFG) untuk mengumpulkan bukti dan fakta, proses dan dampak dari operasi gabungan tanggal 11 Juli 2018.
7. Kapolda Papua harus menjelaskan secara konprehensif dan transparan operasi penegakan hukum di Nduga kepada publik.

Selain SoHAM, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia (FRI) untuk West Papua yang berada di Yogyakarta menggelar aksi demo damai.[58] Di dalam aksi ini massa menyampaikan beberapa tuntutan:

1. Tarik militer organik maupun non organik dari Nduga dan seluruh Tanah Papua.
2. Buka akses jurnalis lokal maupun asing untuk melakukan peliputan di Tanah Papua.
3. Menuntut Komnas HAM agar segera menyelesaikan kasus represif militer di Nduga.
4. Hak menentukan nasib sendiri adalah solusi terbaik bagi masyarakat di Tanah Papua.

58 Aksi demo damai dapat diakses di link youtube https://www.youtube.com/watch?v=-JiErx-7gprs

2. Peristiwa di Yigi

a. Kejadian Awal

Setelah peristiwa di Alguru, Tanah Ndugama kembali menjadi sorotan. Pada 1 Desember 2018, seperti biasa hampir seluruh masyarakat asli Papua merayakan hari kemerdekaan Bangsa Papua, termasuk penduduk yang tinggal di Tanah Ndugama. Namun, perayaan dan ibadah itu diwarnai 'insiden' seorang yang diduga anggota TNI memotret warga saat beribadah.

Menurut Ketua Sinode Gereja Kemah Injili Papua, Pendeta Benny Giyai, yang menerima laporan dari jemaatnya yang turut ibadah, warga memprotes tindakan seseorang yang mengambil gambar tersebut. Kehadiran satu orang yang diduga anggota TNI itu menyebabkan ketidaknyamanan dan ketakutan. Maka, masyarakat meminta agar foto itu dihapus tetapi 'orang' yang diduga anggota TNI tersebut meninggalkan tempat ibadah menuju ke Pos TNI.

Satu hari kemudian, 2 Desember 2018, warga kembali meminta orang tersebut menghapus foto-fotonya. Dan saat itulah terjadi aksi tembak menembak di dekat pos tentara yang mengakibatkan jatuhnya korban.[59]

Informasi yang sama juga disampaikan oleh Tim Relawan dan Solidaritas untuk Nduga. Menurut laporan Tim Relawan dan Solidaritas untuk Nduga, dalam kronologi, diungkapkan bahwa pada pertengahan November 2018, Egianus Kogeya (TPN PB) mengirim surat ke para pekerja jalan Trans Papua. Surat ini diantar oleh seorang kurir kepada Joni Arung. Ia seorang kontraktor yang mengerjakan proyek jalan Trans Papua di wilayah Nduga. Namun kurir itu tidak bertemu dengan Joni Arung, melainkan bertemu dengan salah satu anak buahnya. Ada dua surat yang hendak diberikan kepada Joni Arung. Surat pertama ditujukan

59 Bdk.https://tabloidjubi.com/artikel-21679-gereja--insiden-nduga-berawal-dari-aksi-protes-warga.html, diakses pada Senin, 7 Desember 2018.

kepada Presiden Joko Widodo dan surat kedua ditujukan kepada para pekerja. Isi surat yang ditujukan untuk para pekerja ini tidak diberitahukan oleh Joni Arung. Surat ini berisi himbauan agar para pekerja keluar dari wilayah itu sebelum 1 Desember 2018, karena TPN PB ingin merayakan hari Kemerdekaan Bangsa Papua tanpa diganggu oleh aktivitas pekerjaan tersebut.[60]

Ketika TPN PB pimpinan Egianus Kogeya melakukan peringatan hari Kemerdekaan Bangsa Papua pada 1 Desember 2018 di markasnya, Joni Arung mengirim seorang kurir (utusan) untuk memotret kegiatan tersebut. Usai upacara pada pukul 10.00 waktu setempat, Egianus Kogeya dan teman-temannya mengantarkan persembahan ke Gereja Jemaat Wiriklak. Pada perayaan di Gereja tersebut, hadir juga Joni Arung dan beberapa pekerja PT Istaka Karya. Joni Arung meminta izin kepada pihak Gereja untuk mengambil gambar (memotret). Namun para hamba Tuhan (Pendeta) melarangnya karena ada pihak TPN PB yang hadir dalam perayaan tersebut. Larangan itu dilanggar. Lalu, seorang anak buah (kurir) TPN PB memberitahu kepada Egianus bahwa Joni Arung juga hadir dan memotret perayaan itu.

Mendengar informasi tersebut, Egianus Kogeya marah dan hendak menembak Joni Arung. Pihak TPN PB meminta Joni Arung untuk menghapus foto-foto tersebut. Karena tidak diindahkan, akhirnya handphone milik Joni Arung disita. Melihat situasi itu, Joni Arung langsung lari masuk dalam Gereja untuk meminta perlindungan dari para pendeta dan warga jemaat terutama ibu-ibu. Sedangkan teman-teman Joni Arung lainnya ditangkap oleh TPN PB.

Kemudian anggota TPN PB membuka handphone milik Joni yang disita untuk melihat foto-foto dan SMS (short message service) atau pesan pendek yang ada. Egianus membaca beberapa

60 Bdk. Laporan dari Tim Relawan dan Solidaritas untuk Nduga. Laporan ini sudah disampaikan pada media di Jakarta dan Jayapura pada Kamis, 18 Juli 2019.

pesan pendek dari Joni Arung ke Kodim Wamena dan Pangdam XVII Cenderawasih. Egianus meminta Joni Arung untuk menjelaskan isi SMS itu. Namun, ia mengabaikannya, sehingga Egianus Kogeya memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap para pekerja PT. Istaka Karya di Kamp Kerja.

Sementara itu, karena Joni Arung berada di dalam gereja dan dilindungi para hamba Tuhan, Egianus berkomunikasi dengan Joni Arung melalui alat komunikasi HT (handy talky). Egianus meminta Joni Arung untuk bertemu dan menjelaskan alasan mengapa tidak meninggalkan Yigi serta berkomunikasi dengan Pangdam dan Dandim. Mendengar ancaman tersebut Joni Arung menawarkan akan memberikan senjata dan amunisi serta sejumlah uang kepada TPN PB. Namun tawaran ini tidak dihiraukan oleh Egianus Kogeya.

Pada 2 Desember 2018, kelompok Egianus dkk membawa para sandera (pekerja) sebanyak 24 orang dari Yigi ke Gunung Kabo. Egianus masih meminta kesediaan Joni Arung untuk bertemu dan menjelaskan alasan mengabaikan surat pemberitahuan yang ia kirim pada pertengahan November 2018, namun Joni tak juga datang. Maka, ia bersama kelompoknya mengeksekusi para pekerja itu sekitar pukul 13.00-14.00 WIT.

Menurut keterangan TPBN PB, para pekerja itu digiring ke Gunung Kabo dan memeriksa identitas para pekerja satu per satu. "Para pekerja yang dibunuh tersebut diduga adalah anggota TNI dari Denzipur yang mengerjakan jembatan sedangkan beberapa orang yang dibebaskan adalah mereka yang identitasnya adalah warga sipil, karena kami sudah ketahui bahwa yang mengerjakan Jembatan dan jalan di sepanjang jalan Trans Wamena – Mumugu Kabupaten Nduga dan pada umumnya di Papua adalah TNI." Demikian, pernyataan juru bicara TPN PB Sabby Sambom. Sebanyak 5 pekerja dari kalangan sipil atau warga biasa dilepaskan. Tim Relawan ingin memastikan identitas para pekerja dan korban itu, tetapi tak mendapatkan barang bukti identitas tersebut.

Korban penembakan itu adalah para pekerja PT Istaka Karya yang mengerjakan proyek jalan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga. Menurut pengakuan Wakil Ketua DPRD Nduga Alimin Gwijangge, ada 24 pekerja dikabarkan tewas dan dua orang melarikan diri.[61] Pelaku penembakan adalah TPN PB yang dipimpin Egianus Kogoya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Juru Bicara OPM Sebby Sambom bahwa pelaku penembakan adalah TPN PB.

Informasi lain terkait awal peristiwa penembakan, pada Sabtu, 1 Desember 2018, dua mobil menuju Camp Distrik Yigi, masing-masing membawa 15 pekerja dari PT Istaka Karya.

Pada Minggu, 2 Desember 2018, satu mobil kembali ke Wamena, sementara satu mobil lagi yang membawa 15 pekerja belum kembali, maka pada Senin, 3 Desember 2018, personil gabungan Polri dan TNI yang dipimpin oleh Kabag Ops Polres Jayawijaya AKP R.L Tahapary bergerak dari Wamena ke Yigi. Ketika tiba di Kilometer 46, tim ini bertemu dengan 1 mobil dari arah Distrik Mbua dan menyampaikan bahwa jalan diblokir oleh kelompok bersenjata. Berdasarkan informasi tersebut, pihak Polda Papua mengirimkan pasukan gabungan TNI-Polri, sekitar 150 personil, melalui jalur darat dari Wamena ke Yigi.[62] Sedangkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bahwa ada 154 tentara dan polisi yang dikirim ke Papua untuk mengusut kejadian di Nduga.[63]

Kemudian mengenai jumlah korban, sempat beredar informasi dan diberitakan berbeda-beda. Ada yang mengatakan 24 orang (informasi dari Wakil DPRD Nduga), 19 orang (15 diantaranya meninggal dunia, informasi dari Polda Papua), 17 orang (informasi dari Kodam Cenderawasih), 31 orang (Media Jakarta).[64]

---

61 Bdk.http://suarapapua.com/2018/12/04/24-pekerja-jembatan-diberitakan-tewas-dibunuh-di-nduga/, diakses pada Kamis, 6 Desember 2018.

62 *Ibid*.,

63 Bdk. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46510807, diakses pada Rabu, 12 Desember 2018.

64 Bdk. https://*tirto.id*/simpang-siur-puluhan-pekerja-tewas-di-nduga-papua-daVo, diakses pada Rabu, 5 Desember 2018 & https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46510807, diakses pada Rabu, 12 Desember 2018.

Ini adalah nama-nama korban para pekerja yang dirilis oleh Kodam XVII Cenderawasih:[65]

No	Nama Korban	Status	Asal
1	Mathinus Sampe (25)	Selamat	Toraja
2	Ayub	Selamat	Toraja
3	Jeprianto (25)	Selamat	Toraja
4	Jimmy Aritonang	Selamat	Sumatera Utara
5	Jonny Arung (45)	Selamat	Sulawesi Selatan
6	Mathius Palinggih (53)	Selamat	Toraja
7	Tarkih	Selamat	Papua
8	Efrendi Hutagaol (27)	Proses pencarian	Sumetara Utara
9	Rikki Cardo Simanjuntak	Proses pencarian	Sumetara Utara
10	Anugerah (17)	Proses pencarian	Toraja
11	Alipanus/Nano (27)	Proses pencarian	Toraja
12	Agustinus T (35)	Proses pencarian	Toraja
13	Dino Kondo	Proses pencarian	Toraja
14	Carly Zatrino/Calung (25)	Proses pencarian	Toraja
15	Daniel Karre/Dani	Proses pencarian	Toraja
16	Markus Allo	Proses pencarian	Toraja
17	Aris Usi	Proses pencarian	Toraja
18	Yusran	Proses pencarian	Toraja
19	Yousafat	Proses pencarian	Toraja
20	Petrus Ramli	Proses pencarian	Toraja
21	Simon Tandi	Proses pencarian	Kalimantan Timur
22	Samuel Pakiding	Proses pencarian	Kalimantan Timur
23	Muh. Agus (25)	Proses pencarian	Gowa
24	Fais Syahputra	Proses pencarian	Makasar
25	M. Ali Akbar	Proses pencarian	Makasar
26	Hardi Ali	Proses pencarian	Makasar
27	Emanuel Beli Naiekteas Bano	Proses pencarian	NTT
28	Jepri Simare-Mare	Proses pencarian	Tebing Tinggi

65 Bdk.https://regional.kompas.com/read/2018/12/06/14095591/ini-28-nama-korban-perkerja-istaka-karya-yang-bekerja-di-nduga, diakses pada Jumat, 7 Desember 2018.

Menurut Wakapendam XVII Cenderawasih Letkol Inf. Dax Sianturi terdapat 16 orang dipastikan meninggal dunia. Informasi lainnya adalah data yang dihimpun per 5 Desember 2018, ada 15 orang selamat dengan rincian, 7 karyawan PT Isaka Karya, 6 pekerja bangunan Puskesmas Mbua dan 2 orang pekerja Gedung SMP Mbua.[66]

b. Pengejaran Para Pelaku Penembakan

Seperti pada kejadian di Wilayah Alguru, bala bantuan untuk pengejaran terhadap kelompok pimpinan Egianus Kogoya digerakan oleh militer. Bantuan pertama dilakukan pada 3 Desember 2018 dengan mengirimkan pasukan berjumlah 150 personel gabungan TNI Polri. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan akan menurunkan pasukan nonorganik untuk membantu penanganan kasus Nduga.[67] Wiranto tak menyebutkan jumlah pasukan yang dikirim. Operasi militer terus berlangsung hampir sepanjang bulan Desember 2018, baik itu melalui pantauan udara maupun darat. Operasi militer tersebut berdampak bagi masyarakat sipil. Warga sipil menjadi korban, rumah atau honai penduduk dirusak dan dibakar. Bagi warga Nduga, operasi militer itu telah menumbuhkan kembali trauma dan ketakutan, sehingga mereka lari menyelamatkan diri dan mengungsi ke hutan-hutan.

Menurut data yang dihimpun Tim Relawan dan Solidaritas Kemanusiaan untuk Nduga, operasi militer di sejumlah daerah; di Mapenduma pada pada 17-19 Desember 2018 dan pada 5-6 Februari 2019; di Kagayam dilakukan pada 4-7 Februari 2019; di Mugi, Mam, dan Yal pada 7-8 Maret 2019.

---

66 Informasi ini disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Letkol Inf. Dax Sianturi, bdk. https://*tirto.id*/dua-warga-sipil-ditemukan-selamat-dari-penembakan-di-nduga-papua-da9b, diakses pada Jumat, 7 Desember 2018

67 Bdk.https://nasional.kompas.com/read/2018/12/11/17430451/pasukan-nonorganik-ikut-diterjunkan-dalam-operasi-di-nduga-papua, diakses pada Rabu, 13 Desember 2018.

Dalam operasi militer itu tersiar kabar bahwa pihak militer menggunakan bom atau melakukan serangan udara. Dalam pemberitaan media *www.bbc.com*, menyebutkan bahwa ada warga Nduga yang melihat militer menembak dari udara dan menggunakan bom. "Tentara menembak ayah saya. Saya kaget, setelah itu saya melompat. Lalu saya juga ditembaki tapi meleset. Hanya kena baju saya ini sampai sobek".[68]

Selain anak sekolah, ada warga lainnya yang sempat diwawancari oleh tim *BBC,* yang menjelaskan bahwa dia melihat sendiri ada bom yang dilepaskan oleh aparat keamanan. Informasi penembakan dari udara dan pengeboman ini ditanggapi oleh pihak militer dari pusat sampai daerah. "Tidak ada yang namanya bom. Tetapi kalau pelibatan TNI, iya. Karena mereka memang sudah merupakan kekuatan yang tidak setuju dengan negara".[69]

Menurut masyarakat, pintu helikopter dalam posisi terbuka, terdapat aparat menggunakan senjata dan menurunkan sejenis bom yang telah menghanguskan bangunan honai dan kebun mereka. Serpihan bom itu juga mengenai masyarakat, menyebabkan rambutnya rontok, ada bercak hitam pada leher, dada, badan panas dan kulit melepuh (bercak seperti terbakar).
Sejalan dengan pernyataan Menkopolhukam Wiranto, perwakilan Kodam Cenderawasih XVII Kol. Inf. Muhamad Aidi membantah segala tuduhan penembakan dari udara dan pengeboman di wilayah Yigi, Ndugama, Nduga.

---

68 Ungkapan seorang anak berusia 14 tahun yang selamat dari penembakan, bdk. https://www.bbc.com/indonesia/media-46605315?ocid=wsindonesia.chat-apps.in-app-msg.whatsapp.trial.link1_.auin, diakses pada Jumat, 21 Desember 2018.

69 Ungkapan yang disampaikan oleh Menkopolhukam Wiranto di Jakarta, bdk. https://www.bbc.com/indonesia/media-46605315?ocid=wsindonesia.chat-apps.in-app-msg.whatsapp.trial.link1_.auin, diakses pada Jumat, 21 Desember 2018.

c. Pasca Operasi Pengejaran

1. Situasi di Yigi

Operasi pengejaran pelaku penembakan, di wilayah Yigi, Nduga, tentunya berdampak pada segala aktivitas atau rutinitas masyarakat di Tanah Ndugama. Beberapa informasi yang diwartakan oleh beberapa media terkait pasca operasi pengejaran pelaku pun beragam. *Tabloid Jubi* memberitakan adanya korban, seperti yang disampaikan oleh seorang tokoh pemuda Papua Samuel Tabuni, "Dua di Mbua, dua di Yigi, Semuanya keluarga dekat saya. Mereka ditembak aparat keamanan saat aparat lakukan proses evakuasi. Satu di Mbua itu paman saya. Dia majelis gereja, namanya Yulianus Tabuni".[70]

Menurut Ketua Sinode Gereja KINGMI Papua Pdt. Benny Giyai terdapat ratusan warga Mbua, Yall dan Yigi yang mengungsi ke hutan sejak operasi militer pengejaran kelompok TPN PB. Menurut Pdt. Benny ada 5 klasis jemaat yang telah mengungsi ke hutan sejak evakuasi korban penembakan dilakukan.[71] Penduduk di tiga wilayah tersebut merupakan mayoritas jemaat dari Gereja KINGMI Papua.

"Masing-masing jemaat itu rata-rata diisi oleh 30-50 kepala keluarga. Jadi jumlah yang diketahui mengungsi dari empat klasis itu ada sekitar 780 kepala keluarga. Jika 1 keluarga dua orang saja, sudah lebih dari 1500 orang yang mengungsi".[72]

Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge, seperti yang diberitakan oleh *BBC Indonesia* mengungkapkan timnya menemukan dua jenazah di Distrik Mbua, satu jenazah di Distrik

---

70 Informasi yang disampaikan oleh Samuel Tabuni, bdk. https://tabloidjubi.com/artikel-21744-sejak-evakuasi-dilakukan-empat-warga-nduga-dilaporkan-tewas-lainnya-mengungsi-ke-hutan-.html, diakses pada Selasa, 11 Desember 2018.

71 Bdk. https://tabloidjubi.com/artikel-21770-gereja--ratusan--keluarga-di-nduga-mengungsi-ke-hutan.html, diakses pada Kamis, 11 Desember 2018.

72 *Ibid.*,

Dal dan satu jenazah di Mbulmu Yama. Menurut Wentius, jenazah yang ditemukan ini adalah warga sipil yang melarikan diri ke hutan. Selain itu ada tiga jenazah yang ditemukan membusuk dan hancur. Jenazah ini langsung dikuburkan.[73]

Berdasarkan laporan investigasi Tim Relawan dan Solidaritas untuk Nduga, terdapat puluhan ribu pengungsi akibat operasi aparat mengejar kelompok TPNPB pimpinan Egianus Kogeya. Rinciannya, 4.276 pengungsi di Distrik Mapenduma, 4.369 di Distrik Mugi, 5.056 di Distrik Jigi, 5.021 di Distrik Yal, dan 3.775 di Distrik Mbulmu Yalma. Pengungsi juga tersebar di Distrik Kagayem sebanyak 4.238 jiwa, Distrik Nirkuri sebanyak 2.982 jiwa, Distrik Inikgal sebanyak 4.001 jiwa, Distrik Mbua sebanyak 2.021 jiwa, dan Distrik Dal sebanyak 1.704 jiwa.[74]

Tim Relawan juga mengungkap pengungsi di Wamena tersebar di 26 rumah keluarga para pengungsi. Satu rumah atau honai dihuni 30-50 orang, bahkan ada satu honai yang dihuni seratusan orang. Tim Relawan dan Solidaritas Kemanusiaan untuk Nduga juga mencatat bahwa telah terjadi penangkapan dan pemukulan terhadap empat orang pengungsi yang disinyalir memiliki hubungan dengan kelompok TPN PB pimpinan Egianus Kogeya. Tim juga menemukan korban masyarakat sipil yang meninggal, di antaranya ada dua anak sekolah yang ditembak di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, dan beberapa warga sipil yang ditembak juga menderita hingga meninggal dunia.

Sejumlah warga juga menderita luka-luka di sekujur tubuh, yang diduga karena terkena dampak penggunaan bom yang dilepas atau ditembakan dari helikopter saat operasi militer berlangsung.[75] Lalu, ada pula masyarakat yang disebutkan hilang, termasuk

---

73 Bdk. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46625432, diakses Jumat, 21 Desember 2018.

74 Bdk. Laporan dari Tim Relawan dan Solidaritas untuk Nduga. Laporan ini sudah disampaikan pada media di Jakarta dan Jayapura pada Kamis, 18 Juli 2019.

75 Mengenai indikasi penggunaan bom oleh pihak aparat dan dampak yang ditimbulkan, perlu ada penyelidikan khusus terkait hal ini.

Pendeta Geyimin Nirigi, yang diduga telah terbunuh oleh aparat.

Konflik juga menyebabkan sejumlah ibu melahirkan ketika berada di pengungsian di hutan. Mereka sulit mendapatkan pertolongan medis. Kondisi ini menunjukan bahwa kaum perempuan, terutama ibu hamil, melahirkan dan menyusui, anak-anak dan warga lanjut usia (lansia) merupakan kelompok yang paling rentan dan paling menderita akibat konflik yang terjadi. Mereka juga terpaksa harus meninggalkan rumah dan kampung halaman mereka lalu mengungsi ke dalam hutan dan bersembunyi di gua-gua.

Operasi militer juga telah merusak dan memporak-porandakan sejumlah fasilitas publik seperti sekolah, rumah ibadah dan puskesmas pembantu (pustu), termasuk rumah-rumah warga. Anak-anak tak bisa sekolah, kegiatan belajar terhenti karena gangguan keamanan. Ini menambah daftar panjang jumlah anak putus sekolah.

Berdasarkan catatan di lapangan, anak-anak yang telah mengungsi di Wamena berjumlah sekitar 637 anak. Jumlah ini belum termasuk anak-anak yang mengungsi di daerah lain seperti Yahukimo, Lany Jaya, Timika dan Asmat. Anak-anak itu merupakan pelajar dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Di antara mereka mengalami kesulitan belajar, bahkan di sebagian anak-anak sedang mengikuti ujian nasional. Selain para pelajar, juga terdapat sekitar 81 orang guru yang turut mengungsi.

Para guru tersebut melakukan proses belajar di sekolah-sekolah darurat yang dibangun para relawan kemanusiaan. Konflik ini selain menyebabkan gelombang pengungsi dan masalah baru bagi persoalan kemanusiaan, Tim Relawan dan Solidaritas Kemanusiaan untuk Nduga juga menghimpun data korban meninggal dunia. Hingga laporan ini ditulis, Tim tersebut telah mencatat sebanyak 184 orang meninggal dunia karena konflik tersebut.

2. Dukungan untuk Perdamaian di Yigi

Peristiwa duka yang menimpa masyarakat di Tanah Ndugama mengundang banyak pihak untuk bersimpati. Dukungan ini datang baik dari dalam Papua, nasional maupun internasional. Dukungan ini dilakukan oleh kelompok solidaritas dan mereka yang menghendaki adanya perdamaian.

Dalam keterangan resminya yang disiarkan melalui situs ulmwp.org, Ketua ULMWP Benny Wenda, meminta Pemerintah Indonesia segera menghentikan aktivitas di Tanah Ndugama, Papua. Menurut Benny, satu-satunya cara menghentikan konflik itu adalah adanya pengakuan internasional agar orang Papua diizinkan secara bebas dan tanpa tekanan memilih kedaulatan politiknya. Perjuangan yang mereka lakukan adalah bukanlah kriminal tetapi membela diri dari ancaman luar.[76] Selain itu mendesak PBB untuk mengirim tim pencari kebenaran terhadap kejahatan HAM di Papua.

Sementara itu Gubernur Papua Lukas Enembe akan membentuk tim investigasi menyelidiki peristiwa di Yigi. Menurut Lukas, Pemerintah Indonesia segera mencari solusi yang tepat untuk menjawab tuntutan kemerdekaan. "Pada dasarnya mereka (kelompok bersenjata) itu minta merdeka, tidak butuh pembangunan itu sudah dari dulu".[77]

Di tingkat kabupaten, pihak Pemkab Nduga bersama MRP, Gereja, LSM, mahasiswa, Polisi dan TNI membentuk tim untuk membantu melakukan evakuasi masyarakat. Salah satu anggota DPR Papua Laurensius Kadepa menilai bahwa operasi militer yang dilakukan di Nduga terlalu berlebihan. Hal senada juga disampaikan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia

---

76 Bdk.https://*tirto.id*/pemerintah-diminta-hentikan-aktivitas-militer-di-papua-barat-dbcC?utm_source=Tirtoid&utm_medium=, diakses pada Jumat 21 Desember 2018

77 Ungkapan yang disampaikan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, bdk. https://tabloidjubi.com/artikel-22008-gubernur-dprp-mrp-dan-gereja-akan-bentuk-tim-investigasi-trage-di-nduga.html, diakses pada Selasa 18 Desember 2018.

TNI-AD

Pasukan militer di Bandara Keneyam Nduga.
Foto: Dok. Tim Solidariutas Kemanusiaan untuk Nduga.

yang menilai bahwa pendekatan kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan persoalan di Papua, dan justru akan menciptakan luka-luka baru yang pada gilirannya akan menciptakan lingkaran kekerasan.[78]

Aksi solidaritas duka yang mendalam bagi rakyat di Tanah Ndugama terus bermunculan. Pada 5 Desember 2018, di Taman Imbi, Kota Jayapura, Perwakilan Komnas HAM Papua dan puluhan warga menggelar aksi bakar lilin untuk korban yang meninggal dalam kasus penembakan di Yigi, Nduga.[79] Di Sleman, Yogyakarta, mahasiswa juga mengadakan aksi solidaritas untuk korban penembakan dengan menyalakan lilin pada 10 Desember 2018.

Aksi solidaritas juga dilakukan oleh sejumlah anak muda secara spontan pada 22 Desember 2018, pukul 19.33 Waktu Papua. Peserta aksi membawa spanduk bertuliskan "Save Nduga, Papua Kehilangan Damai Natal". Aksi damai ini dibubarkan oleh pihak Kepolisian Sektor Abepura.

Aksi solidaritas menyalakan lilin ini juga dilakukan di Jakarta. Sekitar 50 orang turut serta dalam aksi solidaritas #Save Nduga dengan menyalakan lilin dan berdoa di Taman Aspirasi seberang Istana Negara, Jakarta pada 26 Desember 2018.[80]

Aksi-aksi solidaritas, baik di Papua maupun di Jakarta menyuarakan penghentian konflik dan menghendaki perdamaian di Tanah Papua, khususnya di Tanah Ndugama, supaya tidak ada korban nyawa lagi. Walaupun demikian, kedua aksi berikutnya (Lingkaran Abepura dan Taman Aspirasi) cukup berbeda, selain mengenang korban penembakan, massa juga bersolidaritas

---

78 Bdk.https://tabloidjubi.com/artikel-21770-gereja--ratusan--keluarga-di-nduga-mengungsi-ke-hutan.html, diakses pada Kamis, 11 Desember 2018.

79 Video aksi ini bisa diakses pada https://www.youtube.com/watch?v=Ys_SEid8xzs, https://www.youtube.com/watch?v=ZlIldtvZIpE & https://www.youtube.com/watch?v=tc94cMO-JRyU

80 Bdk. http://www.satuharapan.com/read-detail/read/solidaritas-savenduga-ibadah-kasih-di-depan-istana-negara, diakses pada Jumat, 28 Desember 2018.

terhadap rakyat Nduga yang ada di hutan Ndugama, yang lari ketakutan dan trauma karena operasi militer.

"Kami ingin menghayati dan merasakan seperti rakyat sipil yang berada di hutan sana, mereka bertahan hidup, takut dibunuh di tanahnya sendiri. Mereka menahan lapar, bahkan banyak yang tidak dapat ditemui keluarganya sendiri karena mereka semua mendapat tekanan oleh aparat keamanan".[81]

Selain menyuarakan dengan turun ke jalan, aksi solidaritas juga dilakukan dengan mengumpulkan bantuan berupa material bagi para pengungsi, yang dilakukan hingga Januari 2019. Bantuan yang telah terhimpun, disalurkan kepada para pengungsi Nduga yang berhasil keluar dari perkampungannya ke Wamena. Sementara pengungsi yang masih di Yigi, belum bisa menerima bantuan, karena Tim Solidaritas kesulitan menembus akses ke Yigi.

d. Jejak Operasi Militer dan Konflik Bersenjata di Nduga

Tanah Ndugama bukan sekali ini saja menjadi area perang dan konflik bersenjata militer Indonesia dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Dalam sejarah konflik di Nduga, telah terjadi beberapa kali operasi militer yang dilakukan tentara Indonesia terhadap kekuatan TPN PB.

Kali pertama operasi militer dilakukan pada 1977-1978 di Jayawijaya. Peristiwa kedua penyerangan oleh militer Indonesia pada 1981 di Wouma, Wamena. Ketiga, operasi pembebasan penyanderaan tim peneliti Lorens pada tahun 1996. Keempat, operasi militer pasca peristiwa pembobolan senjata di gudang senjata milik Kodim 1702 Jayawijaya pada tahun 2003, dan kelima

---

81 Ungkapan yang disampaikan oleh Darson Lokbere, salah satu massa yang bersolidaritas di Taman Aspirasi, Jakarta. Bdk. http://www.satuharapan.com/read-detail/read/solidaritas-savenduga-ibadah-kasih-di-depan-istana-negara, diakses pada Jumat, 28 Desember 2018 atau https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181226204650-32-356595/solidaritas-papua-jokowi-beri-kado-natal-kekerasan-nduga, diakses pada Jumat, 28 Desember 2018.

pada Juli 2018 di Alguru, dan terakhir adalah operasi militer pada Desember 2018 di Yigi.

Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun oleh Tim Relawan dan Solidaritas untuk Nduga ada beberapa kejadian atau konflik pada 2017-2019.

- **Pembunuhan operator alat berat di Distrik Mugi**

  Pada 12 Desember 2017, TPN PB Kodap III Wilayah Ndugama menembak mati seorang operator alat berat yang sedang mengerjakan proyek pembangunan jalan di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, bernama Yovikco Sondak dan juga melukai seorang anggota TNI bernama Prada Didimus Abindodifu.[82]

- **Penembakan warga sipil di Distrik Mugi**

  Pada 22 Desember 2017 aparat gabungan TNI-Polri diduga melakukan penyisiran di Bandara Daragma, Distrik Mugi, Kabupaten Nduga. Penembakan diduga dilakukan oleh aparat militer dari atas pesawat komersil ke arah masyarakat yang berada di area bandara. Lima warga sipil terkena tembakan.[83] Selain penembakan warga sipil, aparat militer juga diduga melakukan penganiayaan. Tercatat empat orang mengalami penganiayaaan: seorang pelajar, dua orang dewasa, dan seorang pemuda. Selain itu perusakan dua rumah warga sipil di Nduga yang diduga dilakukan oleh aparat (TNI-Polri). Lalu sejumlah rumah menjadi sasaran penembakan oleh aparat keamanan. Selain itu, ada tiga anak berusia sekolah yang harus melaporkan diri di setiap pos militer: Pos Mbua, Pos Yigi, Pos Yal dan Pos Mugi.

82 Lihat,https://amp.kompas.com/regional/read/2017/12/13/14261171/seorang-operator-jalan-trans-papua-tewas-ditembak-kelompok-bersenjata

83 Lihat https://nasional.tempo.co/amp/1044112/tni-bantah-lakukan-penembakan-terhadap-warga-di-Nduga-papua.

- **Penganiayaan warga sipil di Pos TNI Keneyam**

  Penyiksaan dan kekerasan yang diduga dilakukan oleh anggota TNI terhadap seorang warga masyarakat bernama Anekanus Kamarigi (20 tahun) hingga meninggal dunia di Pos TNI Keneyam, pada 1 Januari 2018 malam.[84]

- **Penyiksaan beberapa warga sipil di Pos TNI di Napua, Wamena**

  Pada 3 Januari 2018, seorang warga bernama Wagianus Murib diduga dianiaya oleh anggota aparat keamanan di Pos TNI Napua. Alasan penganiayaan tersebut adalah diduga ditemukan pistol dan ratusan amunisi di tas Wagianus Murib.

- **Penembakan Jelang Pemilihan Gubenur Provinsi Papua di Keneyam**

  Pada 22 Juni 2018, TPN PB menembak pesawat Dimonim Air dari Timika yang hendak mendarat di Alguru, Distrik Keneyam, Kabupaten Nduga.[85] Selanjutnya, pada 25 Juni 2018, TPN PB melakukan penembakan lagi terhadap pesawat Twin Oter milik Trigana Air yang mengakibatkan pilot terkena serpihan peluru. Kedua pesawat menjadi sasaran penembakan karena diduga mengangkut aparat keamanan dan sejumlah logistik persiapan dan pengamanan Pemilihan Gubernur Provinsi Papua. Penembakan ketiga di Bandara Keneyam pada 27 Juni 2018, Komandan Operasi Lapangan TPNPB Kodap III Ndugama pimpinan Egianus Kogeya (EK) mengakui aksi ini murni dilakukan TPN PB untuk menolak Pilkada.[86]

---

84 Lihat https://haipapua.com/kodam-cenderawasih-menyesalkan-aksi-penyerangan-pos-tni-di-kabupaten-Nduga/ dan https://tpnpbnews.wordpress.com/2018/01/04/tpnpb-Ndugama-rampasan-senjata-penganiyaan-dan-penangkapan-periode-desember-2017-januari-2018/amp/.

85 Bdk.https://www.liputan6.com/news/read/3573451/polri-rentetan-penembakan-di-papua-dilakukan-kelompok-yang-sama.

86 Bdk.https://www.beritasatu.com/politik/498464/pilgub-papua-dinodai-penembakan-di-Nduga.

Kemudian Kelompok EK melakukan penembakan pada 4 Juli 2018 di sekitar kali Keneyam, pada saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat pleno penghitungan suara pemilihan gubernur. Pada 6 Juli 2018 kembali terjadi penembakan terhadap para personel Brimob yang melakukan pengamanan di Bandara Keneyam. Dalam peristiwa ini dilaporkan seorang personil Brimob dari Resimen 1 Pelopor Brimob, Bharada Rafindo Refli Sagala, tertembak.

Pada 11 Juli 2018 aparat gabungan gabungan Polri dan TNI yang berjumlah ratusan, melakukan operasi militer penyerangan dan pengejaran terhadap TPN PB di Kampung Alguru. Operasi itu dilakukan melalui darat dan udara dengan menggunakan helikopter, "Perang Open ship dan Gempuran." Penembakan dan pengejaran kepada TPN PB di Keneyam berdampak bagi ratusan warga yang mengalami kepanikan dan trauma.[87]

Pada 28 Januari 2019, seorang prajurit TNI dari satuan Yonif Raider Kostrad 751/VJS, Praka Nasrudin gugur akibat tertembak anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) – yang tak lain sebutan untuk TPN PB, saat korban mengamankan Bandara Mapenduma, Kabupaten Nduga, Papua. Satu prajurit TNI lainnya, Praka Muhammad Rifai Pagesa mengalami luka tembak di tangan saat kontak senjata.[88]

Pada 31 Januari 2019, kontak senjata antara pasukan Raider dari Yonif (Batalyon infantri) 751 dengan TPNPB pimpinan EK di Mapenduma.[89]

Pada akhir Februari 2019, Jubir TPNPB Sebby Sambom melalui media sosial mengatakan telah terjadi kontak senjata

87 Lihathttps://m.kbr.id/nasional/072018/baku_tembak_di_Nduga__200an_warga_kampung_alguru_mengungsi/96566.html.

88 Bdk.https://regional.kompas.com/read/2019/01/28/17432241/rombongan-bupati-Nduga-diserang-anggota-kkb-1-prajurit-tni-gugur.

89 Bdk.https://kabar24.bisnis.com/read/20190131/15/884348/pasukan-raider-pukul-mundur-kkb-pimpinan-egianus-kogoya-di-Nduga.

mulai tengah malam pada 26 – 27 Februari 2019 di Distrik Yal, Kabupaten Nduga, antara TPNPB dengan militer dan polisi Indonesia. Namun berita tersebut dibantah oleh pihak Kodam XVII Cenderawasih dengan menerangkan bahwa fakta yang sebenarnya adalah bahwa sekitar pukul 14.40 WIT, 26 Februari 2019 bertempat di Kampung Yal, Distrik Yal, Kabupaten Nduga, gerombolan separatis pimpinan EK telah melakukan pembakaran 1 unit eskavator milik PT Istaka Karya yang sudah tidak beroperasi lagi (rusak).[90]

Pada awal Maret 2019 terjadi saling tembak antara aparat TNI dengan TPNPB. Kontak senjata itu terjadi ketika TNI akan menggeser daerah pengamanan dan pembangunan infrastruktur Trans Papua Wamena-Mumugu pada Kamis pagi, 7 Maret 2019. Pihak TNI berusaha melakukan perlawanan sehingga berhasil menguasai keadaan dan memukul mundur kelompok bersenjata hingga menghilang ke dalam hutan belantara.[91]

Kontak tembak kembali terjadi antara pasukan Brimob TPN PB di Bandara Mugi, Kabupaten Nduga pada 20 Maret 2019.[92] Satu anggota Brimob dari Satgas Belukar gugur, atas nama Bharada Aldi terkena tembakan di bahu kanan. Sementara itu, dua anggota lainnya mengalami luka-luka, masing-masing Ipda Arif Rahman yang mengalami luka tembak di bahu kiri hingga menembus punggung. Kemudian, Bharada Rapi yang mengalami dua luka tembak di dada kanan dan bawah ketiak. Kontak tembak antara aparat TNI dengan KKB pimpinan EK

90 Bdk.http://aceh.tribunnews.com/2019/02/24/opm-akan-tembak-warga-non-papua-yang-tak-mau-tinggalkan-Nduga-ini-7-ultimatum-untuk-indonesiaudian wa bupati Nduga diculik, eit bupati tersebut jauh lebih memebsar daripada tuntutana mengenau penarikan pasukan TNI.

91 Bdk.https://nasional.kompas.com/read/2019/03/08/06223871/kontak-senjata-di-Nduga-tni-diserang-puluhan-anggota-kelompok-bersenjataudian wa bupati Nduga diculik, eit bupati tersebut jauh lebih memebsar daripada tuntutana mengenau penarikan pasukan TNI.

92 Bdk.https://www.inews.id/daerah/papua/baku-tembak-di-Nduga-papua-1-anggota-brimob-gugur-dan-2-luka-luka/491641

terjadi lagi di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga pada 15 April 2019. Dalam aksi tersebut, pihak Kodam XVII Cenderawasih mengklaim telah melumpuhkan satu anggota KKB.[93] Pihak TPNPB mengklaim menewaskan lima anggota TNI dalam peperangan yang terjadi selama dua hari, 23-24 April 2019.

Sementara itu kantor berita Antara melaporkan, dua anggota TNI mengalami luka tembak saat melakukan pengiriman logistik ke Distrik Nirkuri, Kabupaten Nduga pada Rabu, 24 April 2019. Salah satunya kru helikopter Bell 412 milik Penerbad bernama Serda DK. Berdasarkan informasi yang dihimpun Antara, penembakan itu terjadi sekitar pukul 11.10 WIT dan mencederai Prada MZ anggota Yonif Raider 321/GT.

Pada 4 Juli 2019, di Kampung Miri, Distrik Mugi, Kabupaten Nduga terjadi peristiwa penembakan yang dilakukan aparat gabungan TNI dan Polri terhadap empat orang ibu dan seorang anak perempuan berumur satu tahun lebih. Penembakan ini terjadi ketika para ibu ini pergi ke kebun Peyonggo, Kampung Muruldumu – daerah perbatasan antara Distrik Mugi, Nduga dan Kwijangge, Lany Jaya, untuk menggali ubi. Jenazah Ibu Kenmalet Gwijangge ditemukan pada 8 Juli 2019, lalu dimakamkan. Keempat ibu itu warga yang mengungsi dan bersembunyi di hutan selama operasi militer berlangsung.[94]

e. Akses Tertutup Bagi Jurnalis dan Tim Independen

Kabut informasi tentang peristiwa yang terjadi di Tanah Ndugama, Nduga, Papua menjadi salah satu bahan diskusi yang cukup mendalam. Salah satunya tertutupnya akses informasi ke lokasi telah membatasi para jurnalis dan tim independen

93 Bdk.https://regional.kompas.com/read/2019/04/16/10295171/tni-sebut-tewaskan-seorang-kkb-anak-buah-egianus-kogoya-dalam-baku-tembak-diudian wa bupati Nduga diculik, eit bupati tersebut jauh lebih memebsar daripada tuntutana mengenau penarikan pasukan TNI.

94 Laporan Tim Relawan dan Solidaritas Kemanusiaan untuk Nduga.

lain untuk mencari informasi dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, bahkan menyulitkan tim pekerja kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga pengungsi.

Bagi media, pembatasan akses berpengaruhi dalam menyajikan informasi dan fakta-fakta yang akurat. Hal ini menyebabkan kabut informasi menyelimuti wilayah Nduga. Salah satu kasus informasi yang tak akurat yang beredar di kalangan publik adalah soal foto helikopter dan hutan yang terbakar pada Juli 2018. Foto ini sempat mengagetkan kalangan publik.

Kasus beredarnya foto tersebut diteliti lebih dalam oleh media online *Tirto.id*. Dari hasil penelitian dan penelusuran *Tirto.id*, foto tersebut bukan merupakan sebuah foto istimewa. Foto tersebut juga bukan menjelaskan hutan Papua atau hutan di Nduga yang terbakar. Ada juga yang menyebutkan keterangan foto tersebut adalah kebakaran hutan di Gunung Lawu, bukan pula di hutan Kalimantan.[95]

Pada kejadian kedua di Tanah Ndugama, di Kampung Yigi, mengenai informasi awal tentang korban penembakan yang jumlahnya berbeda-beda. Ada yang menyebutkan 31 orang, 24 orang, 19 orang dan 17 orang. Siapa yang dapat mengklarifikasi dengan baik informasi jumlah korban ini? Masing-masing pihak berwenang mengeluarkan pernyataan yang berbeda-beda terkait situasi di lapangan.

Kita bisa lihat di awal kejadian Alguru, Bupati Nduga Yairus Gwijangge mengatakan bahwa ada penembakan dari udara. "Kami ada di Nduga. Tapi belum pernah diinformasikan bahwa akan ada penembakan dari atas. Mereka diam-diam menjalani. Tiga kali lakukan penembakan. Penembakannya boom boom boom, tiga kali, dengan posisi beda".[96]

---

95 Bdk. https://*tirto.id*/kabar-kabur-tentang-kejadian-di-nduga-papua-cN7c, diakses pada Senin 16 Juli 2018

96 Bdk.https://kbr.id/nasional/072018/baku_tembak_di_nduga__200an_warga_kampung_alguru_mengungsi/96566.html, diakses pada Senin, 16 Juli 2018.

Setelah pernyataan bupati ini, beredar pula sebuah video dari bupati sendiri yang mengatakan bahwa di Nduga, Kota Kenyam, Alguru, situasinya aman dan terkendali.

Di sini kita tidak mempersoalkan apakah foto hutan yang terbakar pada peristiwa Alguru dan jumlah korban tetapi kita mempersoalkan kebenaran informasi dan fakta serta ruang yang cukup bagi jurnalis dan tim independen untuk melakukan investigasi dan mengeluarkan hasil temuannya.

Niat baik untuk menelusuri fakta yang terjadi di Tanah Ndugama, Nduga, ternyata belum sepenuhnya didukung oleh Negara Indonesia, dalam hal ini pihak militer. Bahkan hingga saat ini akses melalui jalan darat untuk membantu para pengungsi masih diisolasi oleh pihak keamanan. Tim Relawan dan Solidaritas Kemanusiaan untuk Nduga selalu berhati-hati karena harus melewati pemeriksaan yang ketat dari pihak militer.

Wartawan atau media dibatasi dan menghadapi kesulitan akses dalam meliput peristiwa tersebut di Nduga. Begitu pun media atau jurnalis asing yang tetap ditutup aksesnya untuk meliput secara langsung ke daerah konflik di Nduga, dan wilayah lain di Tanah Papua.

REKOMENDASI [97]

Pemerintah Pusat

1. Mendesak Presiden RI untuk segera menarik pasukan TNI dan Polri Non- Organik dari Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.
2. Mendesak Presiden RI dan DPR RI untuk mengevaluasi kebijakan infrastruktur Jalan Trans Papua.
3. Mengakui dan menangani keberadaan pengungsi atau IDP (*Internaly Displaced Persons*) akibat konflik Nduga, Papua.
4. Membuka akses dan memberikan jaminan keamanan bagi jurnalis, tim investigasi HAM dan pekerja kemanusiaan baik nasional maupun internasional ke Kabupaten Nduga, Papua.

Komisi Nasional HAM RI

1. Membentuk tim KPP HAM Ad Hoc dalam rangka melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM pasca kejadian 2 Desember 2018 di Nduga, Papua.

Pemerintah Provinsi Papua

1. Segera mengambil langkah konkret dan bekerja sama dengan Tim Relawan dan Solidaritas Kemanusiaan untuk Nduga dalam rangka menangani korban konflik Nduga, terutama para pengungsi di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lany Jaya, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mimika, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten dan Kota Jayapura.
2. Segera mengalokasikan dana pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan makanan, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan bagi para korban konflik Nduga.
3. Membangun kembali pemukiman warga yang rusak pasca konflik Nduga.

---

97 Rekomendasi ini merupakan rekomendasi yang dihasilkan Tim Relawan & Solidaritas Kemanusiaan untuk Nduga, Papua

Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua

1. Membentuk Pansus krisis kemanusiaan di Nduga.
2. Menetapkan Nduga sebagai Darurat Kemanusiaan.
3. Mengeluarkan regulasi (Perdasus) tentang perlindungan dan pengakuan masyarakat adat Nduga.
4. Memanggil Pangdam dan Kapolda Papua untuk menjelaskan situasi konflik di Nduga, Papua.

Lembaga Keagamaan

1. Mendesak Presiden RI untuk segera menarik pasukan organik dan nonorganik TNI Polri di Kabupaten Nduga.
2. Menyerukan untuk menghentikan konflik bersenjata di Kabupaten Nduga kepada TNI Polri dan TPN PB dan melakukan berbagai upaya untuk mencegah jatuhnya korban warga sipil di Nduga.
3. Mengirimkan misi kemanusiaan untuk menangani korban konflik Nduga.

Tokoh Adat Papua di Kabupaten Jayawijaya, Agats, Yahukimo, Lany Jaya dan Mimika

1. Memberikan bantuan dan akses kepada para korban konflik Nduga.

Seluruh Rakyat Papua

1. Bersolidaritas bagi krisis kemanusiaan di Kabupaten Nduga, Papua.

Bab 4

SENGKETA WULUWAGA: POTRET MILITERISASI DI TANAH PAPUA

Pada 2018 pergerakan militer di Tanah Papua terus meningkat. Salah satunya adalah pergerakan menghalau massa yang melakukan demonstrasi menyampaikan aspirasi dan pendapat di muka umum. Berbagai aksi damai oleh pemuda, mahasiswa, masyarakat, dihadapi dengan pengerahan aparat keamanan dari kepolisian dan tentara.

Selain kasus Alguru dan Yigi di Tanah Ndugama, Kabupaten Nduga, Papua, praktik militerisme kuat mengakar dan membesar melalui pembangunan markas-markas komando yang jumlahnya terus bertambah. Rencana pembangunan markas Brigade di Wuluwaga, Kimbim, distrik Asologaiman, Kabupaten Jaya Wijaya menjadi kasus yang muncul pada 2018.

Kasus di Wuluwaga menjadi catatan penting untuk memotret militerisasi di Tanah Papua pada 2018. Penguasaan lahan atau tanah ulayat menjadi contoh bagaimana proyek militer tidak diterima dan ditentang oleh penduduk. Bagaimana cara-cara militer menaklukan tanah ulayat untuk mendapatkan izin pembangunan markas-markas komando?

Tentang Wuluwaga

Wuluwaga sebuah daerah yang terletak di Distrik Asologaima, Kabupaten Jayawijaya. Luasnya sekitar 18.237 kilometer persegi, melingkupi 40 distrik atau kecamatan, dan 332 desa atau kampung.

Dalam kasus pembangunan markas komando militer, daerah Wuluwaga yang bermasalah terletak di dua distrik, yaitu Distrik Asologaima dan Distrik Silo Karno Doga, yang keduanya jumlah penduduknya mencapai sekitar 16.311 jiwa dari 18 kampung. Distrik Asologaima terdiri 10 kampung, dengan penduduk berjumlah 11.443 jiwa dari kedua wilayah distrik bermasalah. Sementara Distrik Silo Karno Doga terdiri 8 desa atau kampung, dengan jumlah penduduk sekitar 4.868 jiwa. Tanah Wuluwaga ini terletak tepatnya di Kampung Tikawo.

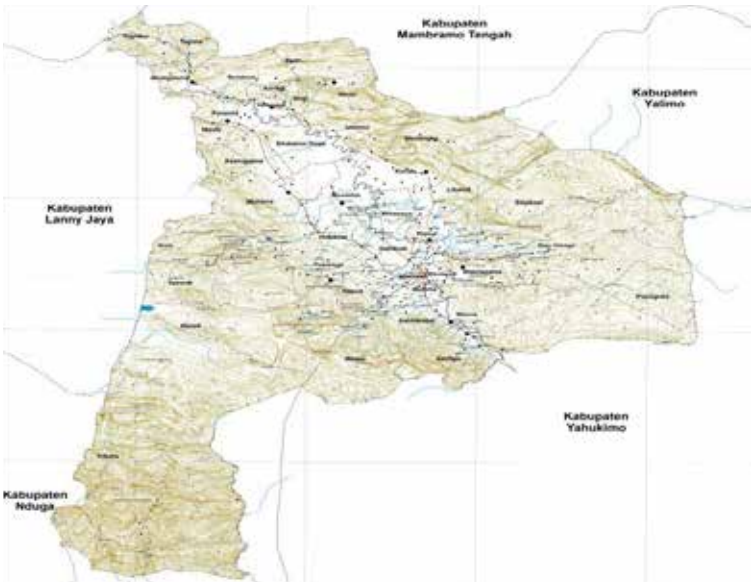

Wilayah Kabupaten Jayawijaya terbagi dalam beberapa wilayah adat atau aliansi. Daerah Wuluwaga ini termasuk dalam Aliansi Omarikma, yang terdiri dari beberapa klan atau marga, antara lain: Doga, Wantik, Hilapok, Kosy, Walela, Alua, Holago, masih ada beberapa marga suku lainnya. Tanah Wuluwaga yang akan dibangun Markas Brigade merupakan tanah keramat milik Omarikma. Bagi masyarakat setempat di tanah ini tidak boleh ada orang atau kelompok yang melakukan aktivitas, misalnya perkebunan dan pembangunan.

Menurut Tetua Adat Iluma Holago kepada Tim SKPKC Fransiskan Papua, tanah yang akan dibangun markas komando Brigade ini di dalamnya merupakan tanah sakral atau keramat. "Tanah yang diserahkan kepada TNI merupakan di dalamnya ada beberapa tempat keramat/sakral yang harus dijaga dan dilestarikan, maka siapapun tidak boleh melakukan segala aktivitas di atas tanah tersebut".[98]

98 Hasil wawancara Tim Investigasi dengan Tua Adat Bapak Iluma Holago.

Tanah sakral dan lahan yang akan dibangun markas militer, menjadi persoalan dan pergulatan bagi masyarakat adat di wilayah Wuluwaga. Pertanyaannya adalah mengapa muncul wacana pelepasan tanah Wuluwaga yang luasnya hingga 90 hektare kepada pihak TNI?

Negosiasi Militer Demi Tanah

Berita pengukuhan seorang pimpinan militer Pangdam XVII Cenderawasih Mayor Jendral TNI George Enaldus Supit sebagai kepala suku mengejutkan publik di Papua. Posisi kultural yang dihormati oleh masyarakat adat Papua itu menjadi kegelisahan masyarakat, bukan hanya posisi 'kepala suku' yang disematkan kepada sosok TNI, tetapi posisi itu juga diikuti oleh penguasaan tanah adat, yang jumlahnya tidak sedikit, sekitar 90 hektare.

Berdasarkan hasil investigasi, Tim SKPKC FP menemukan ada beberapa 'keanehan' yang terjadi pada perjalanan proses pengukuhan kepala suku dan usaha mendapatkan tanah 90 hektare tersebut. Dalam proses mendapatkan persetujuan masyarakat atas pengukuhan ini, TNI, melalui kepala suku Alex Doga dkk, menjanjikan berbagai hal kepada masyarakat pemilik hak ulayat, seperti: akan membangun gedung gereja, merekrut anak-anak dari wilayah tersebut menjadi anggota TNI, akan diberikan traktor untuk persawahan bekerja sama dengan transmigrasi yang didatangkan dari luar Papua (Pulau Jawa). Janji ini sepertinya meluluhkan beberapa anggota masyarakat di daerah Wuluwaga. Sekitar 20 orang masyarakat menandatangani surat persetujuan yang telah disiapkan.[99]

99 Menurut pengakuan Tua Adat Bapak Mulik Doga, yang masyarakat memahami bahwa fasilitas dijanjikan akan dibangunkan diatas tanah mereka. Masyarakat tidak mendapat penjelasan bahwa tanah itu diserahkan kepada TNI untuk bangun brigade. Setelah penyerahan 90 ha. tanah kepada TNI (26/09/2018) lalu mereka paham. Selanjutnya mereka protes". Lebih lengkap dapat membandingkan Laporan Investigasi "Pengukuhan, Penyerahan dan Penolakan 90 Hektar Tanah Kepada TNI" oleh Tim SKPKC Fransiskan Papua.

Selain menandatangani surat pernyataan, kelompok masyarakat ini juga membaca pernyataan yang juga disiapkan.[100] Bahkan ada pengakuan dari tua-tua adat, informasi tentang penyerahan lahan 90 hektare ke TNI itu diperoleh dari media yang mereka dengar dan baca.

"Saya mengingat anak cucu kehidupan masa depan. Kami sebagai masyarakat tidak tahu kalau ukuran tanah 90 hektar itu". Tetapi kami tanya ternyata gereja, kantor distrik, sekolah SD, SMP, dan SMA, Puskemas, dan beberapa rumah warga masuk di dalam. Sehingga ketika jika itu terjadi masuk, kami ini akan di kemanakan?"[101]

Penolakan rencana pemberian gelar kepala suku dan kegiatan tersebut sudah disampaikan oleh beberapa tua adat ketika terjadi pertemuan di Kodim 1702 Jayawijaya pada 7 September 2018. Mulik Doga yang juga adalah tua adat menyampaikan bahwa gelar kepala suku tidak diperoleh sembarangan orang, apalagi orang tersebut dari luar Papua. Aksi penolakan tersebut dilakukan lagi ketika anggota TNI dari Batalyon 756 Wimane Sili mempersiapkan tempat untuk acara pengukuhan tersebut.

Masyarakat setempat menolak agar tidak ada kegiatan di tanah Wuluwaga tersebut. Aksi ini dilakukan pada 21 September 2018 di Wuluwaga.[102] Aksi penolakan ini dilakukan beberapa kali di Tanah Wuluwaga, Kota Wamena, Kota Jayapura, Manokwari dan luar Papua (Manado dan Jawa).

---

100 Kami Kepala Suku Pegunungan Tengah Papua Menyatakan Sikap: 1). Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2). Siap Membela Negara Kesatuan Republik Indonesia, 3). Siap Mendukung dan Setia kepada Pangdam XVII/Cenderawasih Sebagai Kepala Suku Besar Pegunungan Tengah Papua, 4). Siap Mendukung Kebijakan Pangdam XVII/Cenderawasih untuk menjaga dan membangun wilayah adat Pegunungan Tengah Papua, 5). Siap mendorong anak cucu untuk menjadi prajurit TNI dan mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

101 Pernyataan yang disampaikan salah satu orang tua Markus Doga. Hasil wawancara tim investigasi pada 9 Oktober 2018 di Kimbim.

102 Kronologis penolakan yang dilakukan oleh masyarakat: Pada Sabtu, 22 September 2018, anggota TNI Pos Batalyon 756 Wimane Sili kembali ke Wuluwaga untuk melakukan persiapan namun masyarakat tetap menolak. Dan akhirnya masyarakat bersama anggota pergi ke Koramil 1702 Kimbim untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kepala suku Alex Doga dan Habo Holago sudah lebih awal ada di Koramil Kimbim. Di Koramil Bapak Mulik Doga sebagai pihak yang menolak beradu mulut dengan kelompok dari Bapak Alex Doga dan Habo Holago bahwa tidak melakukan persiapan untuk melakukan kegiatan pengukuhan.

Pengukuhan Kepala Suku Bertentangan dengan Tradisi Lembah Balim

Selama September 2018, terjadi beberapa kali pertemuan yang diinisiasi oleh Alex Doga dan kelompoknya dengan pihak TNI terkait dengan acara pengukuhan Kepala Suku Pegunungan Tengah kepada Mayor Jendral TNI George Enaldus Supit yang pada saat itu menjabat sebagai Pangdam XVII Cenderawasih.[103] Pada saat pertemuan tersebut, beberapa tua adat dari Lembah Balim, termasuk di daerah Wuluwaga menolak rencana pemberian gelar kepala suku ke Mayjend TNI George Enaldus Supit.

Penolakan itu disertai dengan alasan yang jelas. Sosok seorang kepala suku dan perannya di dalam tradisi Suku Hubula, Lembah Balim atau Papua pada umumnya memiliki arti dan peran yang sangat penting bagi suku tersebut. Karena itu, tidak sembarang orang di dalam suku tersebut memilih, menentukan dan mengukuhkan kepala suku. Di Suku Hubula disebut '*ap kaintek*' dan '*ap koktek*'. Istilah '*ap kaintek*' dapat diterjemahkan dengan '*orang besar berpengaruh*'.[104]

Dewasa ini istilah tersebut dikenal dengan istilah kepala suku. Dalam Suku Hubula, seorang kain selalu dikaitkan dengan peran dan posisinya sebagai seorang pria yang berpengaruh dalam kampung, konfederasi dan dalam aliansi. Prasyarat untuk menjadi 'ap kaintek' tidak berdasarkan warisan tetapi berdasarkan prestasi tiap individu dalam hidupnya. Ada dua prestasi yang dibutuhkan adalah keberaniannya dan kewibawaannya.[105] Selain itu seorang 'ap kaintek' adalah pria yang ada hati. Yang dimaksudkan adalah pria yang mempunyai hati atau suara hati mempertimbangkan

---

103 Bdk. Harian Cenderawasih Pos Kami, 27 September 2018, https://beritalima.com/pangdam-xvii-cenderawasi-dinobatkan-menjadi-kepala-suku-besar-papua/, atau http://tabloidjubi.com/m/artikel-19896-pangdam-dinobatkan-jadi-kepala-suku-besar-pegunungan-tengah-ini-alasan-para-kepala-suku.html, diakses pada Kamis 25 Oktober 2018.

104 Bdk. Agus A. Alua, dkk: "*Nilai-nilai Hidup Masyarakat Hubula di Lembah Balim Papua*", Biro Penelitian STFT Fajar Timur, Jayapura, Papua, 2006, hlm. 141.

105 *Ibid*., hlm. 148

dan memutuskan suatu rencana dan pelaksanaannya. Seorang pemimpin Hubula yang berhati baik akan lebih banyak mengutamakan kebutuhan dan kepentingan rakyatnya daripada kebutuhan diri dan keluarganya.[106]

Di zaman sekarang banyak terjadi pelanggaran dalam pengukuhan dan menentukan seorang 'ap kaintek'. Ada kunjungan seorang pejabat publik dengan mudah masyarakat mengangkat dan memilih mereka menjadi seorang kepala suku. Apakah pemilihan dan pengangkatan itu melalui sebuah proses yang benar? Apakah kehadiran pribadi tersebut sungguh-sungguh sudah dilihat dan dirasakan oleh masyarakat di suku tersebut?

Pengangkatan dan pengukuhan Pangdam XVII/ Cenderawasih Mayjen TNI George Elnadus Supit bisa dipertanyakan oleh masyarakat di Lembah Balim, khususnya bagi mereka yang mempunyai Wuluwaga. Apalagi, pengangkatan tersebut mengatasnamakan suku di Pegunungan Tengah Papua. Padahal setiap suku besar di Pegunungan Tengah Papua memiliki tradisi dan kebiasaan masing-masing untuk menentukan dan mengangkat pemimpinnya.

Mengenal Brigade[107]

Brigade merupakan satuan tempur di atas Batalyon, dan di bawah Divisi yang merupakan satuan dasar tempur terdiri dari unsur-unsur tempur (biasanya tiga Batalyon), unsur-unsur bantuan tempur dan unsur-unsur bantuan administrasi. Brigade dapat berdiri sendiri atau merupakan bagian dari komando yang lebih besar (Divisi). Jumlah kekuatan personelnya kurang lebih 3000 hingga 5000 personel.

---

106 *Ibid*., hlm. 154

107 Bdk. http://faculty.petra.ac.id/ido/artikel/istilah_militer.html, diakses pada 27 November 2018

Aksi hari HAM, 10 Desember 2018 oleh BEM STFT Fajar Timur. Foto: Dok. SKPKC FP

Karena merupakan satuan tempur yang relatif besar (gabungan tiga batalyon), maka ketika operasi pada tingkat brigade, kesatuan tersebut bisa bergerak sendiri, lengkap dengan unsur Bantuan Tempur (Banpur) dan Bantuan Administrasi (Banmin). Koordinasi Banpur dan Banmin berada di bawah unit tersendiri, yaitu Detasemen Markas, dipimpin seorang Dandema. Brigade Infanteri (Brigif) di lingkungan TNI ada beberapa macam, bisa berdasar garis komando, bisa berdasar kualifikasi.

Berdasarkan garis komando, ada Brigif yang berada di bawah:

- Kodam. Brigif yang berada di bawah Kodam hanya ada dua, yaitu Brigif 1/Jaya Sakti (Kodam Jaya) dan Brigif 15/Kujang (Kodam III/Siliwangi)
- Kostrad. Brigif di bawah Kostrad, terdiri: Brigif Linud 3 (Makassar), Brigif Linud 17/Kujang I (Jakarta), Brigif Linud 18/Trisula (Malang), Brigif 13/Galuh (Tasikmalaya), Brigif 9 (Jember), dan Brigif 6 (Solo).
- Berdasar kualifikasi, ada Brigif Lintas Udara (linud), dan Brigif Lintas Medan (Brigif biasa).

Kehadiran Militer Membangkitkan Traumatis Berkepanjangan

Begitu banyak pengalaman masyarakat asli Papua yang secara langsung mengalami kekerasan fisik dan pembunuhan oleh pihak militer Indonesia. Sejak tahun 1963 sampai saat ini, sudah sangat banyak masyarakat asli Papua yang menjadi korban militerisasi di Tanah Papua. Masyarakat yang tak bersalah dan tak mengerti tentang persoalan, dikejar, disiksa dan dibunuh oleh militer Indonesia. Khusus untuk wilayah di Pegunungan Tengah Papua, beberapa kali operasi militer yang dilakukan seperti pada 'Operasi Koteka' tahun 1977-1978, 'Operasi Mapenduma' tahun 1996, meninggalkan

pengalaman traumatis yang berat bagi masyarakat asli Papua.

Pengalaman traumatis ini membangkitkan solidaritas dari masyarakat asli Papua untuk terus menolak segala bentuk militerisasi di Tanah Papua. Kita bisa melihat, mendengarkan dan membaca sendiri bagaimana usaha masyarakat asli Papua di Lembah Balim, Kabupaten Jayawijaya yang menolak rencana pembangunan Markas Brimob di Wouma, Wamena pada 2015. Lalu pada 2016 dan hingga saat ini, masyarakat asli Papua di Biak, terus berjuang dan menolak pembangunan pangkalan militer di wilayahnya.

Perjuangan masyarakat tersebut dilakukan secara sadar karena segala pengalaman yang dialami dengan kehadiran militer. Sederetan kasus yang dilakukan Negara Indonesia melalui alat negaranya (militer) menjadi alasan kuat penolakan militerisasi di Tanah Papua. Sebut saja kasus Biak Berdarah pada 1998, Kasus Wasior pada 2001, Kasus Wamena tahun 2001 dan Kasus Paniai pada 2014.

Rencana pembangunan Brigade di Wuluwaga, Kimbim, Jayawijaya, berdampak buruk bagi masyarakat asli setempat. Sudah jelas bahwa sebagian besar masyarakat menolak rencana tersebut. Mereka menolak karena wilayah Wuluwaga tersebut adalah tempat sakral. Selama bertahun-tahun dan sejak dari dulu, masyarakat setempat tidak melakukan aktivitas di Wuluwaga. Karena mereka menghormati kesakralan tempat tersebut. Relasi antara mereka dengan leluhur dan alamnya bisa tergangu ketika lahan Wuluwaga diganggu atau dijadikan tempat aktivitas.

"Tanah yang diserahkan kepada TNI merupakan di dalamnya ada beberapa tempat keramat/sakral yang harus dijaga dan dilestarikan, maka siapapun tidak boleh melakukan segala aktivitas di atas tanah tersebut".[108]

108 Pernyataan yang disampaikan salah satu tua adat Bapak Iluma Holago. Hasil wawancara tim investigasi pada 9 Oktober 2018 di Kimbim.

Mengikuti segala proses serta kejadian, khususnya kasus di Wuluwaga, Kimbim, Kabupaten Jayawijaya, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Antara lain:

Pertama, yang sudah terjadi dan dijalankan oleh militer sebenarnya melawan 'hukum adat' maupun 'hukum positif'; seluruh prosesnya tidak mengikuti apa yang sudah ditentukan dalam adat. Penyerahan tanah telah meremehkan hak ulayat/milik masyarakat adat yang tentunya tidak sesuai dengan peraturan-peraturan hukum positif.

Kedua, proses serta kejadian yang dilaporkan telah menimbulkan suatu konflik substansial secara intern dalam masyarakat adat setempat. Konflik ini sebenarnya diciptakan karena keinginan pihak ketiga, yakni TNI.

Ketiga adalah tindakan yang diambil selama proses sampai pada pernyataan penyerahan lahan atau tanah membahayakan dasar eksistensi generasi di Kimbim.

Keempat, kejadian ini sangat mengelisahkan masyarakat adat karena telah menghidupkan kembali segala ingatan kolektif penderitaan yang mereka alami di masa lampau. Rasa traumatis ini sangat tidak dipedulikan oleh para penyelenggara acara pengukuhan ini.

Kelima, seluruh proses persiapan acara pengukuhan ini terbukti sangat bersifat rekayasa dengan memanipulasi masyarakat adat melalui janji-janji yang disampaikan.

Kemudian yang *keenam*, peranan dari Pemerintah Daerah dalam seluruh proses ini kurang nyata; kesan kuat bahwa pemerintah sipil tidak berdaya menghindari kegiatan-kegiatan rekayasa yang meremehkan dan merugikan masyarakat adat.

Ketujuh, protes massal masyarakat adat memang mempunyai suatu dasar yang kuat, maka wajar saja masyarakat mencabut baik pemberian gelar Kepala Suku Besar dan mencabut atau menolak penyerahan tanah seluas 90 hektare.

REKOMENDASI

Pemerintah Pusat

1. Pemerintah Pusat menghentikan segala upaya militerisasi di Tanah Papua dengan mengurangi secara signifikan kehadiran pasukan militer.
2. Pemerintah Pusat menghentikan segala program pembangunan markas militer yang baru, seperti yang direncanakan di beberapa wilayah di Tanah Papua; Kabupaten Jayawijaya (Brimob, Brigade), Biak Supiori dan Sorong.
3. Pemerintah Pusat mendukung dan membantu aktif Pemerintah Daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk memulihkan kembali otoritasnya sejalan dengan status 'Otonomi Khusus' atas segala gerak-gerik militer dan kepolisian di Tanah Papua.

Tentara Nasional Indonesia

1. Menghormati peraturan-peraturan adat dan menghindari terciptanya permusuhan dan konflik horizontal.
2. Melakukan sosialisasi dan internalisasi pemahaman yang utuh mengenai hak-hak asasi manusia dan sejarah penderitaan masyarakat adat di sejumlah wilayah di Papua, termasuk wilayah adat Omarikmo.

Pemerintah Eksekutif dan Legislatif Provinsi Papua dan Papua Barat

1. Pemerintahan Eksekutif dan Legislatif Provinsi Papua (DPRP, Gubernur, MRP, Kanwil Hukum dan HAM serta Instansi Teknis) untuk "SEGERA" menerbitkan produk Hukum yakni Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) yang memproteksi seluruh hak Orang Asli Papua (OAP) dari aspek Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya serta pemanfaatan

dan pendayagunaan tanah dan lingkungan hidup.

2. Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya diminta untuk membatalkan segala kegiatan pengukuran tanah dan penyerahan tanah 90 hektare.
3. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya (DPRD, Bupati, serta Instansi Teknis tidak turut serta dalam kemauan satu pihak (militer/TNI), tetapi berinisiatif mendorong kesejahteraan, memproteksi lingkungan dan tanah milik masyarakat adat serta memajukan dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat berbasis kearifan lokal.
4. Pemerintah Provinsi dan Daerah di Papua dan Papua Barat yang didukung oleh DPRP dan DPRD di kedua provinsi itu harus menolak segala bentuk militerisasi di Tanah Papua, dan menunjukkan otoritasnya atas pola kehadiran militer serta pasukan gabungan militer/polisi di Tanah Papua.
5. DPRP (Papua dan Papua Barat) supaya membentuk suatu Pansus guna memantau serta mengendalikan segala upaya pihak militer dan kepolisian yang memperluas kehadirannya serta gaya beroperasinya di lapangan.
6. Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat membentuk suatu tim khusus ahli hukum yang berkompeten untuk mendampingi seluruh warga dan organisasi kemasyarakatan yang diperlakukan sewenang-wenang (tidak sesuai dengan ketentuan hukum) oleh pihak militer dan kepolisian.
7. Pemerintah Daerah (Papua dan Papua Barat) menjamin dan memerintahkan pihak keamanan untuk memberikan hak akses kepada para lembaga mediasi (Gereja, Agama, Adat, LSM, MRP/MRPB, Cendekiawan) serta wartawan; hak akses ini termasuk bebas bergerak, mencari informasi dan memberikan pendampingan pada warga di wilayah berkonflik untuk memperoleh informasi yang benar.

Gereja, Masyarakat Adat, dan Pembela Hak Asasi Manusia

1. Para pemimpin gereja turut serta menjaga dan melindungi masyarakat, serta mengarahkan/mengendalikan moral umat, agar masyarakat dan umat tidak mudah terjerumus dan terlena oleh dinamika globalisasi masa kini.
2. Masyarakat Adat segera membahas tindakan-tindakan yang perlu disetujui bersama guna menghindari perpecahan dalam komunitas adat yang dapat mengancam masa depan seluruh masyarakat adat.
3. Dewan Adat Wilayah Lapago meningkatkan perhatian kepada masyarakat wilayah yang menjadi perhatiannya;
4. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat bergerak di bidang kemanusiaan dan lingkungan hidup turut serta mendampingi dan mengawasi masyarakat lokal, memberikan pemahaman yang baik untuk tetap mempertahankan eksistensi hak hidup OAP.
5. Para Pemimpin Lembaga Mediasi (Gereja, Agama, Adat, LSM, MRP/MRPB, Cendekiawan) turut memperjuangkan Papua bebas militerisasi.

Bab 5

PENGHANCURAN HUTAN PAPUA

KONDISI hutan Papua semakin rusak dan jumlahnya terus berkurang. Investasi dan proyek-proyek perkebunan telah menebas pohon-pohon dalam hutan menjadi lahan industri. Bagi orang-orang Papua, hutan adalah 'mama', yang menjaga alam dan kehidupan bangsa Papua.

Perusakan hutan Papua melibatkan kekuasaan yang mementingkan kepentingan ekonomi saja, tanpa mempedulikan kemanusiaan dan lingkungan alam Papua. Atas nama pelaksanaan proyek-proyek besar dan kepentingan nasional, kekuasaan dipakai untuk menyingkirkan pemilik tanah dan masyarakat adat dengan berbagai cara, termasuk dengan kekerasan.

Investor dan operator-operator proyek industri di Tanah Papua turut ambil bagian dalam memperburuk situasi-situasi hak asasi manusia di Tanah Papua. Masyarakat adat harus berjuang keras mempertahankan tanah-tanah adat dari upaya-upaya penguasaan lahan untuk industri, seperti kelapa sawit, dan pertambangan.

Enam Marga Suku Mpur, Lembah Kebar, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat meminta bantuan hukum kepada LP3BH, Manokwari, pada Februari 2018. Keenam marga itu melaporkan dugaan perampasan lahan tanah adat oleh sebuah perusahaan swasta yang bergerak di sektor perkebunan, namanya PT Bintuni Argo Prima Perkasa (PT BAPP).[109] Laporan ini bagian dalam upaya mempertahankan dan melawan derasnya investasi di tanah mereka, yang terus meningkat di Papua Barat.

Hal yang sama juga dilakukan masyarakat adat Yerisiam Gua di Kabupaten Nabire. Mereka mendesak dan menagih janji para legislatif daerah Nabire untuk mendesak dan menghentikan lajunya arus perusakan hutan yang dilakukan oleh PT Nabire Baru.[110] Di daerah Selatan Papua, masyarakat adat pemilik hak ulayat di Kali Kao Boven Digoel menolak pembabatan hutan atau kawasan keramat untuk kepentingan pembangunan PLTA di Distrik Waropko dan Ambatkwi.[111]

Cerita lain tentang ancaman tanah adat dialami oleh penduduk Suku Korowai. Hutan di wilayah Suku Korowai

109 Bdk. Koran Jubi, 28 Februari 2018
110 Bdk. Koran Jubi, 26-27 Februari 2018
111 Bdk. Koran Jubi 14-15 Februari 2018

menyimpan kekayaan tambang, di antaranya tambang emas. Pada awal tahun 2018, terungkap penambangan ilegal yang dilakukan di tengah hutan Suku Korowai, Papua.

Informasi aktivitas tambang ilegal ini terungkap ketika seorang pendeta dari Gereja Jemaat Reformasi Papua, Pdt. Trevor Christian Johnson mempublikasikan foto-foto aktivitas penambangan ilegal emas di daerah Hutan Korowai, Yahukimo pada 29 Januari 2018. Unggahan foto-foto tersebut kemudian menjadi viral. Aktivitas yang selama ini disembunyikan akhirnya diketahui oleh publik dan media.

Segala pemberitaan tentang maraknya aktivitas tambang emas ilegal di Korowai itu pun terungkap berlahan-lahan, seperti informasi masuknya helikopter yang membawa para pekerja dan mengangkut emas. Temuan lain adalah pencemaran air sungai, yang menjadi sumber kehidupan masyarakat, oleh bahan kimia. Hutan dan sumber air sebagai pengasuh kehidupan masyarakat adat Korowai menjadi rusak dan tercemar.

Media juga meliput tentang penolakan atau desakan masyarakat Korowai untuk menghentikan penambangan emas ilegal, yang mengancam kehidupan masyarakat Korowai. Salah satunya, media online yang bergerak pada isu-isu lingkungan hidup, yaitu *www.mongabay.co.id,* merilis berita tentang aktivitas penambangan Korowai dengan judul "Warga Protes Penambangan Emas Ilegal di Korowai".[112] Dalam publikasi itu, *Mongabay* menceritakan warga menyatakan penolakan dan melakukan sweeping di area penambangan emas ilegal tersebut.

Letak atau area pendulangan emas ilegal ini ada di dua wilayah, yaitu di Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kampung Kotaim, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Empat perwakilan masyarakat yang

112 Bdk.https://www.mongabay.co.id/2018/02/22/warga-protes-penambangan-emas-ilegal-di-korowai/, diakses pada Selasa, 23 Februari 2018

Kerusakan hutan di Distrik Nimbonton, Kabupaten Jayapura, Papua.
Pembabatan hutan ini dijadikan lahan perkebunan sawit. Foto diambil pada 5 Juni 2019.
Dokumentasi: SKPKC Fransiskan Papua/Harum Rumbarar.

tergabung dalam Ikatan Suku Ukam, yakni, tokoh masyarakat Yeseya Bitibalyo; pemilik ulayat, Yusak Weyo; Sekjen IS-Ukam, Timeus Aruman dan tokoh intelektual, Panuel Maling mengeluarkan pernyataan sikapnya untuk menolak penambangan emas ilegal. Selain itu warga menyita peralatan pendulangan dan bahan makanan, yang hendak diangkut dengan helikopter dari Bandara Nop Goliat Dekai menuju Kampung Kawe, Distrik Awinbon, Pegunungan Bintang.

Pernyataan sikap pemilik hak ulayat ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Papua, Frets James Boray. Menurut James Boray, penambangan di Korowai ini ilegal. "Namanya hak ulayat, pasti ada masyarakatnya. Jika ada yang ingin masuk dan menambang, tetap harus ada izin pemerintah".[113]

Walaupun demikian, pernyataan James Boray ini masih memberikan peluang bagi mereka yang rakus akan kekayaan alam Papua. Yang dikehendaki masyarakat bukan memberikan izin tetapi menolak usaha tersebut. Pemberian izin usaha tambang itu tak dikehendaki oleh masyarakat Korowai karena akan merusak hutan dan segala isinya.

Derita warga Suku Korowai itu muncul ketika media *BBC Indonesia* mempublikasikan liputan yang menggambarkan situasi masyarakat di Suku Korowai yang menyedihkan, dalam judul "Tambang emas ilegal di pedalaman Papua: Mendulang dari derita Suku Korowai".[114] Media ini menceritakan bagaimana kerusakan lingkungan di sekitarnya. Air yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat harus tercemar dan berubah warna.

"Ratusan orang silih berganti mendulang emas tanpa izin sejak 2017 di sepanjang Sungai Deiram Hitam, kawasan hutan di bagian selatan Papua. Keuntungan haram ratusan juta rupiah

113 *Idem.*,

114 Bdk. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45165810, diakses pada Rabu, 15 Agustus 2018

disinyalir telah diangkut keluar dari pedalaman Papua itu—rumah bagi masyarakat suku Korowai yang hidup dalam kemiskinan. Para pendulang diduga menggunakan air raksa beracun atau merkuri untuk membersihkan emas. Akibatnya, menurut warga lokal, air Sungai Deiram yang dulu bening kini berubah kecoklatan".[115]

Kita bisa membayangkan bagaimana kesengsaraan yang dialami oleh masyarakat pemilik hak ulayat di Suku Korowai. Segalanya yang memberikan kehidupan diambil dan dirusak. Mengapa pemerintah atau Negara tidak mengirimkan helikopter untuk menyelamatkan warga yang menderita karena kesakitan di sana?

•••

Hutan Papua, merupakan bagian terpenting masyarakat asli Papua. Sebagian besar penduduknya mendiami kampung-kampung di kawasan hutan. Maka, hutan adalah tumpuan hidup yang utama karena kebutuhan hidup penduduknya dipenuhi dari alam hutan.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang Papua (KMSTRP) mencatat berdasarkan SK Nomor 782/Menhut-II/2012 kawasan hutan di Provinsi Papua luasnya mencapai 30.387.499,00 hektare, yang terbagi; luas hutan lindung sebesar 15,570,567.00 hektare dan hutan kawasan budidaya luasnya sebesar 14,816,932.00 hektare.

Kini, hutan Papua terus terancam oleh dunia industri, seperti yang terjadi di wilayah Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Industri perkebunan kelapa sawit telah mengubah fungsi hutan tropis di Papua. Pada awal 2019, sejumlah organisasi sipil yang

115 *Idem.*,

terhimpung dalam Koalisasi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang Papua mengungkapkan sejumlah fakta-fakta penting terkait perubahan hutan Papua menjadi perkebunan sawit.

KMSTRP adalah organisasi sipil yang memperjuangkan perlindungan hutan Papua dari bahaya kerusakan karena industri perkebunan sawit. KMSTRP terdiri dari: LBH Papua, KIPRa-Papua, Jerat Papua, SKPKC Fransiskan Papua, INTSIA Papua, SOS Tanah Papua, Dehaling Universitas Cenderawasih, dan Pt.PPMA.

SKPKC Fransiskan Papua dalam buku Memoria Passionis tahun 2018 ini menurunkan secara utuh laporan yang dibuat oleh KMSTRP yang terpublikasi dalam bentuk Policy Brief berjudul "Delapan Alasan Moratorium Sawit di Provinsi Papua".[116] Ini bagian penting untuk menunjukan bahwa investasi sawit memberikan kontribusi signifikan bagi kerusakan hutan Papua. Ada delapan alasan dilakukannya moratorium perizinan sawit di Papua.

Pertama, Laju Deforestasi. Berdasarkan data Statistik Hutan dan Lahan KLHK (KLHK,2017) luas tutupan hutan Papua tahun 2015 seluas 25.084.064 Ha dan luas tutupan hutan Papua tahun 2017 seluas 25.065.958 Ha. Dalam empat tahun terakhir (2014-2017) tercatat jumlah lahan hutan yang hilang, yaitu hutan lahan kering sebesar 43,000 ha/tahun dan hutan lahan basah sebesar 12,000 ha/tahun. Hilangnya hutan pada periode ini juga diikuti dengan bertambahnya tutupan lahan untuk perkebunan dengan laju 28.000 ha/tahun.

Dari hasil analisis sebaran deforestasi di Provinsi Papua, menunjukkan bahwa kabupaten yang berkontribusi paling besar terhadap deforestasi di Provinsi Papua adalah Kabupaten Merauke dengan persentase deforestasi sebesar 37,62 persen, diikuti oleh Kabupaten Mappi sebesar 12,24 persen, Boven Digoel sebesar 7,95 persen, Asmat sebesar 5,36 persen.

116 Laporan ini dapat diakses di http://fransiskanpapua.org/2019/06/11/moratorium-perkebunan-sawit/

Gambar 1.

Perbandingan Laju Deforestasi Di Provinsi Papua dengan Wilayah Lainnya di Indonesia

Diduga salah satu penyebab meningkatnya angka deforestasi hutan di Provinsi Papua adalah pembukaan areal perkebunan kelapa sawit. Saat ini luas konsesi perkebunan Sawit di Provinsi Papua diperkirakan sudah mencapai 2.757.769,95 hektaree, yang terdiri dari 2.704.889,28 hektaree yang dikelola oleh 78 perusahaan dan 52.880,67 hektare dikelola oleh 5 Kopermas. Sebaran perkebunan sawit menurut kabupaten dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini.

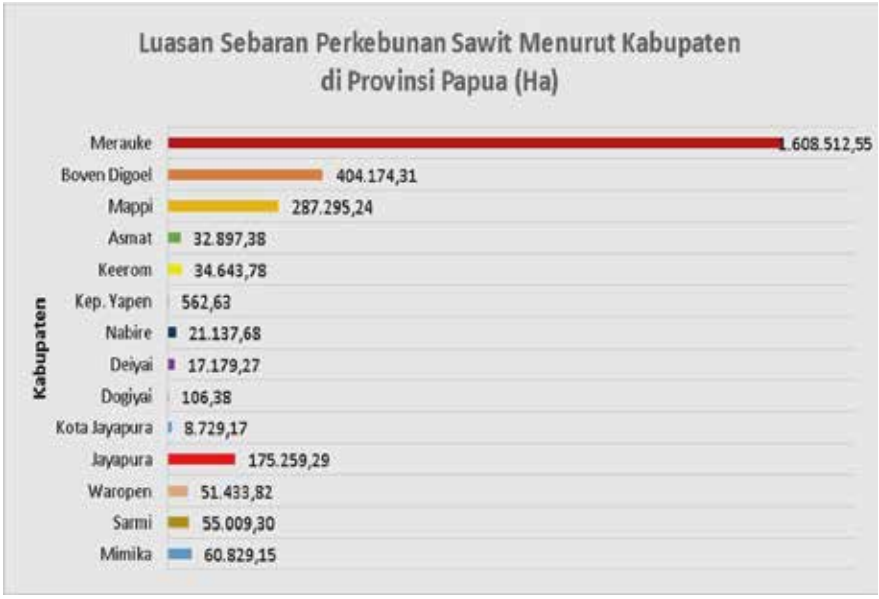

Gambar 2. Sebaran Perkebunan Sawit Menurut Kabupaten di Provinsi Papua

Alasan kedua adalah **Tumpang Tindih Perizinan**. Berdasarkan overlay peta konsesi perkebunan, pertambangan dan IUPHHK-HA/HTI, Koalisi GNPSDA Papua menemukan adanya tumpang tindih perizinan antara perkebunan sawit dengan pertambangan maupun dengan IUPHHK-HA/HTI. Tumpang tindih perizinan sawit dengan pertambangan seluas 50.424,19 Ha, dan tumpang tindih perizinan sawit dengan IUPHHK-HA/HTI seluas 329,593.23 Ha sebagaimana tampak pada tabel dibawah ini.

Tabel Tumpang Tindih wilayah Perizinan Sawit
dengan Izin Konsesi Lainnya.

Izin Konsesi	Perkebunan Sawit (ha)	Pertambangan (ha)	Kehutanan (ha)
Perkebunan Sawit		50.424,19	329.593,23
Pertambangan	50.424,19		595.346,36
Kehutanan	329.593,23	595.346,36	

Dalam proses pengajuan permohonan izin lokasi baik untuk lokasi pertambangan, perkebunan dan HPH hingga dikeluarkannya izin seharusnya sudah dipastikan bahwa semua permohonan izin yang diajukan tidak saling tumpang tindih.

Alasan ketiga, **Izin Perkebunan Sawit di Kawasan Lindung dan Konservasi**. Kawasan Lindung adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang Papua (KMSTRP) menemukan ada izin perkebunan sawit yang dikeluarkan telah menabrak kawasan lindung seluas 36,767.25 Ha. Perubahan kawasan lindung yang heterogen menjadi kebun sawit yang omogeny berdampak pada rusaknya ekosistem hutan serta keanekaragaman flora dan fauna hutan menjadi hilang. Izin-izin konsesi perkebunan yang diterbitkan telah melanggar UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dan UU No. 5/1990 tentang Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem. Luas konsesi sawit di kawasan hutan lindung tampak pada gambar 3 di bawah ini.

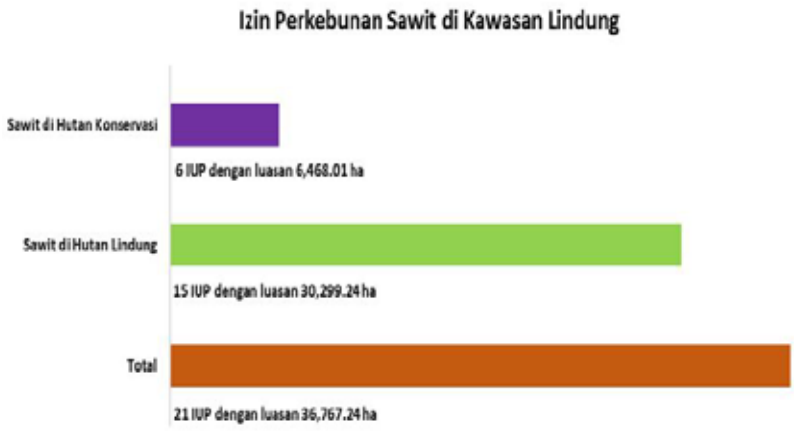

Gambar 3. Jumlah dan Luasan konsesi sawit di kawasan lindung

Alasan keempat, **Perkebunan Sawit Tidak Memiliki IUP dan HGU**. Berdasarkan data FWI (2017) ada 79 perusahaan perkebunan sawit di Papua dengan luasan konsesi sebesar 2,597,524.40 Ha. Dari jumlah perusahaan perkebunan sawit tersebut, 36 perusahaan sawit telah memiliki izin usaha perkebunan (IUP) dengan luasan sekitar 782.123,70 ha (Sumber Dinas Perkebunan Provinsi Papua 2018) sedangkan sisanya 43 perusahaan perkebunan sawit belum terkonfirmasi memiliki izin usaha perkebunan (IUP) dengan areal konsesinya sebesar 1,815,400.70 Ha. Sehingga, patut dipertanyakan dan ditelusuri lebih jauh apakah 43 perusahaan perkebunan sawit lainnya masih dalam proses pengurusan IUP maupun AMDAL ataukah sudah tidak aktif lagi, sebagaimana terlihat pada gambar 4 ini.

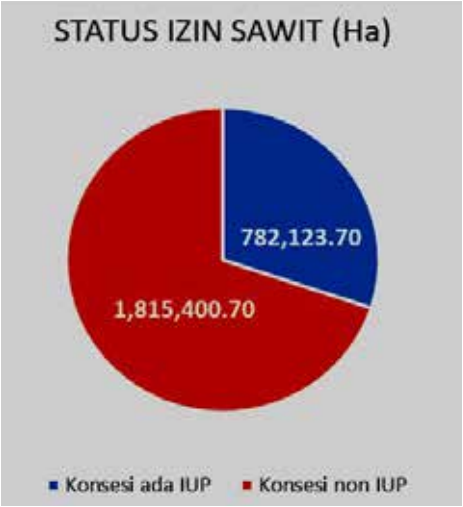

Gambar 4. Status Luasan izin Konsesi sawit di Provinsi Papua

Selanjutnya berdasarkan informasi dari Kanwil ATR/BPN Papua ada 31 Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan untuk perkebunan kelapa sawit dengan luasan sebesar 325.044,81 hektare sebagaimana terlihat pada gambar 5 di bawah ini.

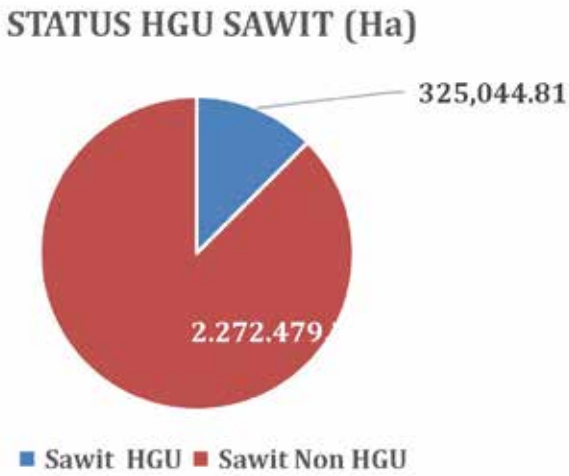

Gambar 5. Status HGU sawit di Provinsi Papua

Alasan kelima, Perkebunan Sawit Tidak Memiliki Izin Pelepasan Kawasan Hutan. Data dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua menunjukkan bahwa dari tahun 2000 s/d 2017 ada 22 SK Pelepasan Kawasan seluas 441.857,90 hektare yang telah dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan untuk 22 perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di lima kabupaten. Sementara dari hasil analisis, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang Papua (KMSTRP) memperkirakan ada sekitar 1.775.357,59 hektare perkebunan sawit yang berada di kawasan hutan yang belum mendapatkan izin pelepasan, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 6.

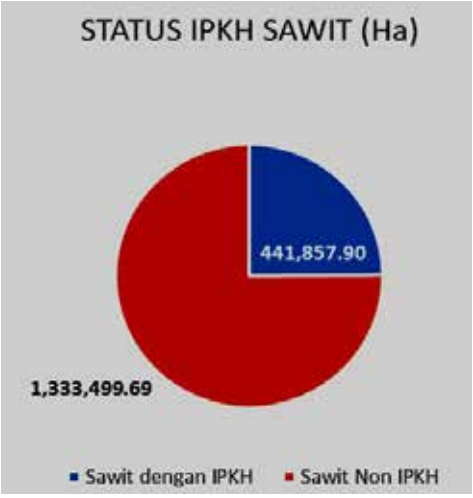

Gambar 6. Status IPKH (Izin Pelepasan Kawsan Hutan) untuk sawit

Alasan keenam, Izin Perkebunan Sawit tidak Memiliki Amdal. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua tahun 2018 sebanyak 15 perusahaan perkebunan sawit yang telah memiliki AMDAL dengan luasan 276,233.72 hektare.

Sedangkan sisanya sebanyak 64 perusahaan perkebunan sawit diduga belum memiliki AMDAL. Koalisi Masyarakat Sipil untuk

Tata Ruang Papua memperkirakan ada sekitar 2,321,290.68 ha perkebunan sawit yang belum mendapatkan izin lingkungan karena belum memiliki AMDAL. Hal ini tentunya merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terutama Pasal 109 dan Pasal 3 Ayat 2 Huruf b Permen LHK Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup bagi dan atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha tetapi belum memiliki dokumen Lingkungan Hidup, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 7 di bawah ini.

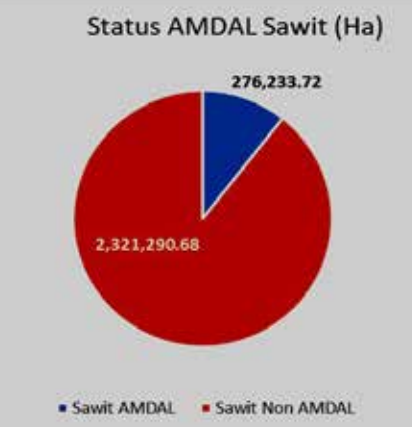

Gambar 7. Status AMDAL SAWIT

Alasan ketujuh, Konflik Tenurial.[117] Konflik sumber daya alam di Papua sangatlah besar. Tercatat ada 419 kasus konflik sumber daya alam, dan konflik yang besar terjadi di Kabupaten Mimika, Nabire, Keerom, Jayapura dan Kota Jayapura (RPJMD Papua 2018-2013). Di Kabupaten Keerom misalnya, terjadi konflik tenurial seluas 1.300 ha di tiga lokasi antara masyarakat adat Suku Merap dengan perusahaan sawit PTPN II di Kabupaten

117 Konflik Tenurial Hutan adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan.

Keerom. Di Kabupaten Nabire, masyarakat Suku Yerisiam Gua menggugat PT. Nabire Baru ke PTUN akibat perampasan tanah adat mereka yang ditanami menjadi perkebunan sawit. PT. Medco Papua Industri Lestari di Merauke yang beroperasi sejak tahun 2007 berkonflik dengan masyarakat di Distrik Kaptel Kabupaten Merauke akibat dari tidak diselesaikannya tuntutan ganti rugi lahan seluas 2.800 hektare. Masih banyak contoh konflik lainnya, yang penting adalah konflik ini menjelaskan bahwa izin-izin yang diterbitkan pemerintah bermasalah dan perlu ditata ulang.

Daftar perusahaan sawit yang berkonflik dengan masyarakat

Perusahaan	Luas	Perizinan dan Hak	Tipologi Konflik
PT. PTPN II	50.000 Ha	Hak Guna Usaha	Konflik dengan masyarakat
PT. Nabire Baru	17.000 Ha	Izin lokasi	Konflik dengan masyarakat
PT. Bio Inti Agrindo	36.401 Ha	Hak Guna Usaha	Konflik dengan masyarakat

* Disarikan dari berbagai sumber baik HGU, Izin Lokasi dan Buku Atlas Sawit Papua

Alasan kedelapan, Potensi Kerugian Negara. Pembukaan lahan perkebunan sawit yang tidak prosedural tidak saja menimbulkan kerusakan ekologi tetapi juga menyebabkan kerugian keuangan negara yang cukup fantastis. Berdasarkan perhitungan tentang nilai Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang Papua (KMSTRP) memprediksi negara mengalami kerugian mencapai US$ 19,622,981,338.23 atau sekitar Rp. 274,721,738,735,164.00 ($1 USD = Rp. 14.000). Nilai ini sebanding dengan membangun 137,361 unit Sekolah Menengah Atas dengan harga per unit Rp. 2.000.000.000 di Provinsi Papua.

Berkaca dari penjelasan di atas, berarti hutan dan alam di Papua sudah hilang. Dengan sendirinya akan menghilangkan kearifan lokal, tradisi serta kehidupan Manusia Papua. Hutan Papua adalah paru-paru dunia hanyalah bahasa slogan dan iklan yang seringkali dituturkan oleh para elit Papua dan Jakarta dalam setiap kali kunjungan ke Papua.

REKOMENDASI

1. Gubernur Papua perlu menerbitkan kebijakan moratorium izin baru perizinan perkebunan sawit dalam bentuk instruksi Gubernur sambil melakukan evaluasi dan penataan terhadap semua izin-izin perkebunan sawit yang ada saat ini.
2. Gubernur Papua perlu membentuk tim evaluasi izin dengan melibatkan unsur organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, akademisi, Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) dan Tokoh Adat. Tim evaluasi ini juga bertugas untuk mengkaji tata kelola perizinan perkebunan sawit di Provinsi Papua sebagai mana dimandatkan dalam Inpres No. 8/2018 tentang Moratorium Sawit di Indonesia.
3. Gubernur Papua segera mencabut izin usaha perkebunan yang telah beroperasi di Kawasan lindung dan memberikan sanksi sesuai peraturan perundang–undangan yang berlaku.
4. Gubernur Papua segera memfasilitasi penyelesaian konfik tenurial antara masyarakat adat dengan pemegang izin perkebunan sawit.
5. Pemerintah Provinsi, Kabupaten, DPR (Provinsi dan Kabupaten) serta MRP/MRPB harus tegas menertibkan perusahaan tambang ilegal di Tanah Papua.
6. Masyarakat Adat Papua membangun kesadaran bersama untuk tidak menjual tanah atau dusun tetapi sebaiknya mengkontraknya kepada setiap pelaku usaha.

7. Masyarakat Adat Papua membangun kesadaran bersama untuk melawan dan menolak segala bentuk investasi yang menghancurkan hutan, tanah dan alam di Tanah Papua.

Bab 6

KASUS JA'FAR UMAR THALIB: TUMBUHNYA KELOMPOK RADIKALISME DI TANAH PAPUA

SATU PERSOALAN Papua yang muncul dan hampir dilupakan adalah gerakan radikalisme di Tanah Papua. Benih konflik yang semakin tumbuh di Tanah Papua, terkait kelompok radikalisme agama ini dalam tiga tahun terakhir sejak 2016 tercatat menjadi pengganggu kehidupan toleransi di Papua. Kelompok radikal ini dipimpin oleh Ustad Ja'far Umar Thalib, yang dikenal sebagai eksekutor dalam konflik SARA di Ambon, Maluku pada 2000.

Setelah lama tak terdengar, nama Ustad Ja'far Umar Thalib atau JUT kembali diperbincangkan pada tahun 2015, ketika muncul peristiwa konflik di Kota Karubaga, Tolikara, Papua pada 17 Juli 2015 lalu. Saat itu, JUT mengumumkan untuk berjihad dan menetap di Tanah Papua. Sejak itulah, beberapa peristiwa konflik yang berbau SARA mulai terjadi.

Kehadiran Ja'far Umar Thalib di Tanah Papua pun menjadi perhatian berbagai pihak dan masyarakat Papua. SKPKC Fransikan bersama organisasi sipil sosial dan keagamaan memberikan perhatian kepada hadirnya Ja'far Umar Thalib dan kelompoknya di Tanah Papua. Pada bagian laporan ini, dibahas mengenai kasus keberadaan JUT di Tanah Daiget, Kabupaten Keerom, Papua.

Sepintas Tentang Jafar Umar Thalib[118]

Pada tahun 1991, Ustad Ja'far Umar Thalib berangkat dari Indonesia ke Yaman Utara. Di sana dia mendalami ajaran Salafi dengan belajar ke Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i. Didukung oleh pihak Islam yang konservatif, beliau aktif dalam melaksanakan ajaran Salafi. Pada tahun 1993, Ja'far kembali ke Indonesia sebagai pribadi yang terpesona dengan ajaran Salafi-Wahhabi dan berkomitmen untuk menyebarkan pemikiran Salafi di Indonesia melalui da'wah dan pendidikan. Ia mendirikan Pompes Ihya al-Sunnah di Degolan, sekitar 15 kilometer di utara Yogyakarta. Ihya al-Sunnah artinya memelihara tradisi Nabi. Dalam wawancara majalah *Tempo* yang berjudul "Sang Ustad yang Penuh Warna", Ja'far menyampaikan bahwa ia ingin menyebarkan pemikiran Salafi-Wahhabi di kalangan orang muda Indonesia melalui lembaga pendidikan Pompes Ihya al-Sunnah.

Pada 30 Januari 2000, Ja'far Umar Thalib mengumumkan terbentuknya Laskar Jihad dan mulai merekrut anggota yang

118 Lihat http://papuanarchive.org/map/reports/view/27

bersedia berperang di Ambon. Ia membuka posko perekrutan anggota Laskar Jihad di beberapa kota di pulau Jawa. Upayanya ini mendapat dukungan dari Yaman dan Arab Saudi. Tujuh ulama Salafi mengeluarkan fatwa yang, menurut Ja'far, meluluskan rancangan jihad dalam membantu orang Islam di Ambon dengan tujuan untuk melindungi umat Islam dari serangan Kristiani. Dan pada 7 - 17 April 2000, Laskar Jihad melaksanakan sebuah Latihan Gabungan Nasional di Bogor, kemudian pada akhir bulan April dan pertengahan Mei 2000, mereka dikirim ke Maluku.

Pada 4 Mei 2002, Ja'far ditahan dengan dakwaan menghina Presiden Indonesia dan menciptakan konflik agama, tetapi pada 30 Januari 2003, Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan bahwa ia tidak bersalah.

Nama Ja'far Umar Thalib kembali disebut ketika terjadi penyerangan terhadap rumah Julius Felicianus, Direktur Galang Press. Pada 29 Mei 2014, Front Jihad Islam menyerang rumah milik Direktur Galang Press, Julius yang sedang doa Rosario Bulan Maria dari umat Katolik Santo Fransiscus Agung, Gereja Banteng. Anak buah Ja'far Umar Thalib dan koordinator Front Jihad Islam (FJI), Abdurahman mengakui bahwa merekalah yang melakukan penyerangan.

Mereka bahkan juga memaksa pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan fatwa sesat terhadap kelompok Syiah. Namun keinginan mereka ditentang oleh dua organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam besar di Indonesia, yakni NU dan Muhammadiyah yang dikenal sangat moderat dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Baginya, pluralisme merupakan paham yang membawa pemurtadan bagi umat Islam. Dia menuding kelompok di luar Islam yang mencetuskan paham ini.

Ja'far Umar Thalib di Tanah Papua

Pada 2015 nama Ja'far Umar Thalib kembali diperbincangkan ketika orang memperbincangkan kasus Tolikara 17 Juli 2015. Di dalam peristiwa ini seorang anak yang dikabarkan tewas dan sebelas orang lainnya mengalami luka tembak aparat keamanan. Seluruh korban dalam peristiwa tersebut adalah jemaat dari GIDI. Peristiwa ini justru memicu kemarahan umat Islam di seluruh Indonesia. Ja'far Umar Thalib juga ikut berteriak. Dia mengeluarkan maklumat Jihad Fi Sabilillah ke Papua pada 20 Juli 2015. Ia menyatakan perang terhadap kelompok yang menyerang umat Islam. Dalam maklumat yang sama, ia juga jelas menyebut pemerintah Indonesia sebagai pemerintahan yang kafir.

Di tahun yang sama, pada 9 Desember 2015, di Koya Barat, Kota Jayapura, seorang pemuda Islam yang hendak melaksanakan sembahyang merasa terganggu dengan lagu-lagu rohani yang diputar dari pondok Natal telah menyerang pemuda Kristen di pondok Natal itu. Perkelahian akhirnya tidak dapat dihindari karena aparat keamanan dengan cepat menyelesaikan persoalan tersebut tanpa harus memperpanjang persoalan. Belakangan diketahui bahwa pemuda Islam yang terlibat dalam perkelahian tersebut adalah salah satu santri Ja'far Umar Thalib yang sedang berada di Koya Barat, Kota Jayapura.

Tanggal 27 Desember 2015, MUI Papua, Ormas Islam serta berbagai tokoh Islam lainnya membuat pertemuan yang intinya meminta agar Gubernur Papua tidak membiarkan JUT dan kelompoknya hadir di Papua.

Peristiwa yang hampir sama terjadi di tahun berikutnya, 2016 ketika santri Ja'far Umar Thalib melempar batu ke acara Kebaktian Kebangunan Rohani dari Jemaat Pentakosta di Koya Barat.

Berbagai reaksi muncul dari tokoh dan Ormas Islam di Papua atas kehadiran Ja'far Umar Thalib di Koya Barat. Para tokoh

Kristen dan Muslim bersama para pemuda menyampaikan protes atas kehadiran Ja'far Umar Tahlib di Papua. Walaupun demikian, JUT dan kelompoknya tidak juga angkat kaki dari Tanah Papua. Ustad Ja'far dan kelompoknya mencari tempat yang aman serta teman yang dapat diajak kerja sama di Tanah Papua. Hingga pada 2017, JUT dan kelompoknya mulai menetap di Distrik Skamto, Kabupaten Keerom, Papua.

Ja'far Umar Thalib di Kabupaten Keerom

Awal mula masuknya Ustad Ja'far di Kabupaten Keerom difasilitasi oleh pihak-pihak tertentu. Pada tahun 2016, JUT dan kelompoknya mulai bergerilya mencari tanah di daerah Keerom. Pencarian lahan ini dimaksudkan untuk mendirikan pondok pesantren dan sebagai pusat aktivitasnya di Kabupaten Keerom, mungkin juga untuk Tanah Papua. Awalnya mereka berusaha mendapatkan lahan di Koya, Kota Jayapura, tetapi tak bisa karena masyarakat setempat tidak memberikan izin.

Di Kabupaten Keerom, JUT dan kelompoknya mendapatkan lahan melalui salah satu elit politik Keerom, mantan anggota DPRD Keerom. Masyarakat melepaskan lahannya kepada mantan anggota DPRD ini karena dalam kesepakatan akan dibangun usaha ternak sapi.

"Saya bersama istri menjual tanah ini lantaran masih mempunyai tanah lain sekitar 2-3 hektar, di pinggir kali antara Arso 14 dan Kampung Skamto. Penjualan tanah dan sesuai kesepakatan jual tanah seluas 2 hektar. Yang terjadi sekarang dalam perluasan tanah sekitar 28 hektar".[119]

Pelepasan lahan yang tidak adil ini juga dialami oleh Bapak Herman Wake yang juga merupakan pemilik hak ulayat tersebut. Menurut Herman, pelepasan lahan ini tidak melibatkan dirinya.

119 Pernyataan yang disampaikan oleh Bpk. Yulianus Kembuh dalam wawancara dengan SKP-KC FP pada 12 Oktober 2018 di Arso.

Herman tidak tahu menahu terkait pelepasan lahan sampai dengan 28 hektar tersebut.

"Berkaitan dengan hak ulayat, kebetulan yang mempunyai hak tanah ada pada saya. Tetapi selama proses pelepasan saya tidak tahu sama sekali. Saya tidak tahu siapa pembeli, tidak tahu juga yang menjualnya. Saya pernah 6 kali mediasi di pertanahan, bersama mantan anggota DPRD Keerom Iwan Siswanto. Saya bilang Pak Iwan tolong kembalikan tanah saya. Saya hanya menginginkan hak tanah saya harus kembali".[120]

Dari penelusuran Tim SKPKC Fransiskan Papua, ada persoalan izin penggunaan lahan yang dikuasai oleh JUT dan kelompoknya dengan pemilik hak ulayat. Status tanah tersebuh sesungguhnya masih dipersoalkan oleh pemilik tanah ulayat karena tak melalui proses yang bisa diterima secara adat.

Penolakan JUT dan Kelompoknya

Pada tahun 2017, gerakan masyarakat yang didukung oleh pemerintahan setempat, yaitu: Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Keerom, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Keerom, dan Majelis Rakyat Papua mendesak, bahkan mengusir JUT dan kelompoknya dari Tanah Papua, khususnya dari wilayah Kabupaten Keerom.

Pada tahun 2017, Pemerintah Keerom mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada JUT dan kelompoknya sebanyak tiga kali. Surat peringatan ini ditujukan kepada JUT dan kelompoknya agar menghentikan kegiatannya dan meninggalkan Kabupaten Keerom. Surat peringatan terakhir dikeluarkan pada 5 September 2017, yang isinya memberikan batas waktu kepada JUT dan kelompoknya hingga Minggu ke-3 September 2017.

120 Pernyataan yang disampaikan oleh Bpk. Herman Wake, pemilik hak ulayat dalam FGD di Arso pada 20 Maret 2019.

Aksi damai menolak JUT dari Solidaritas Umat Muslim di Papua, di Kantor DPR Papua, Selasa, 5 Maret 2019, Dok. SKPKC FP

Aksi damai menolak JUT dari Solidaritas Umat Muslim di Papua, di Kantor DPR Papua, Selasa, 5 Maret 2019, Dok. SKPKC FP

Sedangkan surat peringatan pertama dan kedua tidak diindahkan oleh JUT dan kelompoknya. Pada surat teguran terakhir, JUT baru membalasnya dan menolak teguran tersebut. Aktivitas Ponpes JUT sempat terhenti, demikian juga pembangunan pondok pesranten. Beberapa pekerja yang ada dipulangkan ke Jawa.

Menurut Assiten I Keerom Sucahyono Agung, skenario pemulangan JUT dan kelompoknya sudah disiapkan termasuk akan memberikan ganti rugi terhadap aset JUT. Menurutnya pemerintah Kabupaten Keerom bukan melakukan pelarangan tempat ibadah atau pembangunan masjid dan pesantren tetapi yang dikhawatirkan adalah kehadiran Jafar Umar Thalib dan kelompoknya akan menimbulkan konflik.[121]

Kekhawatiran dari Asisten I Keerom juga dirasakan oleh Wakil Ketua FKUB Keerom, Haji Nursalim Ar. Rozi. Menurut Haji Nursalim, saat ini di Tanah Keerom memang ada kelompok yang mengatasnamakan agama tertentu dengan paham radikalisme untuk menghancurkan kehidupan toleransi yang selama ini dibangun.

"Ada oknum, yang sengaja didoktrin dengan ideologi radikal sehingga berbahaya. Di Keerom komunitas terbesar Muslim kalau dilihat dari organisasi massa yaitu NU yang terbesar, struktural maupun kultural. Prosentase 85% untuk umat Islam NU dan sisanya Muhamadiyah. Dan kemudian hadir kelompok radikal dengan rekam jejak JUT dalam kelompoknya. Bagaimana prosedur orang untuk membuka lahan, mendirikan tempat beribadah, mendirikan taman pendidikan yang semuanya ada aturan. Dan JUT melanggar semua itu, dengan kehadirannya menggoyahkan stabilitas keamanan. Bangunan pondok pesantren dan bangunan Masjid belum memiliki izin, tidak ada ketentuan

121 Bdk. Laporan Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP) tentang Jafar Umar Thalin di Papua. Laporan ini dapat diakses di https://www.aldp-papua.com/jafar-umar-thalib-jut-di-papua/

izin operasional dengan izin dari Kementerian Agama dan legalitas IMB tidak ada".[122]

Pada 27 Februari 2019, JUT dan kelompoknya kembali membuat kekacauan di Koya, Kota Jayapura. Ustad Ja'far dan para santrinya melakukan perusakan terhadap rumah dan menakuti warga dengan menggunakan senjata tajam berupa pedang samurai.[123] Beruntung bahwa kejadian ini tidak menyebar luas, karena masyarakat tidak terprovokasi dan pihak aparat kepolisian cepat menanganinya. Ustad Ja'far dan kelompoknya akhirnya diperiksa oleh pihak Polda Papua dan ditetapkan sebagai tersangka perusakan rumah warga di Koya.

Pasca kejadian tersebut, umat beragama di Kota Jayapura melakukan penolakan terkait kehadiran JUT dan kelompoknya. Pada Senin, 4 Maret 2019, umat Kristen dari Gereja Katolik dan Protestan (denominasi Gereja di Kota Jayapura) melakukan aksi damai untuk menolak kehadiran JUT dan kelompoknya.

Di dalam pembacaan pernyataan yang ditandatangani oleh FKUB Provinsi Papua, semua pihak menolak kehadiran JUT dan kelompoknya di Tanah Papua.[124] Penolakan yang sama juga dilakukan oleh kelompok umat Muslim di Tanah Papua, dengan melakukan aksi penolakan kehadiran JUT dan kelompoknya di Tanah Papua pada 5 Maret 2019.

Pasca aksi penolakan ini, tersiar kabar bahwa JUT dan kelompoknya keluar Papua, diperiksa oleh pihak kepolisian dan mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Makassar pada 16 Juni 2019. Dalam persidangan ini, Pembela Hukum JUT meminta keringanan hukuman bagi JUT dan kelompoknya karena sudah ada perdamaian

---

122 Pernyataan Wakil Ketua FKUB Keerom, Haji Nursalim Ar. Rozi dalam wawancara dengan Tim SKPKC FP pada 13 Oktober 2018.

123 Bdk.https://www.antaranews.com/berita/803855/polda-papua-tetapkan-jafar-umar-thalib-tersangka-perusakan-di-koya, diakses pada Senin, 12 Agustus 2019.

124 Video aksi serta pembacaan pernyataan dapat diakses di https://www.youtube.com/watch?v=R4HWIYlTlDs

yang dilakukan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara.[125]

Akhirnya, Ja'far Umar Thalib divonis lima bulan penjara dalam perkara kekerasan dan perusakan di Koya Barat, Distrik Muara Tami, Jayapura pada 27 Februari 2019. Ia dinyatakan melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHP. Saat itu, Ja'far dan tujuh orang pengikutnya mendatangi pemilik rumah yang memutar musik rohani dengan volume keras, dan dianggap mengganggu ibadah di masjid. Lalu ia memerintahkan dua santrinya memotong kabel dan sound system dengan pedang samurai.

Sidang dan vonis putusan Ja'far Umar Thalib di Pengadilan Negeri Makassar itu dilaksanakan pada 16 Juli 2019. Setelah dihitung masa penahanannya, maka 11 hari sesudah putusan, ia dinyatakan bebas. Kemudian, sekitar satu bulan kemudian, ia dikabarkan mengalami serangan jantung dan meninggal dunia di Jakarta pada 25 Agustus 2019.

Gerakan JUT dan Dampaknya

Paham atau ideologi radikalisme yang dianut JUT dan kelompoknya bertentangan dengan Islam arus utama yang sudah ada di Papua dan dengan agama lainnya. Kelompok arus utama ini juga merasa ditantang oleh kelompok baru ini karena mereka menjunjung tinggi syariah sebagai modal etis dalam membangun masyarakat Islami tetapi tidak menginginkan formalitas syariah menjadi ideologi dan sistem hukum negara. Syariah hanya memberi inspirasi moral spirituil bagi sistem itu yang disatukan dengan sumbangan moral lain dari agama lain.

Kekhawatiran kelompok Islam arus utama ini semakin besar karena kehadiran kelompok baru ini merusak suasana kerukunan agama yang sudah dibangun selama ini. Pembauran yang selama

125 Informasi persidangan JUT dan kelompoknya tidak dipublikasikan. Informasi ini diperoleh dari Direktur AlDP, Ibu Anum Siregar yang mengikuti persoalan JUT di Tanah Papua

ini terjadi secara alamiah melalui interaksi sosial, ekonomi dan kebudayaan bisa menjadi rusak. Kehadiran Islam baru ini, yang walaupun kecil tetapi militan dan agresif, memicu polarisasi baru dalam masyarakat berdasarkan agama dan aliran, melalui proses "politik identitas". Dan politik identitas ini menyebar ke semua bidang kehidupan sehingga isu agama tidak lagi murni agama tetapi menyangkut masalah sosial, politik, ekonomi dan budaya. Sindrom politik identitas membutuhkan ketrampilan baru dalam mengolah keragaman demi membangun rumah bersama. Dalam sentimen politik identitas ini, isu mayoritas dan minoritas, marginalisasi kelompok minoritas dan kelompok asli di ruang publik merebak dalam wacana publik, dalam berpolitik di kota dan kabupaten serta di tingkat provinsi.

Dalam konteks ini ada suatu kekhawatiran lain yang muncul, yaitu bangkitnya kelompok radikal baru dalam lingkungan Kristen, baik kelompok radikal yang sudah ada maupun radikalisasi kelompok moderat. Hal ini muncul sebagai reaksi dari provokasi kelompok baru Islam dan dampak sistemiknya (di tingkat nasional, terutama peristiwa Ahok, dan di tingkat daerah, khususnya kelompok JUT dan HTI).

Radikalisme Islam melalui kelompok dakwah baru agresif seperti "Kapal Dakwah" Fazlan A di Selatan Papua disambut oleh reaksi misi kristen yang mau merebut umat, termasuk kaum kedar. Bahkan reaksi ini berkembang menuju promosi Injil sebagai satu-satunya sumber acuan kehidupan masyarakat, dengan semboyan "Papua Tanah Injil", dan menuju Perdasus keagamaan yang sangat memberi hak istimewa pada kekristenan. Ini merupakan suatu reaksi yang dianggap sebanding dengan gerakan yang ingin memformalkan syariah dari kelompok baru.

Lalu mengenai perkembangan fasilitas agama Islam yang semakin banyak dan akses publik semakin luas, ditanggapi dengan memberikan reaksi berlabel "Papua Tanah Injil", ini dipahami sebagai

mekanisme pertahanan diri dan perebutan akses yang hilang itu. Seperti dalam Islam, kelompok radikal ini pun mengancam aliran Kristen lain yang lebih moderat dan tidak mendukung formalisasi Injil dalam hukum atau perundangan daerah. Kelompok moderat ini lebih mendukung program "Papua Tanah Damai" yang sudah diterima oleh semua agama di Papua sebagai platform bersama.

Turunan dari aksi dan reaksi ini adalah polarisasi agama yang terbawa pada polarisasi Papua dan non-Papua, atau bahkan Papua dan Indonesia dalam gerakan perjuangan Papua. Identifikasi lama, Papua-Kristen yang berbeda dari Indonesia-Islam, sangat mudah dijadikan bumbu atau alat politik, baik politik dalam rangka merebut akses politik yang ada di daerah, maupun politik kemerdekaan Papua.

REKOMENDASI

Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Keerom

1. Membentuk Tim Terpadu untuk mengusut kasus perampasan hak ulayat tanah adat di daerah Arso 14, Keerom.
2. Mengusut secara tuntas keberadaan kelompok radikal pimpinan Ja'far Umar Thalib di Arso 14, Keerom.
3. Menegaskan penolakan keberadaan kelompok radikal, seperti kelompok Ja'far Umar Thalib di Tanah Papua.
4. Bertindak tegas untuk mengembalikan hak kepemilikan tanah yang telah dibeli oleh mantan anggota DPRD Kabupaten Keerom, Iwan Siswanto, sesuai luasnya, dari 2 hektare menjadi 28 hektare.

Kepolisian RI, Kepolisian Daerah Papua

1. Bersikap tegas dalam melakukan penegakan hukum kepada anggota-anggota kelompok radikal pimpinan Ja'far Umar Thalib di Tanah Papua, termasuk di Keerom.
2. Bersikap terbuka, menerima dan mendukung masukan-masukan dari masyarakat lintas iman di Tanah Papua untuk menolak dan mencegah konflik-konflik yang dipicu oleh kelompok radikal Ja'far Umar Thalib di daerah Keerom, dan di Tanah Papua.

Tokoh-tokoh Papua; Kepala Kampung, Kepala Distrik, Bupati;

1. Bersikap aktif menjaga dan melindungi tanah-tanah adat yang dimiliki masyarakat.
2. Mengingatkan dan menyadarkan kepada masyarakat adat untuk tidak melepaskan atau menjual tanahnya.
3. Melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat terkait hak-hak ulayat tanah adat agar bisa menjaga dan memanfaatkan tanah adatnya dengan bijak.
4. Memperkuat solidaritas dan persatuan antar masyarakat adat dalam menjaga tanah ulayat, baik di Keerom maupun di wilayah lain di Papua.

Bab 7

PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA: PROSES DAN JANJI

JANJI NEGARA menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di Tanah Papua disuarakan. Janji itu disampaikan dari Jakarta untuk Papua. Namun, janji itu terdengar manis saja karena tak ada realita nyata. Para korban dan masyarakat di Tanah Papua semakin mengerti bahwa janji-janji manis yang terlepas di ujung lidah itu berakhir tanpa perjuangan mewujudkannya.

Janji itu tak berlanjut dengan sebuah proses yang benar. Institusi, yang disebut-sebut berwenang menyelesaikan pelanggaran HAM di Tanah Papua, masih saling berdebat atau berdiskusi, menunjukkan dan menyakinkan proses itu tak berjalan dengan sinergis, dan sering berujung kebuntuan. Negara nampak jalan di tempat, sejumlah kasus hak asasi manusia tak berhasil dibawa ke meja pengadilan atau penegakan hukum.

Tahun 2018 sejarah kembali mencatat janji kosong Negara kepada rakyat Papua untuk penyelesaian kasus-kasus hak asasi manusia yang terjadi pada masa silam. Kasus tragedi berdarah di Wasior, Biak, dan tragedi lainnya, masih menjadi penghalang dan rintangan bagi Negara untuk membebaskan masyarakat Papua dari belenggu trauma dan penderitaan atas kemanusiaan.

Janji itu diungkapkan pada 2016, atas segala desakan, Negara Indonesia melalui Menteri Koordinator Politik, Pertahanan dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan berjanji akan menyelesaikan beberapa kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua dalam waktu enam bulan. Tim ini pernah dibentuk tetapi akhirnya 'hilang jejaknya' pada Mei 2016[126] dan belum membawa satu kasus pun dalam proses penyelesaian.

Lalu diskusi tentang tim penyelesaian pelanggaran HAM di Tanah Papua diungkapkan kembali oleh Pemerintah Jakarta pada 2018. Melalui Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Ifdhal Kasim menjelaskan bahwa terhambatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di Tanah Papua karena miskomunikasi. Menurut Ifdhal, sebaiknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI harus berkomunikasi dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi kekurangan bukti yang

126 Bdk. Aventinus Jenaru, OFM, dkk,"Papua Di Ambang Kehancuran: Beragam Peristiwa Fakta dan Hak Asasi Manusia di Papua 2016", Penerbit SKPKC Fransiskan Papua, 2017, Hlm. 97-99.

telah disampaikan oleh pihak kejaksaan.[127]

Penjelasan pihak Kantor Staf Kepresidenan itu diyakinkan oleh pihak Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan melalui Sekretaris Menko Polhukam Yoedhi Swastono. Menurut Swastono, Pemerintah Indonesia berkomitmen akan menyelesaikannya. Tetapi, ia menjelaskan bahwa Kemenko Polhukam tidak berwenang menekan Kejaksaan Agung untuk melanjutkan penyidikan atau pun menekan kepolisian agar kooperatif terhadap Komnas HAM terkait berkas-berkas informasi. Alasannya, kata Yoedhi, Kemenko Polhukam hanya bertugas sebagai koordinator mempertemukan semua pihak untuk berunding. Selebihnya, kata Yoedhi, tergantung masing-masing pihak mengkomunikasikan pengusutan kasus-kasus tersebut.[128]

Cerita seputar usaha menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua terkesan masih 'taputar' (berputar-putar) dari dulu sampai saat ini, seperti penyelesaian kasus Wasior Berdarah 13 Juni 2001. Menurut salah satu anggota Komnas HAM RI Amiruddin, Komnas HAM kesulitan mendapatkan sejumlah dokumen Wasior, contohnya dokumen kepolisian. Dokumen itu akan mudah didapat seandainya Kejaksaan Agung yang meminta. "Hal-hal yang diminta Jaksa Agung itu kan hal-hal yang kalau diminta penyidik akan bisa didapat dengan cepat. Kalau Jaksa Agung yang minta dokumen itu sebulan dua bulan pasti dikasih".[129]

Amiruddin menegaskan, tugas dan wewenang Komnas HAM hanyalah pada tahap penyelidikan. Pihak Komnas HAM RI hanya bertugas menetapkan apakah sebuah peristiwa terjadi atau tidak. Sementara bukti, pelaku, dan saksi adalah tahap penyidikan

---

127 Bdk.https://kbr.id/nasional/062018/penyelesaian_pelanggaran_ham_papua__ini_kata_istana/96357.html, diakses pada 14 Juni 2018

128 *Ibid*.,

129 Bdk.https://kbr.id/nasional/062018/penyelesaian_pelanggaran_ham_papua__seperti_merebus_batu/96358.html, diakses pada 14 Juni 2018.

ADIRA
Shoes
MENDESAK:

Aksi Diam pada tanggal 10 desember 2018 di Kota Jayapura. Dok. SKPKC FP

yang jadi tugas Kejaksaan Agung. Menurut Amiruddin, berkas-berkas terkait kasus Wasior sudah lengkap.

Persoalan 'taputar' terkait proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua tersebut, ditanggapi oleh salah satu pengacara senior dan pegiat HAM di Tanah Papua Yan Christian Warinussy. Menurut Warinussy, penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua seperti merebus batu. Bagi Warinussy, komitmen Kejaksaan Agung yang berwenang sebagai penyidik, tidak bisa dipercaya. Sedangkan, aturan perundang-undangan membatasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang melakukan penyelidikan kasus tersebut. Kasus ini tidak bisa selesai hanya dengan desakan dari dalam negeri.

"Saya kira mengharapkan kasus ini ke pengadilan HAM, menurut saya bagaikan merebus batu, sehingga kasus Wasior ini menurut kita harus dibawa ke level yang lebih tinggi. Perlu desakan lebih keras dari dunia internasional. Selain itu, Presiden Joko Widodo harus memberikan dukungan secara politis untuk menyelesaikan kasus Wasior berdarah," kata Yan Christian Warinussy.[130]

Di tingkatan politik lokal Papua, DPR Papua melalui Ketua DPR Papua Yunus Wonda ketika merayakan peringatan hari lahirnya Otonomi Khusus Papua yang ke-17, menjelaskan bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua merupakan kunci untuk mengobati 'luka' rakyat Papua. Yunus dengan jelas mengatakan bahwa dari sekian banyak kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua belum ada satu pun yang diselesaikan oleh pemerintah.[131]

Ketika kita merujuk pada janji Negara Indonesia melalui Presiden Joko Widodo pada Desember 2014 di Lapangan Mandala, Jayapura seharusnya sudah ada satu kasus pelanggaran HAM di

---

130 *Ibid.*,

131 Bdk.https://www.pasificpos.com/item/30496-dpr-papua-dorong-penyelesaian-masalah-ham, diakses pada Kamis, 22 November 2018.

Papua yang sudah bisa diselesaikan dengan jalur hukum formal yang berlaku. Yang dikehendaki oleh para korban, pegiat HAM adalah bukan pembayaran kerugian karena terkesan membayar nyawa, tetapi yang dikehendaki adalah penyelesaian melalui hukum atau mekanisme pengadilan HAM. Hal ini dimaksudkan agar mengurangi kesalahan yang sama dari pelaku dan korban mendapatkan keadilan. Proses hukum formal ini dijalankan dan barulah pergantian atau reparasi atau rekonsiliasi korban dan hak-haknya serta merta dilaksanakan.

"Rekonsiliasi yang dimaksudkan itu bukan hanya pada korban lagi, tetapi para pelaku pelanggaran HAM harus dihadirkan dan mengakuinya serta meminta maaf kepada korban. Selagi rekonsiliasi itu hanya untuk dan bagi korban itu berarti pihak korban tidak akan mau terlibat dan melaksanakannya".[132]

Para korban pelanggaran hak asasi manusia dan pegiat HAM terus menyuarakan kasus-kasus yang terjadi di Tanah Papua, yang sampai saat ini tak tersentuh oleh Negara. Kampanye 'Melawan lupa atau menolak lupa' terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu di Tanah Papua tak berhenti disuarakan. Para pihak mendesak Negara segera memiliki kemauan politik untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian hukum kasus-kasus pelanggaran di Tanah Papua, baik yang sedang terjadi saat ini maupun masa lalu. Desakan-desakan terhadap Negara ini dilakukan melalui berbagai forum diskusi, konferensi pers, aksi demonstrasi damai atau menyampaikan pendapat di muka umum.

Sepanjang tahun 2018, di setiap kali aksi demonstrasi, suara-suara mendesak proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua tak henti untuk disuarakan. Di dalam aksi menolak atau melawan lupa untuk kasus Biak Berdarah, 6 Juli

---

132 Pernyataan yang disampaikan oleh Pengacara Senior Papua dan juga anggota investigasi Kasus Mampenduma dan Wasior Iwan K. Niode dalam kegiatan Fokus Group Diskusi tentang Penyelesaian Pelanggaran HAM Wasior di Aula P3W, Padang Bulan, Kota Jayapura.

1998, korban dan solidaritas bersama pegiat HAM terus mendesak kepada Negara Indonesia untuk menyelesaikan kasus tersebut. Di Kota Biak, mereka yang menjadi korban, mengenang peristiwa kepahitan tersebut di bawah Tower atau menara yang terletak di kota Biak, tempat peristiwa pelanggaran HAM terjadi. Di Kota Jayapura, koalisi yang tergabung dalam aksi 'Melawan Lupa' melakukan konferensi pers di kantor Elsham Papua.[133]

Aksi "Melawan atau Menolak Lupa" juga dilakukan untuk kasus Wasior Berdarah 13 Juni 2001. Koalisi atau solidaritas yang tergabung dalam Solidaritas Organisasi Sipil (SOS) untuk Tanah Papua menggelar aksi kampanye 'Melawan atau Menolak Lupa' dengan photo ops dan konferensi pers. Kampanye dengan Photo Ops ini dilakukan juga di luar Kota Jayapura dan Papua seperti di Manokwari, Sorong dan Kalimantan Timur.[134] Tujuannya sama, yaitu mendesak Negara Indonesia untuk segera menyelesaikan segala kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua, khususnya Kasus Wasior Berdarah 13 Juni 2001. Aksi yang lain adalah merayakan Hari HAM 10 Desember. Pada 2018, aksi perayaan dilakukan di dalam dan luar Papua, dimanfaatkan untuk mendesak Negara Indonesia menyelesaikan kasus-kasus HAM di Tanah Papua.[135] Aksi perayaan ini diwarnai penangkapan dan tekanan dari aparat keamanan negara. Aksi perayaan ini tetap dilaksanakan di Kota Jayapura, Manokwari, Kota Sorong, Timika, Merauke.

Merujuk pada persoalan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, kita bisa berkesimpulan bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua masih tetap sebatas janji. Kasus penembakan yang terus merenggut nyawa orang asli Papua, khususnya anak muda Papua, pengekangan suara keadilan, penangkapan, teror dan intimidasi terhadap para pejuang keadilan

133 Lihat videonya di chanel, https://www.youtube.com/watch?v=n6L2U1QQ9xU&t=4s

134 Konferensi Pers oleh SOS untuk Tanah Papua dapat diakses di https://www.youtube.com/watch?v=-w9lCoWa-cc

135 Salah satu peringatan hari HAM 2018 diakses di https://www.youtube.com/watch?v=XwL-crOwsWLM

dan kebebasan oleh Negara Indonesia masih terus berjalan.

Keterlambatan penanganan kasus kesehatan di beberapa wilayah di Papua, perusakan hutan Papua karena investasi terus menambah daftar panjang penderitaan masyarakat Papua. Selain itu militerisasi yang terjadi di Tanah Papua, seperti membangun sejumlah markas militer, membangkitkan pesimisme dari masyarakat asli Papua terhadap niat baik Negara Indonesia untuk menyelesaikan segala pelanggaran HAM.

Pada tahun 2018, segala desakan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Tanah Papua juga datang dari lembaga PBB. Komisioner Tinggi urusan HAM PBB, Zeid Raad Al Hussein, mempertanyakan undangan dari pemerintah Indonesia untuk mengunjungi Papua yang hingga kini belum terwujud. "Di Indonesia, saya khawatir meski ada hubungan positif dengan otoritas, undangan pemerintah untuk kantor saya mengunjungi Papua, yang diberikan saat saya berkunjung pada Februari lalu, belum terpenuhi," ujar Zeid Raad Al Hussein dalam pernyataan pembukaannya pada pertemuan Dewan HAM PBB, seperti dilansir situs resmi OHCHR, Senin (18/6).[136]

Undangan itu memang diberikan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo, saat Zeid berkunjung ke Istana Kepresidenan pada Selasa, 6 Februari 2018.[137] Kekhawatiran Zeid itu juga menjadi kekhawatiran para korban pelanggaran HAM dan pegiat HAM di Tanah Papua. Apakah Pemerintah Indonesia bersedia dan memberikan kesempatan atau akses bagi PBB untuk menyelidiki segala 'kebusukan' yang tersimpan di Tanah Papua?

Upaya lain yang coba dibangun adalah melalui dialog. Dialog yang dibangun oleh Jaringan Damai Papua (JDP) yang sudah berjalan dari tahun 2011-2019 ini juga belum menemukan hasilnya.

---

136 Bdk. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180619083421-134-307182/komisioner-ham-pbb-pertanyakan-undangan-jokowi-ke-papua, diakses pada Rabu, 20 Juni 2018.

137 Bdk.https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180207144820-106-274563/pbb-akan-kirim-tim-pantau-ham-di-papua, diakses pada Kamis, 8 Februari 2018.

Pemerintah Indonesia masih terus berdalil bahwa dialog tidak seharusnya dilakukan. Dialog untuk mempertemukan pihak yang bertikai demi Papua Tanah Damai harus berhadapan dengan pro dan kontra baik itu di kalangan masyarakat Papua maupun antara Pemerintahan Indonesia dan elit Papua. Pada dua tahun terakhir, 2016–2018, dialog yang diinginkan terpaksa harus melalui 'jalan baru' yakni dialog sektoral.

REKOMENDASI

Pemerintah Indonesia; Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Pertahanan; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Membuka kembali dokumen-dokumen laporan penyelidikan kasus-kasus di Tanah Papua yang telah dinyatakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai pelanggaran HAM berat.
2. Menyatakan dan menerima secara terbuka dan obyektif adanya pelanggaran hak asasi manusia berat di Tanah Papua pada masa lampau dan masa kini.
3. Menemui para korban dan membuka dialog terbuka terhadap korban-korban pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu dan masa kini.
4. Mengubah pendekatan keamanan menjadi pendekatan kemanusiaan dalam penyelesaian konflik-konflik bersenjata dan menghadapi aksi-aksi demonstrasi masyarakat sipil di Tanah Papua.
5. Memenuhi janji Pemerintah Indonesia untuk memberikan kesempatan dan akses kepada Pelapor Khusus PBB Bidang Hak Asasi Manusia berkunjung ke Tanah Papua.
6. Mendorong dan mewujudkan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Tanah Papua.
7. Mendukung upaya-upaya dialog secara terbuka kepada para

pihak di Tanah Papua, tanpa mengesampingkan pihak-pihak yang memiliki keyakinan politik berbeda dengan Negara.

8. Menghentikan proyek-proyek militer, terkait pembangunan markas-markas militer di Tanah Papua karena berekses negatif bagi situasi hak asasi manusia.

Bab 8

PENUTUP

WAJAH PAPUA pada tahun 2018 memberikan gambaran kepada semua pihak untuk terus berbenah. Berusaha menyikapi segala dinamika yang terjadi dan mencari solusi untuk Papua Tanah Damai demi keadilan dan kebebasan martabat Manusia dan Tanah Papua, merupakan keharusan dan kewajiban bagi semua orang yang mendiami dan mencintai Tanah dan Manusia Papua.

Ulasan setiap peristiwa yang disertai dengan beberapa analisa serta tawaran resolusi yang tertuang di dalam buku ini merupakan salah satu usaha untuk merawat ingatan dari segala penderitaan, kesakitan serta menawarkan niat kebaikan demi Tanah dan Manusia yang adil dan bermartabat. Dimensi dari pelbagai persoalan Hak Asasi Manusia yang dialami oleh Tanah dan Manusia Papua memberikan gambaran kepada kita bahwa nilai-nilai keadilan, kebenaran dan kebebasan masih menjadi mimpi yang harus diperjuangkan lebih keras lagi.

Komitmen dan niat baik untuk membangun Papua ke arah yang lebih baik harus menjadi kesadaran bersama dari tingkatan masyarakat, dari akar rumput sampai kepada pihak pengambil kebijakan. Berani menerima kritik dan saran, mengakui segala keterbatasan serta bertindak menjadi nilai penting dalam memperbaiki wajah Hak Asasi Manusia di Tanah Papua. Tak perlu memandang siapa pun kita, perjuangan akan keadilan, kebenaran dan kesamaan martabat bagi setiap manusia adalah tugas bersama sebagai manusia sosial dan yang sederajat.

Kematian generasi penerus Papua di Kabupaten Asmat, Lany Jaya, Pegunungan Bintang karena pelayanan kesehatan yang kurang maksimal, kehilangan rumah dan segalanya, serta kematian karena konflik di Nduga, menjadi cermin bagi semua pihak untuk menilai keberpihakan kita terhadap mereka yang menderita dan korban dari ego dan kepentingan pihak-pihak tertentu. Kerusakan tanah dan alam Papua karena derasnya investasi, menjadi dasar refleksi bagi kita untuk terus berjuang melawan keinginan para elit yang rakus akan kekayaan Papua.

Negara dan elitnya semakin diam dan bahagia melihat segala penderitaan yang dialami oleh masyarakat kecil. Segala janji 'dihambur' demi menahan amukan kemarahan si penderita atau korban. Persoalan tidak akan berhenti, segala janji terus dibunyikan, niat baik disingkirkan, kematian dan kehancuran

terus dan selalu menjadi cerita indah yang tak terlupakan oleh para korban dan mereka yang kesakitan. Mari bersatu dan melawan segala kebobrokan dan kerakusan mereka yang menginginkan Tanah dan Manusia hancur.

KRONIK MEMORIA PASSIONIS 2018

1. KESEHATAN

13 Januari
Sebanyak 24 anak meninggal akibat kejadian luar biasa campak disertai gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua, dalam empat bulan terakhir. Jumlah korban bisa bertambah karena Pemerintah Kabupaten Asmat masih melakukan pendataan. (*Kompas*)

14 Januari
Kedua korban berakhir berusia 9 dan 12 bulan. Mereka meninggal pada hari Kamis dan Jumat akibat terserang campak dan terlambat mendatangi tempat layanan medis. Puluhan anak lainnya, yang menderita campak, belum mendapatkan penanganan medis yang optimal. Anggota Tim penanggulangan Kejadian Luar Biasa campak dan gizi buruk Distrik Pulsu Tiga Salvatoria Refra yang ditemui di kampung Atal, Sabtu (13/1) mengatakan ada sebanyak 28 anak yang menderita campak dan gizi buruk. (*Kompas*)

15 Januari

Pemerintah Kabupaten Asmat membentuk Tim terpadu umtuk terjun langsung ke 23 Distrik dan 224 kampung yang ada di Kabupaten Asmat, untuk menangani krisis kesehatan yang terjadi. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kabupaten Asmat, dr. Steven Langi, menyebutkan Tim terpadu yang diketahui oleh Bupati Asmat akan turun, Senin (15/1) untuk menjangkau 224 kampung. Masing-masing Tim sebanyak 3 orang. Tim tersebut akan dibantu oleh Puskesmas setempat. (*Cenderawasih Pos, Laporan Kesehatan Asmat 2018 oleh SKPKC FP, diakses di http://fransiskanpapua.org/2018/06/28/derita-dan-duka-asmat-tahun-2018/*).

Presiden Joko Widodo memerintahkan sebuah tim untuk segera ke Kabupaten Asmat, menyelesaikan masalah gizi kronis yang sejauh ini menimbulkan setidaknya 61 korban jiwa. Jokowi menyatakan bahwa pemerintah tidak berdiam diri terhadap kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk yang terjadi di wilayah paling timur Indonesia itu. "Kita sudah kirim tim beberapa hari lalu atau minggu lalu. Sudah mulai September masuk ke sana. Memang sudah kirim juga makanan tambahan," ucap Presiden kepada para jurnalis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Minggu (14/01) malam. Kepala Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat, Steven Langi mengatakan, pendataan empat tim terpadu penanggulangan campak dan gizi buruk mencatat setidaknya sudah 61 orang tewas. Dikutip *Kompas*, ia menyatakan 59 korban meninggal berasal dari tiga distrik: Fayit, Aswi, dan Pulau Tiga. Tiga korban lain meninggal di Rumah Sakit Agats, ibukota Kabupaten Asmat. (*http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42646288, diakses 16 Januari 2018*).

16 Januari

Jumlah korban meninggal akibat kejadian gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua tercatat 61 anak. Pemerintah Kabupaten menyiapkan imunisasi masal untuk semua kampung di Kabupaten akan dilaksanakan mulai, Senin (15/1). (*Kompas*)

Masalah kejadian luar biasa di Distrik Agats Kabupaten Asmat, Papua menyebabkan meninggalnya 59 anak (data dinkes Januari 2018) perhatian serius dari sejumlah pihak terkait. (*Cenderawasih Pos*)

17 Januari

Bantuan dari berbagai bidang mengalir ke pedalaman Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, lokasi terjadinya kejadian luar biasa campak dan gizi buruk. Bantuan itu datang, antara lain, dari kementerian sosial, Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Pemerintah Kota Surabaya dan TNI. Bantuan Kemensos yang berupa paket-lauk pauk telah dikirim dari Jakarta pada minggu (14/1) mlm WIB, dan sebagian tiba di Asmat, Senin (15/1) malam WIT. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Herry Hikmat, mengatakan, paket lauk pauk itu berupa16. 000 kaleng makanan siap saji senilai Rp 724.165.200. (*Kompas*)

18 Januari

Persediaan obat untuk menangani komplikasi penyakit para pasien campak dan gizi buruk di Rumah Sakit Agats, Kabupaten Asmat menipis. Penyakit tersebut antara lain tuberculosis, malaria dan radang paru. Persediaan obat untuk radang paru dan malaria menipis, termasuk cairan tuberculin untuk tes tuberculosis. Wabah campak dan gizi buruk sejak Oktober 2017 sampai rabu (17/1) telah merengut 67 nyawa anak-anak. (*Kompas*)

22 Januari

Menteri Sosial, idrus Marham, Sabtu (20/1) melakukan kunjungan ke Kabupaten Asmat, untuk memantau kondisi masyarakat yang sedang mengalami bencana kesehatan; puluhan anak mengalami gizi buruk dan campak. Ia mengungkapkan kepada wartawan di terminal Perintis Bandara Moses Kilangin usai kunjungannya dari Asmat, total 67 anak meninggal dunia sejak September 2017 hingga Januari 2018. (*Cenderawasih Pos*)

Serangan campak dan gizi buruk menyebar Kabupaten Asmat serupa terjadi di Kabupaten Pegunungan Bintang. Sekitar 27 jiwa sudah menjadi korban. Mereka meninggal dunia lantaran tidak kuasa menahan sakit. (*Cenderawasih Pos*)

24 Januari

Sebanyak 27 orang meninggal di Kampung Pedam, Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, akibat gizi buruk. (*Cenderawasih Pos*)

25 Januari

Tim Terpadu Penanggulangan KLB Asmat yang melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat, Kementerian Kesehatan, TNI, dan Polri terus bekerja menyisir kampung terisolir di 19 distrik di Kabupaten Asmat. Komandan Satgas Kesehatan TNI KLB Asmat, Brigjen TNI Asep Setia Gunawan mengatakan, 8 tim satgas terpadu sudah melakukan pemeriksaan di 117 kampung dari 19 distrik di Kabupaten Asmat, sejak pekan lalu. Dari 117 kampung, sebanyak 12.398 anak diperiksa. “Dari 12.398 anak, ditemukan 646 anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk. Selain itu ditemukan 25 anak suspect campak dan 4 anak yang terkena campak dan gizi buruk,” kata Asep dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/1/2018).

Komandan Korem 174/ATW Merauke ini menjelaskan, jumlah anak yang meninggal akibat wabah campak dan gizi buruk sejak September 2017 hingga 24 Januari 2018 tercatat 70 orang. Dari 70 korban meninggal, 65 anak meninggal akibat gizi buruk, 4 anak karena campak, dan 1 orang karena tetanus. Pasien terakhir yang meninggal bernama Musa Amkai (6), warga Distrik Der Koumur yang meninggal di RSUD akibat campak. "Data di Posko Induk Penanggulangan KLB Asmat di Agats disebutkan, 37 anak meninggal di Distrik Pulau Tiga, 15 anak di Distrik Fayit, 8 anak di Distrik Aswi, 4 anak di Distrik Akat dan 6 lainnya meninggal di RSUD Agats," kata Asep. Dari 8 tim yang diberangkatkan sepekan lalu, 7 tim sudah kembali ke Agats. Tim 6 yang berada di Distrik Suru Suru dan Unir Sirow masih melakukan pelayanan kesehatan di kampung-kampung.
(*https://regional.kompas.com/read/2018/01/25/14070311/satgas-terpadu-klb-asmat-temukan-646-kasus-campak-dan-144-gizi-buruk, diakses 26 Januari 2018, Laporan SKP Agats tentang KLB Asmat 2018*).

26 Januari

Gubernur Papua Lukas Enembe menyarankan kepada Pemerintah agar di lokasi pedalaman seperti Asmat dibangun distrik untuk mempermudah pemerintah memantau kesehatan warga. Jumlah anak yang meninggal akibat wabah campak dan gizi buruk sejak September 2017 hingga Rabu (24/1) Januari tercatat sebanyak 70 orang.

Komandan Satgas Kesehatan TNI KLB Asmat Brigjen TNI Asep Setia Gunawan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/1/2018) melalui rilis yang dikirim Penerangan Kodam XVII/Cendrawasih mengatakan, tim kesehatan terpadu sudah memeriksa 12.398 anak di Asmat. Asep menjelaskan, dari 12.398 anak yang mendapat

pelayanan kesehatan, ditemukan 646 anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk. Selain itu, ditemukan pula 25 anak suspek campak dan empat anak yang terkena campak dan gizi buruk. Dari 70 korban meninggal itu, 65 anak meninggal akibat gizi buruk, empat anak karena campak dan satu orang karena tetanus.

Data di Posko Induk Penanggulangan kejadian Luar Biasa (KLB) Asmat di Agats menyebutkan 37 anak meninggal di Distrik Pulau Tiga, 15 anak di Distrik Fayit, delapan anak di Distrik Aswi, empat anak di Distrik Akat dan enam lainnya meninggal di RSUD Agats. Gubernur Papua Lukas Enembe di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (25/1) menjelaskan, ketersediaan petugas kesehatan di masing-masing kabupaten di Papua sangat minim. Menurut Lukas masing-masing distrik seperti wilayah Asmat memiliki tenaga dokter spesialis hanya satu orang. (*https://www.voaindonesia.com/a/sedikitnya-70-orang-meninggal-di-asmat-akibat-gizi-buruk-dan-campak/4226320.html, diakses pada 27 Januari 2018*).

28 Januari

Pemerintah Kabupaten Asmat akan melakukan validasi data jumlah korban meninggal akibat KLB campak dan gizi buruk di daerah tersebut. Sampai saat ini, korban meninggal akibat campak dan gizi buruk sudah mencapai 70 orang. Perinciannya, yakni terdapat 66 orang meninggal akibat penyakit campak, sedangkan empat orang gizi buruk. Bupati Asmat, Elisa Kambu mengatakan bahwa pihaknya belum bisa memastikan bahwa semua akibat penyakit campak dan gizi buruk. "Tujuh puluh orang itu campak ada 66, sisanya gizi buruk. Tapi angka 66 orang yang meninggal dunia itu, kami belum bisa di pastikan bahwa itu campak, karena ini akumulasi dari bulan September 2017 sampai Januari 2018," kata Elisa Kambu, akhir pekan ini. Elisa Kambu juga menyebut bahwa pihaknya belum mengetahui secara detail

data korban yang meninggal dunia. (*https://regional.kompas.com/read/2018/01/28/21054241/pemkab-asmat-akan-validasi-data-korban-klb, diakses pada Selasa, 30 Januari 2018*).

30 Januari

Menteri Sosial RI Idrus Marham mengungkapkan bahwa pemerintah pusat akan mendampingi pengelolaan dana otonomi khusus Papua pasca KLB gizi buruk dan penyakit campak, khususnya yang terjadi di Asmat. Menurut Idrus, rencana itu muncul dalam rapat koordinasi antar kementerian di Kemenko PMK untuk menanggulangi persoalan tersebut. "Dari pikiran yang ada dalam rapat, ada pikiran supaya ada pendampingan pengelolaan pemerintahan dan pendampingan pelaksanaan program-program secara profesional," ujar Idrus dalam rapat kerja dengan Komisi VIII di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Idrus juga mengungkapkan bahwa ada banyak evaluasi dari pemerintah pusat terkait pemanfaatan dana Otsus Papua yang cukup besar. "Ada banyak evaluasi tentang pemanfaatan dana otsus yang cukup besar. Itu terakhir kalau enggak salah ada 8 triliun, dengan rincian untuk Papua 5 triliun dan Papua Barat 2 triliun," kata Idrus.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengkaji ulang dana otonomi khusus Papua. Menurut Bambang besarnya dana Otsus dari pusat saat ini tidak berbanding lurus dengan kondisi masyarakat Papua. Bambang menuturkan, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana otsus Papua 8 triliun. Dana tersebut dibagi menjadi dua yakni sebesar Rp 5,6 triliun untuk Papua dan 2,4 triliun untuk Papua Barat. Meski demikian, Bambang melihat pemerintah daerah belum mampu mengelola dana otsus untuk memenuhi pemerataan pembangunan fasilitas yang layak bagi masyarakat. Hal ini juga terlihat dari persoalan

buruknya kesehatan masyarakat Papua yang kerap berulang. (*https://nasional.kompas.com/read/2018/01/30/16431541/klb-gizi-buruk-asmat-pemerintah-awasi-pengelolaan-dana-otsus-papua, diakses 5 Juni 2018*).

31 Januari

Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek mengatakan 71 orang meninggal akibat wabah campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat. "Update data, yang meninggal kurang lebih 71 orang," kata Nila seusai rapat terbatas mengenai penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Asmat, Papua, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (31/1/2018). Dari kejadian ini, pihaknya sudah melakukan imunisasi terhadap sekitar 13.300 anak di Asmat. Namun, masih ada sejumlah distrik yang belum dapat dijangkau timnya karena kendala geografis.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Muhammad Subuh mengatakan, dari 71 orang yang meninggal tersebut, kebanyakan adalah anak balita. Kasus penyebab kematian apakah dari gizi buruk atau campak, menurut dia, tidak bisa ditentukan secara pasti. Namun, kata dia, penyakit campak komplikasi beratnya adalah infeksi pada saluran pernapasan bagian bawah, yang dapat menyebabkan gagal napas, gagal jantung, sehingga akhirnya meninggal.
(*https://nasional.kompas.com/read/2018/01/31/15410691/menkes-71-orang-meninggal-dalam-kasus-gizi-buruk-dan-campak-di-asmat, diakses pada Kamis, 1 Februari 2018*).

Krisis kesehatan berupa gizi buruk dan campak di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, telah menyebabkan 71 anak meninggal dunia dan sedikitnya 800 orang dirawat di rumah sakit. Berdasar laporan wartawan, Heyder Affan, anak-anak yang terserang

campak dan gizi buruk di kabupaten tersebut masih dapat dijumpai di Rumah Sakit Umum Daerah (RUD) Agats, Rabu (31/01) dini hari. "Gizi buruk ada 21 pasien, campaknya ada lima pasien," ungkap Richard Rumbino, pimpinan RSUD Agats, satu-satunya rumah sakit di wilayah Asmat. Dari 71 anak yang meninggal dunia, 66 di antara mereka meninggal karena penyakit campak dan lima anak meninggal dunia karena gizi buruk. Adapun wilayah yang paling banyak jatuh korban adalah Distrik Pulau Tiga, yang mencapai 37 jiwa. Uskup Aloysius Murwito dari Keuskupan Agats-Asmat menceritakan pengalamannya berhadapan dengan anak-anak dengan kondisi minim gizi di wilayah tersebut. Tim keuskupan Agats menemukan situasi ini saat kegiatan pelayanan Natal pada 2017 di Kampung As dan Kampung Atat, Distrik Pulau Tiga. Menurutnya, kondisi anak-anak sangat memprihatikan dengan kondisi fisik yang sangat kurus. "Di kampung As (dan) Atat saya menyaksikan anak-anak yang kurang gizi banyak, kurus-kurus," tambahnya.(*http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42872190, diakses 1 Februari 2018*).

2-3 Februari

Satuan tugas kesehatan TNI telah memvaksin sebanyak 33.336 anak terdampak wabah campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat. Belasan ribu anak dan balita dari 224 kampung sudah dilayani satgas kesehatan TNI melalui pengobatan. Kata Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kunjungan ke Asmat. (Koran Jubi)

5-6 Februari

Tim kesehatan terpadu kembali menerima pasien baru gizi buruk dan campak dari Kabupaten Asmat. Sebanyak enam pasien yang masih Balita tersebut dirawat di Rumah Sakit Asmat, Agats, Sabtu (3/2). (*Koran Jubi*)

6 Februari

Bupati Asmat Elisa Kambu resmi mencabut status Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak dan gizi buruk di wilayahnya. Atas rujukan tersebut, dalam surat pencabutan status KLB Bupati Elisa menyebutkan tidak ditemukan kasus baru di Asmat. "Tidak terjadi penurunan temuan penderita campak oleh tim Satgas (TNI, Polri, Kemenkes, dan PB IDI) dan bahkan hampir diseluruh wilayah tidak ditemukan kasus baru. Apabila ditemukan kasus baru dan tidak termasuk kriteria KLB maka hal ini adalah kondisi normal yang didapati Puskesmas dan tertangani," ujar Elia. (*https://news.okezone.com/read/2018/02/06/340/1855275/bupati-asmat-cabut-status-klb-campak-gizi-buruk-di-wilayahnya, diakses 7 Februari 2018*).

Uskup Keuskupan Agats-Asmat, Mgr. Aloysius Murwito, OFM, mengatakan kondisi Asmat pasca KLB campak dan gizi buruk berangsur-angsur pulih. Uskup Aloy mengungkapkan sebanyak tujuh puluh lima persen korban KLB campak dan gizi buruk sudah keluar dari rumah sakit. "Ya meski masih ada satu dua orang yang masih ditangani, tapi semua sudah bergerak menuju kembali normal," ungkap Aloy saat diwawancarai Liputan6.com, Senin (5/2/2018). Kabar terbaru yang diterima bahwa tiga anak dari Distrik Pulau Tiga dibawa ke rumah sakit. Pihak Keuskupan Agats-Asmat masih terus melakukan penanganan pada korban KLB campak dan gizi buruk. Penanganan tersebut dikoordinasi oleh pastor-pastor di lapangan. (*https://www.liputan6.com/health/read/3259829/tujuh-puluh-lima-persen-korban-klb-di-asmat-sudah-pulang-ke-rumah, diakses 7 Februari 2018*).

28 Februari

Wabah campak dan gizi buruk yang dialami anak-anak Asmat sejak September 2017 mulai menunjukkan perkembangan positif sejak

ditangani secara intens pada Januari 2018. Masa darurat KLB juga sudah ditutup sejak 5 Februari 2018 melalui SK Bupati Asmat; Elisa Jambu S.Sos. Menindaklanjuti penanganan musibah kemanusian ini, Gereja Katolik Asmat atau Keuskupan Agats bekerja sama dengan Wahana Visi Indonesia dan mitra lain terus melaksanakan program pemulihan kesehatan di lebih dari 15 kampung yang menjadi fokus dampingan. "Sejak masa darurat lalu Keuskupan Agats hanya berkosentrasi di 2 distrik karena keterbatasan tenaga namun setelah ada temuan baru, maka kami sedang mengatur strategi untuk sebisa mungkin melayani di distrik Sirets dan Fayit," kata Pastor Hendrik Hada Pr. Gereja Katolik Asmat bersama mitra dan dalam koordinasi dengan Pemkab Asmat melaksanakan program terpadu guna meningkatkan kesehatan masyarakat yang terkena wabah campak dan gizi buruk (*https://www.liputan6.com/health/read/3330030/upaya-gereja-katolik-asmat-pulihkan-warga-dari-wabah-campak-dan-gizi-buruk, diakses Kamis, 1 Maret 2018*).

12 Maret

Kabupaten Mimika menjadi salah satu Kabupaten dengan angka Kasus HIV-AIDS tertinggi di Papua. Ini dibuktikan dengan banyaknya kasus baru selama lima tahun terakhir, bahkan dalam satu tahun, rata-rata ditemukan 400 kasus baru HIV-AIDS. Hal ini dikatakan oleh salah satu karyawan dari Yapeda Mimika, Pater Lambertus Hendrikus Hagendrom, OFM, di Kantor Yapeda di Jalan Busiri Mimika, Minggu (11/3). (*Cenderawasih Pos*)

21 Maret

Wabah penyakit demam berdarah dilaporkan masih menyerang Kabupaten Pemekaran Kabupaten Yalimo. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencagah penyebaran penyakit, Selasa (20/3). (*Cenderawasih Pos*)

3 & 6 April

Nasib menimpa Berni Fellery Kunu (24), seorang perawat dari misionaris Kristen Advent yang melakukan tugas pelayanan di daerah pedalaman dibunuh orang tidak dikenal, di Kampung Yabosorom, Distrik Pamek, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kamis (29/3). (*Cenderawasih Pos*)

9 April

Warga tiga Distrik Dall, Yigi, dan Nirkuri di Kabupaten Nduga meninggal dunia karena terserang penyakit yang belum diketahui. Wakil Ketua 1 DPRD Nduga, Alimi Gwijangge mengakui telah melakukan kunjungan ke tiga distrik tersebut. Jumlah masyarakat yang meninggal dari Februari sampai April sebanyak 18 orang, diantaranya anak-anak. Sementara di Distrik Nirkuri ada dua orang meninggal dunia dengan penyakit yang belum diketahui. Tidak ada petugas kesehatan di tiga Distrik ini. Hal ini dikatakannya pada Sabtu (7/4). (*Cenderawasih Pos*)

12 April

Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, pasca Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan gizi buruk berjalan dengan baik. Jokowi yakin pembangunan infrastruktur tersebut mampu menyelesaikan persoalan gizi buruk di Asmat. Peninjauan tersebut dilakukan Jokowi di kawasan Agats, Kabupaten Asmat, Kamis (12/4). Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Asmat tersebut meliputi pembangunan jangka pendek maupun menengah mulai dari infrastruktur air bersih, sanitasi, jembatan, perbaikan jalan kampung, bedah rumah, dan pembangunan pemukiman baru. "Saya lihat tadi semuanya, semuanya berjalan dengan baik. Kita juga membangun tampungan

untuk air baku ada sembilan yang lima di Agats kemudian yang empat dibangun di distrik-distrik yang ada," ujar Jokowi dalam keterangan tertulis yang disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Kamis (12/4/2018). Tentang gizi anak-anak, Jokowi menyampaikan dirinya telah memerintahkan Bupati Asmat untuk benar-benar memperhatikan gizi anak-anak di Kabupaten Asmat. Saat ini, kata Jokowi, ada 320 anak setiap hari diberikan kacang hijau, sayur dan makanan bergizi lainnya. Namun yang ada di distrik-distrik penanganannya tidak mudah. (https://news.detik.com/berita/d-3968925/jokowi-yakin-pembangunan-infrastruktur-asmat-tuntaskan-gizi-buruk, diakses 13 April 2018).

20 April

Pelapor khusus untuk Hak Pangan PBB Hilal Elver memberikan perhatian khusus pada kasus kematian puluhan anak di Kabupaten Asmat yang terjadi pada bulan Februari lalu. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di Jakarta Rabu (18/4/2018) untuk menyampaikan pengamatan awalnya pada kondisi hak pangan di Indonesia selama kunjungannya ke Indonesia 9-18 April 2018. "Kematian mereka dapat dicegah, tetapi hal itu dibiarkan terjadi," ungkap Hilal memberikan pandangannya tentang kasus kematian anak di Asmat. Ia menyebutkan selama beberapa bulan terakhir, 72 anak telah meninggal di Kabupaten Asmat di Papua: 66 anak meninggal akibat campak dan 6 anak sebagai akibat langsung dari gizi buruk. Kematian mereka disebabkan oleh beberapa faktor termasuk masalah kerawanan pangan yang kronis dan kurangnya akses pada layanan kesehatan yang layak.
(http://tabloidjubi.com/artikel-15589-pbb--papua-adalah-contoh-luar-biasa-darurat-pangan-saat-ini.html, diakses pada Senin, 23 April 2018).

28 Juni

Pejabat Gubernur Papua Soedarmo mengakui masih banyak persoalan di RSUD Dok II yang belum terselesaikan, diantaranya adalah pengadaan obat-obatan yang masih dilakukan secara parsial (perbagian) sehingga sering terjadi kekurangan obat, masalah air bersih yang terhambat karena kebocoran, serta kebersihan rumah sakit dan perbaikan sarana dan prasarana RSUD dimana hal ini perlu melibatkan provinsi. (*Cenderawasih Pos*)

2 Agustus

Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya mengklaim ada 528 warga di Jayawijaya yang teridentifikasi Tuberculosis (TB) atau 0,4 persen dari jumlah penduduk di Jayawijaya. Terkait dengan itu, pemerintah melihat perlu dilakukan aksi daerah dalam mengkampanyekan TB kepada masyarakat. (*Cenderawasih Pos*)

21 Agustus

Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, terlebih khusus terkait kondisi standar pelayanan RSUD Jayapura yang dinilai mengalami sejumlah persoalan, DPR Papua bersama Komnas HAM Perwakilan Papua meninjau langsung pelayanan kesehatan di RSUD Jayapura, Senin (20/8). (*Cenderawasih Pos*)

23 Agustus

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Jayawijaya mengklaim, hingga saat ini penyebaran kasus HIV-AIDS di Wamena mulai menurun apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang setiap pendataan 3 bulanan selalu ada peningkatan untuk kasus baru, namun secara kolektif kasus HIV-AIDS di Jayawijaya mencapai 5000 kasus. (*Cenderawasih Pos*)

Berkaitan dengan kondisi RSUD Jayapura yang dinilai tengah darurat usai dilakukannya inspeksi mendadak, Komisi V DPR Papua dengan sigap menginisiasi dilakukannya rapat koordinasi antara DPR Papua dan Pemerintah Provinsi Papua. Rapat Koordinasi ini dilakukan di Ruang Banggar DPR Papua, Selasa (21/8). (*Cenderawasih Pos*)

27 Agustus

Pelayanan kesehatan di RSUD Jayapura beberapa waktu belakangan ini benar-benar menjadi perhatian publik di Papua. Berbagai pihak merespon kondisi rumah sakit ini dengan melakukan tinjauan langsung, begitu pun yang dilakukan Pimpinan DPR Papua kemarin. Ketua DPRP Yunus Wonda bersama Ketua Komisi V DPR Papua, Yan P. Mandenas meninjau langsung ke Rumah RSUD Dok II Jayapura untuk melihat langsung dan mendengar penjelasan tentang dari pihak rumah sakit. Hal yang paling menonjol dari hasil kunjungan ini, diketahui bahwa saat ini utang RSUD Jayapura mencapai 179 miliar. Dari jumlah itu, sebesar 159 miliar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Papua. (*Cenderawasih Pos*)

3 September

Dinas Kesehatan Provinsi Papua menyatakan jumlah temuan kasus baru HIV-AIDS periode Januari-Juni 2018 yang dilaporkan dari semua layanan di wilayah itu mencapai 2.003 kasus. Artinya, dalam satu hari, ada 11 orang Papua terinfeksi HIV. Kepala Seksi HIV-ADS dan IMS Dinkes Papua, dr Rindang Pribadi Marahaba, kepada Antara di Timika, Minggu (2/9), mengatakan, epidemi kasus HIV-AIDS di Papua membutuhkan penanganan bersama lebih serius dengan melibatkan semua komponen masyarakat. (*Koran Jubi*).

4 September

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua Barat, Otto Parorrongan mengatakan, penderita kasus HIV/AIDS di wilayah tersebut sepanjang 1999 hingga 2018 mencapai 7.200 kasus. Dinas Kesehatan Papua Barat bersama Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga sosial lainnya sangat berperan aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat guna mengenai penyakit mematikan ini. (*Harian Papua*)

Dinas Kesehatan Provinsi Papua menyatakan delapan kabupaten di Provinsi Papua memiliki angka Annual Parasit Incidence (API) atau jumlah kasus per tahun yang cukup tinggi. "Angka API malarianya lebih dari 100 per 1.000 penduduk," kata Kepala Seksi AIDS, TB, dan Malaria Dinkes Papua, dr Beeri Wopari, di Jayapura, Senin (3/9). Beeri mengatakan delapan kabupaten tersebut yakni Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Boven Digoel, Kepulauan Yapen, Mimika, Asmat, dan Kabupaten Mamberamo Raya. (K*oran Jubi*)

5 September

Tim Dinas Kesehatan Provinsi Papua menemukan empat kasus frambusia dan tiga kasus filariasis/kaki gajah di dua kampung berbeda di Kabupaten Asmat dan Yahukimo. "Kasus frambusia dan filariasis ditemukan sewaktu tim bersama salah satu penginjil di Kampung Korowai Batu, Kabupaten Boven Digoel, melakukan pelayanan imunisasi di lima kampung yang sebagiannya berada di Kabupaten Yahukimo, Asmat, dan Kabupaten Boven Digoel, pada 28 Agustus 2018," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Papua, dr Aaron Rumainum, di Jayapura, Rabu (5/9). (*Koran Jubi*)

22 September

Dinas Kesehatan Provinsi Papua akhirnya merilis hasil capaian Imunisasi MRP (Measles, Rubella dan Polio) hingga 20 September 2018. Dari 28 kabupaten dan 1 kota pencapaian secara umum telah mencapai ternyata hasilnya belum mencapai target. Hasil pencapaian secara umum untuk imunisasi campak dan rubella hingga 20 September kemarin mencapai 52,9 %. Sedangkan untuk polio 47.8 %. Papua sendiri secara nasional berada pada urutan 13 dari 28 provinsi. Lalu dari 28 kabupaten ini tercatat Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Nduga dan Kabupaten Puncak Jaya yang menepati posisi paling bawah. (*Cenderawasih Pos*)

24 September

Sesuai data Kementerian Kesehatan, hingga kini terdapat tiga provinsi dengan jumlah kasus malaria tertinggi di Indonesia yaitu Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Jumlah kasus malaria di tiga provinsi itu, disebut masih sangat tinggi dengan angka Annual Paracit Insident (API) atau kasus kesakitan malaria di atas lima kasus per 1.000 penduduk. (*Koran Jubi*)

Kepala Dinkes Papua, drg. Aloysius Giyai mengungkapkan mulai melakukan sejumlah langkah strategis untuk meminimalisir masuknya penyakit Polio ke Papua yang berasal dari Papua Nugini (PNG). Hal tersebut dilakukan setelah adanya pertemuan antara Dinkes Papua dan Dinkes Papua Nugini. (*Koran Jubi*)

2. PENDIDIKAN

9 Maret

Mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura melakukan protes terkait MoU yang dilakukan Polda Papua dan Uncen. Sekitar 50 mahasiswa Uncen dari beberapa jurusan, Kamis

(8/3) melakukan pemalangan pintu masuk Kampus Uncen di Waena. Aksi dimulai sekitar pukul 09.00 Wit sampai 14.00 Wit. (*Cenderawasih Pos*)

10 April

Mahasiswa dan masyarakat pemohon proposal bantuan pendidikan kembali menggelar aksi di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (9/4). Mereka mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat segera memproses pencairan dana bantuan pendidikan bagi propsal yang sudah disetujui. Pada aksi sebelumnya, Jumat (6/4), diwarnai pelemparan dan perusakan Kantor Gubernur dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Papua Barat. (*Cenderawasih Pos*)

13-14 Juni

Sekitar lima puluhan guru honorer di Kabupaten Mimika, Papua, memblokade jalan Cenderawasih depan Kantor DPRD Kabupaten Mimika, Senin, 11 Juni 2018 terkait insentif mereka yang belum dibayarkan selama 18 bulan. Aksi blokade jalan dengan batu, dahan kayu, dan ban bekas yang dibakar dimulai sekitar pukul 10.45 Wit. (*Koran Jubi*)

25-26 Juni

Sekelompok massa merusak kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Provinsi Papua di Timika pada, 22 Juni 2018. Peristiwa ini berawal dari aksi seratusan guru honorer Mimika yang mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika terkait insentif mereka yang belum dibayarkan selama enam bulan, dari Januari 2017 hingga Juni 2018. (*Koran Jubi*)

Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Deiyai (FKM-KD) yang berada di Kabupaten Jayapura, mengancam akan memalang Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Deiyai.

Ketua FKM-KD Kota Jayapura Lambertus Pekei mengatakan, hal itu sebagai bentuk kekecewaan mereka karena pembangunan asrama mahasiswa oleh Pemda Deiyai tidak selesai. (Koran Jubi)

2-3 Juli

Berbagai permasalahan tentang pendidikan yang terus terjadi di Kabupaten Boven Digoel mendorong mahasiswa dan mahasiswi angkat bicara. Mahasiswa-Mahasiswi Boven Digoel (IMADI) dan Ikatan Alumni Sekolah Menengah Atas (SMA) Hoeboer Mindiptana menilai Pemkab Boven Digoel harus mengambil langkah tegas untuk menindak guru yang sering meninggalkan tugasnya. (*Koran Jubi*)

13 Juli

Sebanyak 100-an massa mendatangi gedung DPRD Biak Numfor, Kamis(12/7). Massa yang merupakan gabungan pengusaha, guru kontrak, dan perwakilan kepala kampung melakukan Long March ke Kantor Bupati Biak Numfor. Massa secara bergantian melakukan orasi membawa sejumlah pamflet dan spanduk yang isinya menuntut pembayaran honor guru kontrak tahun 2017, pembayaran proyek tahun 2017 dan pencairan dana prospek 2017. (*Cenderawasih Pos*)

23-24 Juli

Masyarakat Kabupaten Wondama yang tinggal di daerah terpencil yakni Distrik Nikiwar, mengeluhkan betapa buruknya pelayanan pendidikan. Aktivitas belajar mengajar sekolah-sekolah di daerah perbatasan Teluk Wondama dan Teluk Bintuni ini sering libur lantaran para guru sering tidak berada di tempat. (*Koran Jubi*)

1 Agustus

Beberapa guru dan staf Tata Usaha (TU) di SMPN 1 Jayapura, melakukan aksi unjuk rasa yang ditujukan kepada Kepala SMPN 1 Jayapura Alex Deu karena dianggap tidak transparan dalam penggunaan keuangan di sekolah. Aksi protes dengan membentangkan spanduk, dilakukan di sekolah pagi hari, saat dilaksanakannya Proses Kegiatan Belajar Mengajar. (*CeposOnline*)

Proses belajar mengajar di SD Negeri Inpres Dobonsolo sejak pekan lalu hingga kini belum berjalan normal karena ada pemalangan dari para pemilik lokasi sekolah tersebut. Semenjak kejadian tersebut, para siswa maupun guru tidak dapat beraktivitas seperti biasanya, bukan hanya siswa/i sekolah dasar saja, tetapi berimbas juga kepada para murid TK Dobonsolo yang juga berlokasi di area tersebut. (*CeposOnline*)

10-11 Agustus

Krisis guru masih menjadi kendala utama pendidikan di Kabupaten Teluk Wondama. Ketimpangan kebutuhan guru dengan jumlah siswa ini telah berlangsung cukup lama. (*Koran Jubi*)

30 Agustus

Persoalan penyitaan 24 tas noken bercorak Bintang Kejora, termasuk empat anggota BEM Stikom Muhammadiyah, terkait aktifitas PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru) yang dianggap menyalahi aturan, Rabu (29/8) dianggap selesai. Meski sempat diwarnai dengan aksi protes bahkan memalang kampus. Pihak kampus dan mahasiswa sepakat menganggap ada miss komunikasi dari kejadian tersebut, kemudian pihak BEM membuka palang dan menyelesaikan dengan cara diskusi. (*Cenderawasih Pos*)

7-8 September
Pemerintahan Lukas Enembe dan Klemen Tinal memfokuskan pembangunan pendidikan di Papua dalam lima tahun ke depan. Hal itu untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia yang selama ini masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan provinsi lain. (*Koran Jubi*)

3. SUMBER DAYA ALAM, HAK ULAYAT DAN INVESTASI

6 Januari
Kepala Badan Penanam Modal dan Perizinan Terpadu satu pintu Kabupaten Keerom Barnabas terkait hak-hak masyarakat dan pembayaran ke pemerintah. (*Cenderawasih Pos*)

14-15 Februari
Masyarakat adat menolak pembabatan hutan atau kawasan keramat untuk kepentingan pembangunan PLTA di Kali Kao di Boven Digoel. Koordinator Forpa Agustinus Binjap, Selasa (13/2) mengatakan, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dan PT Aditya telah berencana membangun bendungan untuk PLTA Sungai Kao, Distrik Waropko dan Ambatkwi. (*Koran Jubi*)

21-22 Februari
Provinsi Papua Barat menjadi incaran perusahaan sawit besar-besaran dari dalam dan luar negeri. Beberapa perusahaan terus melakukan ekspansi di wilayah ini. Salah satu perusahaan perkebunan nasional adalah Medco Agro, anak usaha dari Medko Grup. (*Cenderawasih Pos*)

Perusahaan Nendali City diduga membabat hutan sagu di Kampung Nendali dan Nolokla, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, kawasan tersebut kini menjadi gersang dan tertimbun dengan pasir, Senin (19/2). (*Koran Jubi*)

26-27 Februari

Masyarakat adat suku Yerisiam Gua, menagih janji Pansus DPRD Nabire yang berjanji untuk mengusut sengketa perkebunan sawit. Tercatat Pansus sawit dibentuk oleh DPRD Nabire tahun 2016 silam, setelah mendapat dorongan dari masyarakat adat yang merasa dirugikan dengan kehadiran PT Nabire Baru. Perusahaan tersebut merusak tatanan masyarakat adat, menebang pohon, membongkar dusun sagu keramat dan menghilangkan mata pencaharian masyarakat adat suku Yerisiam Gua. Hal ini dikatakan oleh Kepala Suku Yerisiam Gua, Daniel Yarawobi, Jumat (23/2). (*Koran Jubi*)

28 Februari

Awal tahun ini beberapa foto aksi penambangan emas di Korowai menjadi viral di media sosial. Foto-foto itu seperti foto-foto aktifitas pembangunan landasan helikopter untuk bongkar muat logistik penambang. Aktivitas dalam foto-foto tersebut diambil dekat Kepala Sungai Deiram. (*Koran Jubi*)

Perusahaan dari Jakarta bernama PT Abhisa Bumi Persada bergerak pada bidang pertambangan, berencana berivenstasi dalam bidang penambangan emas di wilayah Distrik Naikere, Kuri, Wamesa, dan Raise, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. Perusahaan tersebut akan beroperasi selama 15 tahun, dengan luas area lebih dari 23.000 hektar, yang tersebar di tiga distrik. Belum lama ini perusahaan itu mensosialisasi analisa dampak lingkungan (Amdal) atas rencana eksploitasi. Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Pertahanan Lingkungan Hidup dan Pertahanan Provinsi Papua Barat Rumbino, di Manokwari, Senin (26/2). (Koran Jubi)

Enam marga asli Suku Mpur, Lembah Kebar Kabupaten Tambrauw Papua Barat mencari bantuan Hukum ke Lembaga

Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari untuk mengadukan dugaan pencaplokan tanah adatnya oleh salah satu perusahaan swasta yang bergerak di Sektor Perusahaan Perkebunan yakni PT Bintuni Argo Prima Perkasa (PT.BAPP). (*Koran Jubi*)

5-6 Maret

Pemerintah Kota Jayapura beberapa tahun terakhir berupaya membudidayakan, dan melakukan pelarangan tanaman sagu untuk pelestariannya. Hutan sagu di Kota Jayapura dan sekitarnya tidak boleh ditebang sembarangan. Jika hal itu terjadi, hutan sagu hanya tinggal cerita bagi generasi mendatang. (*Koran Jubi*)

Maraknya peredaran kayu ilegal Papua, membuat KPK menggelar rapat koordinasi dengan Pemprov Papua. Pihak KPK ingin memastikan seluruh pemangku kepentingan di Papua bekerja secara profesional, penuh integritas dan mencegah adanya berbagai praktik ilegal di sektor sumber daya alam. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Saut Sitomorang, di Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Kamis (1/3). (*Koran Jubi*)

8 Maret

Perusahaan investasi yang berpusat di Singapura, yakni Viktory Enginering dan Resources yang bergerak di bidang industri, energi baru dan pertambangan, berminat berivestasi di Kabupaten Mimika. Pimpinan dari perusahaan yang mengklaim memiliki beberapa anak usaha itu melakukan pertemuan dengan Pemda Mimika, Rabu (7/3) di Ruang Rapat Kantor Bupati. (*Cenderawasih Pos*)

9-10 Maret

Pemerintah Provinsi Papua mengandalkan Sistem Manajemen Informasi Tata Ruang untuk memantau perizinan dan lokasi

peruntukan lahan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bappeda Papua Muhamad Musa, Rabu (7/3). (*Koran Jubi*)

16-17 Maret

Pemilik tanah ulayat Mopah mengaku dibohongi. Janji Bupati Merauke Fredrikus Gebse untuk mefasilitasi keberangkatan ke Jakarta, ternyata tidak kunjung ditepati. Janji tersebut terucap saat aksi demonstrasi warga. Bupati Gebse menyatakan akan mengajak pemilik ulayat berdialog langsung dengan pihak Kementerian Perhubungan Jakarta. (*Koran Jubi*)

19-20 Maret

Usulan penamaan Sukarno Putra untuk Jembatan Holtekam Jayapura diprotes. Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua Darius Wetauwa mempertanyakan usulan nama tersebut. Menurut Darius, sejak Orde Lama hingga zaman reformasi, nama sungai, gunung, dan jalan banyak mengunakan nama dari luar Papua. Hal ini dikatakan pada Sabtu (17/3). (*Koran Jubi*)

22 Maret

Pembatasan aktivitas masyarakat adat untuk mengelola hutannya kini dihapus. Masyarakat adat boleh mengelola hasil hutan sesuai dengan kebijakan strategis Presiden Joko Widodo untuk pengentasan kemiskinan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan, Selasa, (21/3). (*Cenderawasih Pos*)

4-5 April

Penanganan kasus dugaan penebangan liar di hutan lindung di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni oleh Polda Papua Barat masih terus tergulir. Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat AKBP Hari Supriono, Senin (2/4), mengatakan penyidik meminta keterangan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Teluk Bintuni. (*Koran Jubi*)

18 April

Pihak Polda Papua menahan 25 kubik kayu merbau yang berasal dari Kabupaten Sarmi, Minggu (15/4). Kayu ini diduga kayu ilegal karena tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi. Kanit Tipiter Dit Reskrimus Polda Papua AKP Gusti Ananta mengatakan 5 truk kayu tersebut dari Kabupaten Sarmi akan dibawa ke Abepura. (*Cenderawasih Pos*)

28 Mei

Keberadaan hampir 100 kubik kayu yang ditampung di Abe Pantai merupakan hasil penyelidikan dan penyitaan yang dilakukan oleh pihak Dinas Kehutanan Papua, Sabtu (25/5). Sekitar 20 truk digunakan untuk mengeser kayu olahan berbagai ukuran. (*Cenderawasih Pos*)

6-7 Juli

Perusahaan penambangan asal China, PT Hanjun IC melakukan penambangan emas ilegal di Kali Magawo, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua sejak Januari 2017. Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol. Ahmad Kamal, di Jayapura, Kamis (5/7), mengatakan, dari laporan masyarakat yang diterima terungkap perusahaan asal China itu hanya mengantongi surat keterangan dari Dominggus Pekey, mantan Kepala Dinas Pertambangan dan ESDM Kabupaten Nabire dengan lampiran peta lokasi dan titik koordinat. (*Koran Jubi)*

16-17 Juli

Masyarakat adat pemilik hak adat tanah atas lahan PT Freeport Indonesia kembali menagih janji terhadap pemerintah pusat di Jakarta. Hal ini terkait perundingan antara PT Freeport dan pemerintah Indonesia serta masyarakat pemili hak ulayat. (*Koran Jubi*)

Bupati Frederikus Gebze menjanjikan pelunasan pembayaran ganti rugi terhadap lahan ulayat di Stasiun RRI Merauke. Dananya bakal menggunakan APBD Perubahan 2018. (*Koran Jubi*)

18-19 Juli

Praktik pembalakan liar atau ilegal logging di Provinsi Papua dan Papua Barat hingga Juli 2018 semakin marak. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri pembalakan liar di Kabupaten Jayapura dan Sarmi, Provinsi Papua. (*Koran Jubi*)

30-31 Juli

Tapal batas dan administrasi penyebab konflik tanah adat di kalangan masyarakat adat. Terjadi sengketa hak ulayat antara masyarakat adat dengan warga non-Papua, investor, dan Pemerintah. Pieter Yanuaring, Kepala Dewan Adat Suku (DAS) bertanggung jawab untuk mendampingi dan melakukan musyawarah kepada masyarakat agar memperhatikan tanah-tanahnya. (*Koran Jubi*)

10-11 Agustus

Suku Kanum dan Yeinan menuntut keadilan dari pemerintah kabupaten Merauke. Mereka selaku pemilik adat tidak pernah menikmati air bersih yang diolah dari Rawa Biru di Distrik Sota. (*Koran Jubi*)

11 September

Pangan lokal Papua masih menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung Pasar Baru Sentani. Bukan hal aneh mengingat pangan lokal di Papua selain karena jumlah dan variannya sangat banyak, juga sudah diakui juga dalam penelitian Organisasi Pangan Dunia (FAO). Pangan lokal Papua disebut-sebut memiliki nutrisi yang banyak dan lebih sehat sehingga PBB ingin menghubungkan isu ini pada hak teritorial, sumber daya, hak kultural masyarakat adat. Inilah yang menjadikan pangan lokal Papua masih terus ada dan dilestarikan. (*Cenderawasih Pos)*

13 September

Ketua Walhi Papua dan Papua Barat, Aies Rumbekwan, menilai penghargaan yang diterima Alex Waisimon sebagai pahlawan keanekaragaman hayati Asean dari Indonesia patut mendapat perhatian dari semua pihak. Menurut Aies, penghargaan ini penting untuk menghentikan dan mencegah penerbitan izin bagi perkebunan kelapa sawit yang terus berlangsung di Papua. Alex Waisimon banyak berperan dalam menjaga pohon dan hutan sebagai rumah tinggal bagi burung Cenderawasih dan habitat hidup lainnya. (*Koran Jubi*)

18 September

Persebaran satwa endemik Tanah Papua seperti kasuari terancam punah, baik karena perambahan hutan, maupun perdagangan ilegal dan perburuan liar. Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Nambluong, Mathius Sawa, ketika ditemui Jubi di Namblong, Sabtu, 4 Agustus 2018, mengatakan dahulu burung-burung itu mudah didapat. Mereka bahkan sering bertengger di dekat perkampungan masyarakat, pohon-pohon dekat rumah dan kali. (*Koran Jubi*)

20 September

Dukungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap perusahaan sawit diunggah dalam video berjudul "Gadget Murah Karena Sawit" dikritik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Wahyu Perdana dari WALHI kepada Jubi melalui siaran persnya, mengatakan pihaknya perlu menyampaikan kritik agar tidak menimbulkan pemahaman yang kabur terhadap sawit. (*Koran Jubi*)

23 September

Pemerintahan RI di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, telah berkomitmen dalam hal moratorium izin baru pada kawasan hutan alam dan lahan gambut, juga menyatakan penundaan ijin pelepasan kawasan hutan untuk usaha perkebunan kelapa sawit. Komitmen yang dinilai tidak serius itu dikritisi koalisi organisasi masyarakat pro keadilan, HAM dan lingkungan di Tanah Papua. Direktur Eksekutif WALHI Papua Aies Rumbekwan mengatakan, pada praktiknya pemerintah masih belum sungguh-sungguh menghormati kebijakan dan ketentuan penundaan ijin baru tersebut. (*Koran Jubi*)

8 Oktober

Provinsi Papua Barat boleh berbangga diri, pasalnya, mereka menjadi satu-satunya Provinsi berkelanjutan yang mengedepankan aspek konservasi dalam pembangunan mereka. Legalitas tersebut tertuang dalam Perdasus yang rancangannya diluncurkan dalam pembukaan Konferensi Keanekaragaman Hayati, Ekowisata dan Ekonomi Kreatif (ICBE) 2018 di Perkantoran Gubernur Papua Barat. (*Cenderawasih Pos*)

11 Desember

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak pernah mengambil kekayaan dari daerah Papua untuk kepentingan pusat. Menurut Kalla, justru sebaliknya Pemerintah Pusat mensubsidi Papua luar biasa, sama (seperti) kita mensubsidi Aceh juga. Hal ini dikatakan oleh Kalla di Istana Wapres RI, Jakarta, Selasa (11/12/2018). Kalla menegaskan kekayaan alam dari tanah Papua telah diberikan kepada masyarakat setempat, baik melalui dana transfer daerah, dana otonomi khusus, maupun pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan pemerintah. (*Koran Jubi*)

3 Desember

Ratusan bibit sagu ditanam di Kampung Kehiran II, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Penanaman pohon ini dilakukan untuk memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) tanggal 1 Desember 2018, yang digelar Pemerintah Provinsi Papua dan Pemeritah Kabupaten Jayapura. (*Koran Jubi*)

9 Desember

Masyarakat adat Papua korban investasi menolak deforestasi di Tanah Papua. Penolakan ini disampaikan melalui aksi yang dilakukan di Jayapura. Salah satu korban Lingkungan yaitu Bapak Matias Anari dari suku Mpur, Tambrauw, Papua Barat mengatakan bahwa "Pada hari ini secara tegas, kami masyarakat adat Papua menolak deforestasi yang merusak tanah, hutan dan air kami masyarakat adat Papua. Karena di situ tempat kami hidup, kami makan, bahkan generasi kami turun temurun sampai Tuhan datang." (*Koran Jubi*)

4. KONFLIK DAN PERDAMAIAN

2 Januari
Awal tahun 2018, diwarnai dengan tembakan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata di area Mile 60 Tembagapura, Mimika. Kelompok yang belum diketahui jumlahnya menembaki kendaraan dengan No 01-3635 yang dikemudikan oleh jarel Langgi (Sekurity Risk Management). (*Cenderawasih Pos*)

4 Januari
Pos TNI di Kenyam Kabupaten Nduga diserang sekelompok pemuda saat perayaan malam tahun baru, Senin (1/1). (*Cenderawasih Pos*)

Sejumlah masyarakat di Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, dikabarkan banyak yang mengungsi ke Tiom, ibu kota Kabupaten Lanny Jaya. Mereka merasa ketakutan dengan kegiatan operasi penyisiran yang dilakukan aparat TNI dan Polri di Distrik Balingga. (*Cenderawasih Pos*)

14 Maret
Konflik di Kwamki Narama, Kabupaten Mimika belum juga berakhir. Setelah dua korban ditemukan tewas pada Senin (12/3). Lalu pada Selasa (13/3) kembali ditemukan korban baru atas nama Ayub Wanimbo, anak berusia 14 tahun warga jalan Mambruk 1, Distrik Kwamki Narama. Jenazah Ayub Wanimbo ditemukan pada pukul 09.01 waktu setempat di sekitar jejeran kios panjang, dengan luka pada bagian belakang. (*Cenderawasih Pos*)

15 Maret
Aparat gabungan TNI, Brimob dan Polres Mimika, Rabu (14/3), sekitar 09.30 waktu setempat mengamankan ratusan anak

panah dan busur yang dibawa puluhan warga yang baru tiba di terminal bandara Mozes Kilangin Timika. Anak panah dan busur diamankan dari warga di Ilaga. (*Cenderawasih Pos*)

5. KONFLIK PEGUNUNGAN TENGAH

20-21 April

Menanggapi kasus penembakan terhadap dua warga bernama Geri Goo dan Rudi Auwe di Kabupaten Dogiyai pada 6 April 2018, sekitar 51 mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua wilayah Yogyakarta mengadakan aksi damai pada Kamis (19/4) dengan long march dari Asrama Kamasan I menuju Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Aksi ini dikawal ketat aparat gabungan dan Ormas Paksi Katon. Pada kesempatan ini massa menyampaikan 11 tuntutan, diantaranya, mengusut tuntas, menangkap dan mengadili pelaku penembakan berdasarkan peraturan yang berlaku. (*Koran Jubi*)

2 Agustus

Dua personil Polres Puncak Jaya atas nama Bripka Abraham Balagaise dan Briptu Ronaldus Abar ditembak oleh KKB di Jalan Sosial, Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya, pada Kamis (2/8) sekitar pukul 17.30 Wit. (*Cenderawasih Pos*)

17 Agustus

Aksi penembakan diduga dilakukan KKB kembali terjadi di Timika, Papua. Penembakan ini melukai seorang karyawan PT Freeport, Jonatan Sopaheluwakan, yang sedang mengendarai Truk Iveco Flat Bed Mekanik di Area Mile 65, Distrik Tembagapura, Mimika, Jumat (17/8) pagi. (*Cenderawasih Pos*)

21 Agustus

Dua Anggota TNI Satgas Pamrahwan Letda Inf Amran Blegur dan Pratu Fredi, tewas dibunuh orang tak dikenal, diduga TPNPB/OPM di Tingginambut, Puncak Jaya, Minggu (19/8). Peristiwa ini terjadi saat keduanya dihadang Kelompok itu ketika akan membawa bahan makanan ke Tingginambut. (*Cenderawasih Pos)*

6 Oktober

Masyarakat Wadangku, Jayawijaya, menuntut denda adat kepada masyarakat di Distrik Libarek dan Yalengga, pasca adanya konflik yang melibatkan warga Wadangku yang hendak melerai penyerangan di Kampung Muliama yang disebabkan warga Distrik Libarek dan Yalengga. Mediasi antar warga tersebut dilakukan di Polres Jayawijaya. Kapolres Jayawijaya, AKBP Yan Pieter Reba mengatakan, dalam mediasi yang digelar, masyarakat dari distrik Wadangku menuntut distrik Yalengga dan Libarek membayar denda ganti rugi 250 juta dan 100 ekor babi. (*Koran Jubi*)

9 Oktober

Pertikaian antar kelompok masyarakat dari dua distrik terjadi di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua, sejak Sabtu (6/10). Konflik yang dipicu kasus lakalantas yang menewaskan Sowa Dapla (23) ini, mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Informasi yang diperoleh, 2 warga tewas, beberapa warga lainnya mengalami luka-luka dan beberapa rumah warga dibakar. Atas situasi ini, Kepolisian Daerah Papua menyatakan situasi keamanan di Dekai, Kabupaten Yahukimo siaga satu. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol. A.M. Kamal kepada wartawan di Media Center Polda Papua, Senin (8/10), menyampaikan, konflik yang terjadi pada Sabtu (6/10), menewaskan dua orang yakni Rangki Salla (19) yang diduga terkena tembakan dan Yoram Payage luka terkena panah pada punggung kiri dan punggung kanan. (*Cenderawasih Pos*)

Seorang pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) dari Gereja Kingmi melaporkan tujuh orang meninggal dunia dalam baku tembak di Kabupaten Puncak Jaya. Peristiwa ini melibatkan Satuan Tugas Penegakkan Hukum (Satgas Gakkum) dengan kelompok TPN Papua Barat Pimpinan Goliat Tabuni. Kejadian tersebut bermula saat Satgas mendapati Bendera Bintang Kejora berkibar di Kampung Gubuleme. (*Koran Jubi*)

10 oktober

Warga dari dua distrik terlibat saling serang di Tolikara. Bentrokan dipicu kasus pembunuhan. Keluarga korban tidak terima dan menyerang daerah asal pelaku sehingga tujuh warga dilaporkan terluka. Serangan pun berbalas sehingga satu warga juga dilaporkan tewas. (*JUBI*)

6. KASUS DI ALGURU DAN YIGI, KABUPATEN NDUGA

12 Juli

Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Pol. Boy Rafli Amar menegaskan bahwa informasi tentang pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang terjadi di Keneyam adalah operasi penegakkan hukum dan bukan operasi militer. "Di Nduga tidak ada operasi militer, namun operasi penegakan hukum. Itu operasi penegakan hukum oleh personel Polri terhadap kelompok bersenjata yang telah menembak dua pesawat sipil Demonim dan Trigana, termasuk dua pilot kena tembak dan tiga warga sipil dewasa dan satu balita dibacok dengan parang," kata Kapolda Kamis (12/7/2018). Hal ini disampaikan Kapolda sebagai klarifikasi atas informasi tentang pengejaran kelompok bersenjata di Nduga yang beredar sejak Rabu (11/7/2018). Ia menambahkan, operasi tersebut dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat lainnya agar tidak ada korban lagi. Menurutnya, semua kegiatan yg

dilakukan oleh kepolisian dalam rangka menegakkan hukum di NKRI. (*https://tabloidjubi.com/artikel-17626-kapolda--di-nduga-tidak-ada-operasi-militer-namun-operasi-penegakan-hukum.html, diakses 16 Juli 2018*)

Pengejaran kelompok bersenjata yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia masih berlangsung di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua hingga Rabu (11/7/2018) siang. Demikian disampaikan oleh Bupati Nduga Yarius Gwijangge. "Tembakannya diarahkan ke TPN/OPM di Alguru. Tidak ada serangan ke masyarakat. Mereka (aparat keamanan) lakukan serangan ke tempat dimana OPM berada," ungkap Bupati Yarius, dikutip suarapapua.com. Yarius juga menegaskan tidak ada korban di pihak warga sipil. Menurutnya, tindakan aparat keamanan itu untuk menjalankan tugas mereka. Meski demikian, ia menegaskan telah meminta kepada pihak kepolisian untuk tidak melakukan tembakan atau serangan dari udara karena dikhawatirkan bisa mengakibatkan warga sipil menjadi korban. "Saya minta warga tidak lari sembunyi ke hutan," ujar Yarius mengenai warganya yang datang melapor kepada dirinya. Ia bahkan meminta warga untuk sama-sama menyaksikan serangan yang sedang terjadi. Bupati Nduga dua periode ini menjelaskan bahwa aparat keamanan menggunakan jalur sungai dari Timika menuju Keneyam setelah singgah di Asmat karena tidak ada pesawat yang bisa digunakan. Mengenai tembakan dari udara, Bupati Yarius menyebutkan tembakan itu berasal dari sebuah helikopter yang berputar di atas Keneyam. (*https://tabloidjubi.com/artikel-17625-bupati-nduga--saya-minta-warga-tidak-lari-sembunyi-ke-hutan.html, diakses 16 Juli 2018*).

13 Juli

Juru Bicara Lembaga Masyarakat Adat Nduga, John Beon mengatakan ratusan warga Kampung Alguru belum pulang ke rumah pasca penyerangan aparat pada Rabu (11/7/2018) karena tempat tinggal warga hancur dirusak aparat gabungan TNI-Polri. "Kampung Alguru itu sudah otomatis rusak, sudah dibombardir. Sudah rusak betul itu. Kita belum dapat laporan lengkap ada korban berapa. Ini dibombardir, dibom," kata John kepada KBR, Kamis (12/7/2018) malam. Masyarakat Kampung Alguru, menurut John, mengungsi di kampung terdekat lainnya. Sebelum mengungsi, lebih dari 200 orang sempat berlarian ke arah hutan karena serangan aparat bersenjata melalui helikopter ke arah tempat tinggal mereka. Pihak TNI-Polri menyerang Kampung Alguru dengan rentetan tembakan berkali-kali. Tembakan itu dilakukan di lima posisi berbeda. Setelah penembakan, aparat bersenjata turun dan menyisir rumah-rumah warga. Tujuannya, kata John, untuk mencari Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) yang sebelumnya menguasai daerah tersebut. "Kini 300an aparat menguasai kampung itu."
(*https://kbr.id/nasional/072018/baku_tembak_di_nduga__200an_warga_kampung_alguru_mengungsi/96566.html, diakses 16 Juli 2018*)

14 Juli

Ketua Klasis Gereja Kemah Injil (Kingmi) Keneyam, Nduga menyampaikan hingga hari ini, Sabtu (14/7/2018) gereja Kingmi telah menemukan tiga orang meninggal pasca penyisiran yang dilakukan oleh aparat keamanan gabungan polisi dan TNI, Rabu (11/7/2018). "Kondisi berantakan. Tiga orang kami sudah temukan meninggal. Sekarang saya sedang di gereja, sibuk urus masyarakat," kata Ketua Klasis Keneyam, Pendeta Zakeus Kogoya melalui sambungan telepon kepada Jubi, Sabtu sore. Tiga jenazah

itu ditemukan di dekat Kali Keneyam. Namun Pendeta Zakeus belum bisa memberikan informasi lebih lanjut tentang identitas ketiga jenazah yang ditemukan tersebut. Termasuk apakah ketiganya adalah warga sipil atau bagian dari kelompok bersenjata yang dikejar oleh aparat keamanan. Ia mengatakan bahwa saat penyisiran yang dilakukan pada tanggal 11 Juli, ada bom yang dijatuhkan di seberang Kali Keneyam, tepatnya di Kampung Alguru. Penggunaan bom yang disebutkan oleh Pendeta Zakeus ini telah dibantah oleh pihak kepolisian maupun TNI. (*https://tabloidjubi.com/artikel-17688-klasis-kingmi-keneyam-tiga-orang-meninggal-paska-penyisiran-aparat-keamanan.html, diakses 16 Juli 2018*)

16 Juli

Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Pol. Boy Rafli Amar mengatakan kondisi Kabupaten Nduga khususnya di Kenyam berjalan baik. Aktivitas masyarakat sudah berjalan sebagaimana biasanya. Dengan kondusifnya daerah tersebut, dirinya mengharapkan agar masyarakat setempat kembali ke kampung Alguru tanpa merasa takut dan bersembunyi di hutan. Dikatakannya, kampung Alguru disinyalir menjadi lokasi persembunyian anggota KKB. (*Cenderawasih Pos*)

17 Juli

Ketua Jaringan Advokasi Penegakan Hukum dan HAM Pegunungan Tengah Theo Hesegem mendesak Komnas HAM segera membentuk tim monitoring untuk memantau dan menginvestigasikan kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Nduga.(*Cenderawasih Pos*)

18-19 Juli

Pihak ULMWP mempertanyakan tindakan aparat keamanan (TNI dan Polri) yang masih saja menggunakan kekuatan berlebihan

dalam menangani konflik bersenjata yang terjadi di Papua. Hal ini terkait penyisiran yang terjadi di Kenyam, Kabupaten Nduga, Rabu pekan lalu. (*Koran Jubi*)

19 Juli

Mahasiswa dan pemuda Papua yang tergabung dalam Solidaritas Ratapan Kemanusiaan Alguru di Kabupaten Nduga melakukan demo damai di halaman gedung DPR Papua, Kamis (19/7/2018), mendesak penarikan pasukan keamanan Polri dan TNI dari kabupaten itu. Koordinator aksi, Remes Ubruangge mengatakan, selain meminta segera menarik anggota Polri dan TNI dari Nduga, pihaknya juga meminta pemerintah segera bertanggung jawab terhadap pemulihan kondisi keamanan warga sipil di wilayah itu. "Kami ingin hidup di negeri kami tanpa teror. Kini masyarakat Alguru berduka. Tidak aman, meninggalkan rumah dan tempat tinggalnya," kata Remes Ubruangge dalam orasinya. Dalam aksi itu, mahasiswa dan pemuda menyampaikan beberapa pernyataan sikap di antaranya, mendesak Presiden Jokowi menghentikan operasi militer di Nduga, mendesak Presiden mencopot, Kapolri, Kapolda, Pangdam dan Panglima TNI karena telah melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil di Nduga. Mendesak Presiden membuka akses pekerja HAM independen ke Nduga untuk mendapat fakta, membuka akses bantuan kemanusiaan di Nduga, serta mendesak pemerintah Australia, Inggris, Belanda, dan negara lainnya menghentikan bantuan militer kepada Polri dan TNI. (*https://tabloidjubi.com/artikel-17838-operasi-militer-di-nduga-pemuda-dan-mahasiswa-kami-ingin-hidup-tanpa-teror.html, diakses 20 Juli 2018*)

20 Juli

Satu diantara aktivis Papua, Arim Tabuni mengatakan, salah satu hal yang perlu ditindaklanjuti dalam kejadian di Alguru, Kabupaten Nduga belum lama ini yakni kondisi 50 kepala keluarga

(KK) yang kampungnya menjadi sasaran operasi keamanan. Ia mengatakan, informasi yang dihimpun dari berbagai sumber di Nduga, puluhan KK itu meninggalkan kampung mereka saat operasi keamanan terjadi. "Kondisi mereka ini harus dipastikan. Selama ini kan yang naik di media, hanya berdasarkan informasi. Media tidak langsung ke lapangan. Hingga kini masyarakat di sana masih ketakutan," kata Arim Tabuni saat berkunjung ke kantor Redaksi Jubi, Jumat (20/7/2018) petang. Ia berharap, pihak terkait membuka akses untuk pekerja HAM (kemanusiaan) dan media ke Nduga guna melakukan peliputan dengan melihat langsung kondisi di wilayah itu, serta meminta keterangan dari kelompok berseberangan, agar diketahui apa keinginan mereka. "Masyarakat yang mengungsi juga harus dimintai keterangan. Media juga jangan seakan memojokkan satu pihak saja. Jangan terkesan ada yang ditutupi. Jadi Kapolda buka akses media ke Alguru karena hingga kini kita tidak tahu bagaimana kondisi masyarakat di sana. Kalau ruang (akses) tak dibuka, berarti mereka (Indonesia) salah," katanya. Ia juga mendesak DPR Papua segera membentuk tim independen ke Nduga dengan melibatkan pihak gereja, LSM dan pekerja HAM. Katanya, jangan sampai kejadian Nduga dilupakan begitu saja tanpa ada penyelesaian seperti kasus penembakan di Paniai, 8 Desember 2014.

Pada Jumat (20/7/2018) siang, para aktivis pemuda, mahasiswa, LSM, dan gereja yang tergabung dalam solidaritas HAM untuk Nduga bertemu Komisi I DPR Papua bidang politik, hukum dan HAM. Ada tiga pernyataan sikap solidaritas yang disampaikan kepada komisi itu yakni, prihatin terhadap kondisi masyarakat Kenyam, Kabupaten Nduga pasca operasi gabungan, 11 Juli 2018. Mendesak dibukanya akses untuk kemanusiaan, jurnalis dan media ke Nduga, serta mendorong pembentukan tim pencari fakta gabungan untuk mengumpulkan bukti dan fakta, serta dampak dari operasi

gabungan, 11 Juli 2018. (*https://tabloidjubi.com/artikel-17872-aktivis-kondisi-50-kk-di-nduga-harus-dipastikan.html, diakses 21 Juli 2018*)

Anggota komisi bidang politik, hukum dan HAM DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, para aktivis pemuda, mahasiswa, LSM, dan gereja yang tergabung dalam solidaritas HAM untuk Nduga meminta DPR Papua segera membentuk tim pencari fakta gabungan yang independen pasca operasi keamanan di Alguru, Kabupaten Nduga belum lama ini. Aspirasi itu disampaikan saat ia bersama Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long dan anggota 14 kursi pengangkatan DPR Papua, John NR Gobai bertemu solidaritas HAM untuk Nduga di ruang rapat Komisi I DPR Papua, Jumat (20/7/2018). "Kami terima itu sebagai aspirasi, seperti aspirasi yang disampaikan mahasiswa dalam demo damai sehari sebelumnya. Solidaritas mendesak DPR Papua segera bertindak," kata Kadepa kepada Jubi, Jumat (20/7/2018) malam. Menurutnya, solidaritas HAM untuk Nduga menilai, tim pencari fakta gabungan diperlukan, lantaran banyak informasi terkait kejadian di Alguru yang membingungkan publik, karena pihak masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya. Katanya, secara kelembagaan DPR Papua juga telah mengambil sikap seperti apa yang dikatakan ketua DPR Papua sebelumnya, yakni meminta pihak terkait menarik anggota Polri dan TNI dari Nduga, serta kondisi keamanan, kenyamanan dan trauma masyarakat harus dipulihkan. (*https://tabloidjubi.com/artikel-17864-dpr-papua-diminta-bentuk-tim-pencari-fakta-untuk-nduga-.html, diakses 23 Juli 2018*)

20-21 Juli

Sebanyak 33 warga dari Kabupaten Nduga tiba di Pelabuhan Merauke, dengan KM Tatamailau, Kamis pagi (19/7/2018). Mereka mengungsi setelah terjadi kontak senjata antar aparat keamanan dengan kelompok bersenjata bebearapa waktu lalu. (*Koran Jubi*)

21 Juli

Solidaritas HAM (SoHAM) untuk Nduga melakukan pertemuan dengan Komisi I DPR Papua di kantor DPR Papua, Jumat (20/7). Pertemuan tersebut untuk mendorong DPR Papua mengambil tindakan dalam membentuk satu tim gabungan investigasi untuk masuk ke Nduga, menginvestigasi dan mengungkapkan fakta yang terjadi di Nduga. (*Koran Jubi*)

23-24 Juli

Aktivis Papua menyatakan bahwa hal yang perlu ditindaklanjuti mengenai kejadian di Alguru, Kabupaten Nduga belum lama ini ialah kondisi 50 kepala keluarga (KK) yang kampungnya menjadi sasaran operasi keamanan. Aktivis mendesak DPR Papua segera membentuk tim independen ke Nduga dengan melibatkan pihak Gereja, LSM dan pekerja HAM. (*Koran Jubi*)

Pada Jumat (20/7), sekitar pukul 14:10 Waktu Papua Pesawat Hercules dari Merauke tiba di bandara Wamena membawa 33 orang pengungsi dari Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua. Setibanya di Bandara Wamena, Ketua Rombongan Masyarakat Nduga yang sempat mengungsi, Depius Telenggen menjelaskan, setelah kejadian baku tembak di Kenyam mulai dari penembakan pesawat Demonim dan Trigana hingga kontak senjata aparat gabungan dengan TNI/OPM, banyak masyarakat yang memilih mengungsi. (*Koran Jubi*)

23 Juli

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) pada 23 Juli 2018 menggelar aksi damai di Yogyakarta. Mereka menuntut dihentikannya tindakan represif TNI dan Polri terhadap masyarakat sipil di Nduga. Peristiwa ini terjadi sejak 22 Juni, 25 Juni, dan 27 Juni 2018 dan berlanjut hingga

sekarang. Kondisi tersebut membuat situasi yang tidak bebas terhadap masyarakat Nduga bahkan mengakibatkan satu orang tertembak di bagian kaki oleh pihak militer serta melakukan penyisiran sekitar Bandara Udara pada 27 Juni 2018. Penyisiran oleh TNI/Polri di Kabupaten Ndugama menyebabkan aktivitas masyarakat tidak berjalan semestinya. (Video aksi demo, *https://www.youtube.com/watch?v=JiErx-7gprs*)

Aktivitas penerbangan kembali normal di Kenyam, Kabupaten Nduga pasca insiden penembakan pesawat yang menyebabkan pilot dan co-pilot serta anggota Brimob terluka, Juni 2018. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. AM Kamal, Sabtu (21/7). (*Cenderawasih Pos*)

Kedatangan 33 pengungsi dari Kabupaten Nduga ke Jayawijaya, tidak diketahui oleh Pemkab Jayawijaya. Sekretaris Daerah Jayawijaya, Yohanes Walilo mengaku belum mendapat surat resmi dari Pemkab Nduga terkait 33 warga dari Nduga yang tiba di Wamena setelah sempat mengungsi ke Asmat dan Merauke. (*Cenderawasih Pos*)

4 Desember

Puluhan pekerja proyek pembangunan Jalan Trans Papua di Distrik Yall, Kabupaten Nduga, Papua, dikabarkan tewas dibunuh pada 2 Desember 2018. Mereka diduga menjadi korban kelompok bersenjata. Mereka adalah para PT Istaka Karya, perusahaan BUMN yang sedang mengerjakan proyek pembangunan jembatan. Keterangan itu disampaikan Sekretaris PT Istaka Karya Yudi Kristianto. "Betul kabar itu," kata Yudi kepada reporter Tirto, Selasa (4/12/2018). Sejauh ini, Yudi mengaku belum bisa dipastikan berapa jumlah pekerja yang menjadi korban. "Sedang kami pastikan. Kami juga berkoordinasi dengan Polri dan TNI," tuturnya.

Kabar tewasnya para pekerja itu ramai diberitakan media yang berbasis di Jakarta, Senin malam, (3/12/2018). Media Jakarta menuliskan, 31 orang menjadi korban. Sumber informasi media-media berbasis di Jakarta, berasal dari keterangan pers yang disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes A.M. Kamal. Kamal menyebutkan kelompok bersenjata sudah, "membantai 31 orang pekerja dari PT Istaka Karya yang sedang membangun jembatan". Namun dalam laporan yang ditulis Victor Mambor, jurnalis senior Tabloid Jubi, korban berjumlah 24 orang. Informasi soal ke-24 korban itu didapat Mambor dari Wakil Ketua DPRD Nduga Alimin Gwijange. Informasi soal pembunuhan pekerja PT Istaka ini pertama kali disampaikan Pendeta Wilhelmus Kogoya (tokoh gereja distrik Yigi) melalui radio SSB, Senin (3/12/2018), sekitar pukul 15.30 waktu setempat. (*https://tirto.id/simpang-siur-puluhan-pekerja-tewas-di-nduga-papua-daVo, 5 Desember 2018*).

Tim gabungan TNI-Polri telah menemukan empat orang korban penyerangan di Kali Yigi-Kali Auruk, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, yang dilakukan oleh kelompok bersenjata. Empat orang itu berhasil melarikan diri dan selamat dari penyerangan tersebut. "Identitas keempat korban yang selamat adalah Martinus Sampe karyawan PT Istaka Karya dengan kondisi luka tembak di kaki kiri, Jefrianton karyawan PT Istaka Karya mendapat luka tembak di pelipis kiri, Irawan karyawan Telkomsel, dan John petugas puskesmas," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Komisaris Besar Ahmad Musthofa Kamal melalui keterangan resmi 4 Desember 2018. Keempat orang yang selamat itu telah dievakuasi ke Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya. (*https://nasional.tempo.co/read/1152296/4-korban-penembakan-di-papua-ditemukan-begini-kondisinya, diakses 5 Desember 2018*).

5 Desember

Penembakan terhadap 30-an pekerja proyek pembangunan jembatan di Kabupaten Nduga, pemerintah berupaya mengingkatkan pembangunan di sana, menunjukkan bahwa situasi politik dan keamanan di Papua memiliki kerumitan tersendiri. Aparat keamanan menyebut pelaku serangan itu adalah 'kelompok kriminal bersenjata' yang terkait dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM), namun kelompok itu belum memberikan pernyataan apa pun. Komite Nasional Papua Barat (KNPB) —kelompok yang menyuarakan pemisahan Papua dari Indonesia melalui referendum— mengatakan, peristiwa itu terjadi karena Papua tidak mendapat hak untuk menentukan nasib sendiri.

"Kami tak bisa mewakili OPM, tapi selama referendum Papua tidak dilaksanakan, akan ada selalu elemen dari masyarakat Papua yang menempuh jalan kekerasan," kata Ones Suhuniap selaku juru bicara KNPB. Namun peneliti kajian Papua dari LIPI, Adriana Elisabeth, menganggap terlalu dini untuk menyatakan bahwa peristiwa penembakan itu terkait dengan ideologi dan politik. "Kalau bicara ideologi Papua merdeka itu kan basisnya banyak di Pegunungan Tengah. Tapi kan juga tidak serta-merta semua kejadian dikaitkan dengan persoalan ideologis," kata Adriana Elisabeth.

Sementara Koordinator KontraS, Yati Andriyani menyebut, peristiwa ini menunjukan bahwa "persoalan di Papua tidak hanya sebatas persoalan ekonomi dan pembangunan." Penembakan yang menewaskan 31 orang (yang masih harus dikonfirmasi) itu terjadi di Kabupaten Nduga, pada 1 Desember, namun baru terungkap Selasa (4/12) setelah dikabarkan oleh kalangan gereja. Juru bicara Kodam XVII Cenderawasih menyebut pelaku penembakan sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), yang terkait Organisasi Papua Merdeka (OPM). Bahkan, Menteri Pertahanan dan Keamanan Ryamizard Ryacudu menyebut, pelakunya "bukan kelompok kriminal tapi

pemberontak." Dalam keterangan kepada para wartawan di Jakarta, juru bicara Polri, M Iqbal mengatakan "Polri dan TNI akan mengejar, melakukan tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok ini." Namun, katanya, "motif serangan ini belum jelas".

Berbagai sumber menyebut, serangan bermula dari sebuah acara 1 Desember yang oleh kalangan Papua tertentu diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Papua. Sejumlah pekerja melakukan pemotretan, dan sejumlah pelaku marah karena merasa dimata-matai, lalu melakukan serangan itu. Hal ini masih belum bisa dikonfirmasi. (*https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46442019, diakses 6 Desember 2018*)

6 Desember

Polda Papua memastikan korban jiwa penembakan karyawan PT. Istaka Karya di Puncak Kabo, Distrik Yal, Kabupaten Nduga, Papua berjumlah 15 orang. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal mengatakan, ada 19 orang yang mengalami luka tembak di awal kejadian. 15 orang diantaranya meninggal dunia dan telah berhasil dikumpulkan dalam satu lokasi, tinggal menunggu evakuasi yang rencananya akan dilakukan, Kamis (6/12/2018). "Sehingga jumlah korban luka tembak sebanyak 19 orang, 15 orang meninggal dunia, tiga orang terkena luka tembak, serta seorang yang berhasil selamat yang telah di evakuasi Selasa (4/12/2018)," katanya saat menggelar konferensi pers di Mapolres Jayawijaya, Rabu (5/12/2018) malam. Menurut Kamal, tim gabungan evakuasi hingga kini telah menemukan seluruh korban di Distrik Yal, namun tim masih melakukan pencarian korban lainya terutama karyawan PT. Istaka Karya yang menurut informasi berjumlah 24 orang ditambah seorang pimpinan di lapangan. Selain itu, lanjut Kamal, pada Rabu malam juga seorang anggota Brimob atas nama Bharatu Wahyu, di evakuasi ke rumah sakit Wamena akibat terkena tembakan di

lengan kanan, bahu kiri dan leher setelah terjadi kontak tembak saat proses pencarian korban dilakukan. "Rencana seluruh jenazah ini akan di evakuasi ke Wamena, karena kebanyakan keluarga korban berada di Wamena. Namun jika situasi cuaca tidak memungkinkan maka akan dikirim ke Timika," kata Kamal. (*https://tabloidjubi.com/artikel-21678-15-orang-korban-di-nduga-dipastikan-meninggal-dunia.html, diakses 7 Desember 2018*)

Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Papua, Pdt. Dr Benny Giay mengatakan kejadian pembunuhan terhadap 24 pekerja jalan Trans Papua di Nduga berawal dari aksi protes warga terhadap anggota TNI yang memotret aktivitas ibadah warga pada 1 Desember 2018. "Ada ibadah yang melibatkan masyarakat, pemerintah dan satu orang yang diduga anggota TNI," ungkap Pendeta Giay meneruskan laporan jemaat gereja Kingmi di Nduga kepada Jubi, Rabu (5/12/2018). Warga masyarakat yang ikut kegiatan ibadah itu merasa tidak nyaman karena orang tersebut memotret kegiatan mereka. "Masyarakat takut. Mereka minta dia hapus tapi orang itu tidak mau," lanjut pimpinan gereja yang umatnya sangat dominan di Kabupaten Nduga. Lalu, orang tersebut meninggalkan tempat kegiatan ibadah menuju pos TNI. Usaha masyarakat untuk menghapus foto tidak berhasil. Peristiwa dalam ibadah 1 Desember itu berlanjut pada 2 Desember 2018. Masyarakat datang meminta agar foto mereka dihapus. Lalu terjadi tembak menembak dekat pos tentara sehingga korban berjatuhan mencapai puluhan orang. "Kejadian itu lanjutannya," ungkap dia. Pendeta Giay menambahkan polemik tentang korban yang tewas adalah warga sipil atau militer bisa merujuk pada kebijakan Presiden Jokowi pada tahun 2016 saat berkunjung ke Wamena. "Intinya Presiden Joko Widodo kasih kepercayaan kepada TNI bangun jalan itu pada 2016 saat berkunjung ke Wamena," ungkapnya. Tidak lama, usai pelimpahan kewenangan itu, Januari 2017, sayap

militer organisasi Papua merdeka yang beroperasi wilayah itu menolak pembangunan jalan disertai ancaman perang. Karena itu, menurut Pendeta Giay, tidak salah jika warga mencurigai para pekerja jalan itu sebagai anggota TNI. Warga paham bahwa bukan warga sipil sembarangan yang menjadi karyawan di wilayah yang jelas ancaman keamanannya itu. Terpisah, Sekretaris Perusahaan PT. Istaka Karya Yudi Kristanto memastikan bahwa karyawan perusahaan yang bertugas membangun jembatan di Kabupaten Nduga, Papua tersebut berjumlah 28 orang, yang merupakan pekerja lapangan dan bertanggung jawab atas pembangunan jembatan Kali Yigi-Kali Aworak. (*https://tabloidjubi.com/artikel-21679-gereja--insiden-nduga-berawal-dari-aksi-protes-warga.html, diakses 7 Desember 2018*).

Setidaknya terdapat 28 nama pegawai PT Istaka Karya yang bekerja membangun jembatan ruas jalan Trans Papua di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Dari 28 orang karyawan itu 7 orang sudah diketahui kabarnya. Sedangkan 21 orang lainnya sampai 6 Desember 2018, belum bisa dipastikan kondisinya. Sedangkan, 16 orang yang diduga kuat adalah karyawan PT Istaka Karya telah ditemukan aparat penegak hukum dalam keadaan meninggal dunia. Berikut 28 nama pegawai PT Istaka Karya yang dirilis Penerangan Kodam XVII/Cendrawasih; Korban selamat: 1) Mathinus Sampe (25), asal Toraja. 2) Ayub, asal Toraja. 3) Jeprianto (25), asal Toraja. 4) Jimmy Aritonang, asal Sumatera Utara 5. Jonny Arung (45), asal Sulawasi Selatan. 6) Mathius Palinggih (53), asal Toraja. 7) Tarkih, asal Papua dalam proses pencarian. 8) Efrendi Hutagaol (27), asal Sumatera Utara. 9) Rikki Cardo Simanjuntak, asal Sumatera Utara. 10) Anugerah (17), asal Toraja. 11) Alipanus alis Nano (27), asal Toraja. 12) Agustinus T (35), asal Toraja. 13) Dino Kondo, asal Toraja. 14) Carly Zatrino alias Calung (25), asal Toraja. 15) Daniel Karre alias Dani, asal Toraja

16. Markus Allo, asal Toraja 17. Aris Usi, asal Toraja. 18) Yusran, asal Toraja. 19) Yousafat, asal Toraja. 20) Petrus Ramli, asal Toraja. 21) Simon Tandi, asal Kalimantan Timur. 22) Samuel Pakiding, asal Kalimantan Timur. 23) Muh Agus (25), asal Gowa. 24) Fais Syahputra, asal Makassar. 25) M. Ali Akbar, asal Makassar. 26) Hardi Ali, asal Makassar. 27) Emanuel Beli Naiekteas Bano, asal NTT. 28) Jepri Simare-Mare, asal Tebing Tinggi.

Wakapendam XVII/Cendrawasih, Letkol Infanteri Dax Sianturi mengatakan, terdapat 16 orang yang dipastikan meninggal dunia. Sembilan orang di antaranya telah dievakuasi dari lokasi kejadian ke Timika. "Sudah ada yang dievakuasi ke Timika. Saat ini, korban meninggal dunia itu masih di identifikasi dari tim forensik dokkes Polri dan Uncen di RS Ciritas, Mimika," kata Wakapendam, Kamis (6/12/2018) siang. Dax menambahkan, dari 16 orang yang telah ditemukanitu belum bisa diperkirakan mereka adalah karyawan PT Istaka Karya.
(*https://regional.kompas.com/read/2018/12/06/14095591/ini-28-nama-korban-perkerja-istaka-karya-yang-bekerja-di-nduga, diakses 7 Desember 2018*).

Aparat gabungan TNI dan Polri di Distrik Yigi dan Distrik Mbua per Kamis (6/12/2018), pukul 10.00 WIT, menemukan dua orang selamat dari peristiwa penembakan di Nduga, yaitu Tarki dan Mateus. Keduanya warga sipil. "Info awal yang saya terima mereka adalah warga sipil yang bekerja sebagai pekerja bangunan di rumah dokter di Distrik Yigi," kata Wakil Kepala Penerangan Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih, Letkol Infanteri Dax Sianturi dalam keterangan tertulis, Kamis (6/12/2018). Kemarin, tim menemukan satu orang yang juga selamat, Johny Arung, salah satu karyawan PT Istaka Karya, pekerja di proyek Trans Papua. Johny berhasil meloloskan diri ke Distrik Mbua. Dari data per Rabu (5/12/2018) 15 orang selamat dengan rincian tujuh

karyawan PT Istaka Karya, enam pekerja bangunan di Puskesmas Mbua dan dua orang pekerja di SMP Mbua. Dari data TNI dan Polri per hari ini, total orang yang tewas hingga hari ini berjumlah 16 orang. "Identitas korban meninggal dunia belum teridentifikasi sehingga belum bisa dipastikan apakah keseluruhan 16 korban adalah karyawan PT Istaka Karya," ucap Dax. Sedangkan korban dari pihak TNI ada dua orang, satu orang meninggal dunia dan seorang terluka. Sementara itu, dari anggota Polri ada satu orang mengalami luka tembak. (*https://tirto.id/dua-warga-sipil-ditemukan-selamat-dari-penembakan-di-nduga-papua-da9b, diakses 7 Desember 2018*).

7 Desember

Ketua ULMWP Benny Wenda meminta pemerintah Indonesia segera menghentikan aktivitas militer di Papua Barat. Ia juga menyampaikan keprihatinan atas peristiwa penembakan pekerja di Nduga, Papua. Benny mengklaim Nduga sendiri merupakan bagian Papua Barat. Dalam keterangan resmi melalui situs ulmwp.org pada Rabu (5/12/2018), Benny mengaku, kemerdekaan yang dia inginkan sebenarnya tidak melalui jalur-jalur kekerasan. "Perjuangan ULMWP untuk kemerdekaan seluruhnya melalui jalur politik dan diplomatik. ULMWP berusaha keras untuk demokrasi yang bersifat damai melalui mekanisme internasional," tulis Benny. "Satu-satunya cara untuk menghentikan tumpah darah ini adalah adanya pengakuan internasional agar orang Papua Barat diizinkan secara bebas dan tanpa tekanan memilih kedaulatan politiknya," tulis Benny. (*https://tirto.id/pemerintah-diminta-hentikan-aktivitas-militer-di-papua-barat-dbcC?utm_source=Tirtoid&utm_medium=, diakses 21 Desember 2018*).

9 Desember

Ratusan warga Mbua, Yall dan Yigi telah mengungsi ke hutan sejak

pengejaran kelompok bersenjata yang menyebut diri sebagai TPNPB yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI dan Polri. Sebagian besar warga yang mengungsi ini adalah umat Gereja Kemah Injili (Kingmi) Papua. "Kami mendapatkan laporan dari Yigi dan Yall, sekitar 5 klasis telah mengungsi ke hutan sejak evakuasi korban penembakan dilakukan," ungkap Pendeta Dr. Benny Giay kepada Jubi, Minggu (9/12/2018).

Pendeta Benny Giay merinci 5 klasis tersebut adalah Klasis Yigi Barat sebanyak 6 jemaat, Klasis Yigi sebanyak 6 jemaat, Klasis Mbua sebanyak 6 jemaat dan Klasis Mbulmuyalma sebanyak 8 jemaat. Satu klasis lainnya, yakni Klasis Mugi belum diketahui pasti berapa jemaat yang mengungsi. "Masing-masing jemaat itu rata-rata diisi oleh 30-50 kepala keluarga. Jadi jumlah yang diketahui mengungsi dari empat klasis itu ada sekitar 780 kepala keluarga. Jika 1 keluarga dua orang saja, sudah lebih dari 1500 orang yang mengungsi," jelas Pendeta Benny Giay.

Gereja Kingmi menurut Pendeta Benny Giay adalah denominasi gereja yang dominan di Nduga. Ada sekitar 60.000 umat Kingmi di Nduga. Ia menambahkan, pada peristiwa penyisiran sebelumnya yang terjadi pada bulan Juni-Juli 2018, 50 keluarga di Kampung Alguru – yang disebut sebagai tempat persembunyian kelompok bersenjata telah mengungsi ke hutan. Selain itu, ada sekitar 150 orang mengungsi ke Timika dan 116 orang keluar dari Nduga menuju Agats, Asmat. (h*ttps://tabloidjubi.com/artikel-21770-gereja--ratusan--keluarga-di-nduga-mengungsi-ke-hutan.html, diakses 11 Desember 2018*).

Tim evakuasi dari TNI dan Polri yang melakukan penyisiran di lokasi kejadian penembakan di Distrik Yall dan Yigi, kembali menemukan satu jenazah di puncak Kabo, Distrik Yal, Kabupaten Nduga, Minggu (9/12/2018) siang. Dandim 1702/Jayawijaya, Letkol

Inf. Candra Dianto mengatakan, proses evakuasi mengalami kendala karena putusnya akses jalan akibat longsor yang menutup badan jalan dari pos Mbua ke Puncak Kabo. "Evakuasi menggunakan kendaraan roda empat. Namun karena jalan tertutup longsor sehingga tim harus berjalan kaki menuju lokasi penemuan jenazah. Sekitar 16.30 WP korban sudah berada di pos Mbua," katanya kepada wartawan di Makodim Jayawijaya, Minggu (9/12/2018). Menurut dia, hingga kini korban meninggal yang berhasil ditemukan berjumlah 17 orang. Namun terkait dengan penemuan jenazah satu ini, belum diketahui pasti apakah merupakan karyawan PT. Istaka Karya atau warga masyarakat lainya. Kapolres Jayawijaya, AKBP Yan Pieter Reba mengaku telah menyiapkan tim untuk evakuasi terhadap korban yang baru ditemukan ini. (https://tabloidjubi.com/artikel-21768-satu-korban-penembakan-nduga-kembali-ditemukan.html, diakses 11 Desember 2018)

Hingga hari ini, Minggu (9/12/2018) dilaporkan sebanyak empat warga sipil di Nduga tewas pasca insiden penembakan karyawan PT. Istaka Karya yang menewaskan 16 orang, 2-3 Desember lalu. Empat warga sipil ini tewas antara tanggal 4-5 Desember saat aparat keamanan melakukan proses evakuasi korban insiden Nduga. "Dua di Mbua, dua di Yigi, Semuanya keluarga dekat saya. Mereka ditembak aparat keamanan saat aparat lakukan proses evakuasi. Satu di Mbua itu paman saya. Dia majelis gereja, namanya Yulianus Tabuni," kata Samuel Tabuni, tokoh pemuda Papua kepada Jubi melalui sambungan telepon, Minggu pagi. Samuel juga menyebutkan bahwa masyarakat di Mbua, Yall dan Yigi saat ini sudah mengungsi ke hutan-hutan.

Informasi korban sipil yang tewas di Mbua dan Yigi itu didapatkan Samuel dari keluarganya sendiri hingga dirinya yakin informasi tersebut benar adanya. Jika ada informasi tentang

korban sipil lainnya selain empat orang yang diketahuinya, ia mengatakan belum bisa memastikannya. Samuel menambahkan bahwa keluarganya mengatakan beberapa pendeta dipaksa oleh aparat keamanan sebagai penunjuk jalan dalam operasi pengejaran kelompok bersenjata yang mengklaim diri sebagai pelaku serangan terhadap karyawan PT. Istaka Karya. Mengenai informasi serangan dari udara yang beredar belakangan ini, Samuel berkata informasi itu belum bisa dikonfirmasi.
(*https://tabloidjubi.com/artikel-21744-sejak-evakuasi-dilakukan-empat-warga-nduga-dilaporkan-tewas-lainnya-mengungsi-ke-hutan-.html, diakses 11 Desember 2018*).

10 Desember

Sejumlah mahasiswa mengelar aksi solidaritas untuk korban pelanggaran HAM, secara khusus untuk korban pembunuhan di Nduga, Papua. Di dalam aksi ini, sejumlah mahasiswa menyalakan lilin dan membawa poster bergambar wajah Emanuel Beli Naikteas Bano, salah satu korban pembunuhan di Nduga, Papua. "Hari ini, kita menggelar aksi solidaritas untuk memperingati hari HAM internasional," ujar perwakilan aksi solidaritas, Yasintus Olla (30), saat ditemui Kompas.com, Senin (10/12/2018). Yasintus Olla menuturkan, selain memperingati hari HAM internasional, juga untuk menyikapi peristiwa penembakan di Nduga.
(*https://regional.kompas.com/read/2018/12/10/15450931/mahasiswa-di-sleman-gelar-aksi-solidaritas-untuk-korban-penembakan-di-nduga, diakses 11 Desember 2018*)

11 Desember

Sejumlah kalangan mendorong TNI menggelar operasi militer khusus untuk menghadapi Organisasi Papua Merdeka pasca peristiwa penembakan pekerja proyek jalan Trans Papua di Kabupaten Nduga. Namun operasi semacam itu dianggap akan

berdampak negatif pada warga Papua dan citra Indonesia di dunia internasional. Adapun pihak militer mengklaim mampu menghadapi pelaku penembakan yang mereka sebut sebagai kelompok kriminal sipil bersenjata (KKSB), tanpa penetapan status daerah operasi militer (DOM). Juru bicara Kodam Cendrawasih, Letkol Muhammad Aidi, berulang kali menyatakan TNI tidak menggelar operasi militer di Papua, termasuk setelah penembakan di Nduga, pekan lalu. Meski mengklaim dapat menangkap atau melumpuhkan para pelaku dalam operasi gabungan 'normal' bersama Polri, Aidi enggan memaparkan secara rinci kekuatan militer yang diterjunkan di Nduga. "Saya rasa tidak perlu diungkap ke media karena KKSB memonitor kami. Kalau saya beritahu detail, mereka pasti kabur," ujar Aidi saat dihubungi, Senin (10/12).

"Nanti hasil operasinya saja yang kami umumkan. Teknis dan taktis tidak perlu diutarakan karena itu untuk kepentingan operasi," lanjutnya. Mereka menduga dua pekerja trans Papua selamat meski belum ditemukan. Usulan operasi militer atau penetapan DOM muncul salah satunya dari Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat. Salah satu figur penting, Kiki Syahnakri, beralasan OPM bukan kelompok kriminal, melainkan gerombolan separatis yang menginginkan kemerdekaan dari Indonesia. Sebelumnya, Juru bicara OPM, Sebby Sambom, mengklaim pihaknyalah yang menembaki para pekerja PT Istaka Karya. (*https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46510807, diakses 12 Desember 2018*)

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan pihaknya menurunkan pasukan bantuan nonorganik untuk penanganan kasus di Nduga, Papua. Pasukan tersebut didatangkan dari luar wilayah Papua. Mereka membantu operasi evakuasi korban pembantaian, sekaligus ikut melakukan pengejaran pelaku pembantaian yang saat ini melarikan diri. "Memang ada satuan bantuan nonorganik, tidak hanya organik pasukan Brimob-

TNI di Papua dikerahkan," kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (11/12/2018). Pasukan TNI/Polri dari luar Papua itu diterjunkan lantaran operasi pengejaran pelaku dan evakuasi korban tidak mudah dilakukan. Apalagi, medan di wilayah tersebut tergolong cukup sulit. "Itu dibutukan untuk operasi pengejaran yang tidak mudah karena medannya sulit sekali," tegas Wiranto.

Hingga kini, tim gabungan berhasil mengidentifikasi 17 orang korban meninggal dunia. Sedangkan 4 orang lainnya yang juga sempat dibawa ke Bukit Puncak Kabo dan melarikan diri, dinyatakan selamat dan sudah dievakuasi. Di luar jumlah tersebut, terdapat 27 orang juga dinyatakan selamat dan sudah dievakuasi. Mereka terdiri dari pekerja jembatan, puskesmas, telkom, dan karyawan SMP. (https://nasional.kompas.com/read/2018/12/11/17430451/pasukan-nonorganik-ikut-diterjunkan-dalam-operasi-di-nduga-papua, diakses 12 Desember 2018)

17 Desember

Pembentukan Tim Investigasi untuk Nduga dibentuk oleh Gubernur Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Majelis Rakyat Papua dan gereja. "Usai pelantikan Bupati Jayawijaya, kami akan rapat untuk menindaklanjuti rencana pembentukan tim investigasi itu," kata Gubernur Papua, Lukas Enembe kepada Jubi, Senin (17/12/2018). Tim ini menurut Gubernur Enembe untuk melihat apakah benar ada korban sipil pasca evakuasi dan pengejaran Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) pimpinan Egianus Kogoya yang mengklaim sebagai pelaku penembakan pekerja PT. Istaka Karya, oleh aparat keamanan TNI dan Polri. "Kita sesalkan tragedi yang terjadi di Nduga itu. Tapi tidak boleh ada korban warga sipil lagi," kata Gubernur Enembe. Ia menegaskan, bahwa dirinya punya pengalaman yang cukup panjang dengan situasi seperti yang terjadi di Nduga saat ini. "Pada

dasarnya mereka (kelompok bersenjata) itu minta merdeka, tidak butuh pembangunan itu sudah dari dulu," kata Gubernur Enembe. (*https://tabloidjubi.com/artikel-22008-gubernur-dprp-mrp-dan-gereja-akan-bentuk-tim-investigasi-tragedi-nduga.html, diakses 18 Desember 2018*)

18 Desember

Tim BBC News Indonesia bertemu dengan tiga orang yang mengaku sebagai warga Nduga, yang menuduh TNI/Polri menembaki warga sipil hingga ada yang tewas, namun TNI membantah. Warga tersebut mengaku melihat sendiri penembakan dan 'pengeboman' yang dilakukan oleh aparat. "Tentara menembak ayah saya. Saya kaget, setelah itu saya melompat. Lalu saya juga ditembaki tapi meleset. Hanya kena baju saya ini sampai sobek," ujar seorang anak berusia 14 tahun yang identitasnya dirahasiakan karena masih di bawah umur. Orang kedua yang kami temui berinisial S, yang juga meminta BBC untuk merahasiakan identitasnya. Dia mengaku melihat sendiri aparat melepaskan bom, meski dia tidak menjelaskan secara rinci apakah bom tersebut meledak ataukah hanya penjelasan benda yang mirip peledak seperti bom. Namun, pihak TNI, Polri hingga Menkopolhukam Wiranto membantah klaim bahwa aparat keamanan 'menembaki dan mengebom warga sipil'. "Tidak ada yang namanya bom. Tetapi kalau pelibatan TNI, iya. Karena mereka memang sudah merupakan kekuatan yang tidak setuju dengan negara," tegas Wiranto dalam jumpa pers di Jakarta.
(*https://www.bbc.com/indonesia/media-46605315?ocid=wsindonesia.chat-apps.in-app-msg.whatsapp.trial.link1_.auin,diakses21 Desember 2018*).

20 Desember

Tim Investigasi untuk Nduga, terdiri: Pemerintah Kabupaten Nduga, DPRD, MRP, Gereja, LSM, dan Mahasiswa, juga anggota kepolisian dan TNI, telah menemukan empat jenazah "warga sipil", namun juru bicara TNI mengatakan para jenazah tersebut bisa jadi merupakan "ekses" dari penyerangan terhadap TNI. Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge mengatakan kepada BBC News Indonesia bahwa tim menemukan dua jenazah di distrik Mbua, satu di distrik Dal, dan satu di Mbulmu Yalma. Ia mengatakan para jenazah itu merupakan warga sipil yang melarikan diri ke hutan. Namun Kapendam Cendrawasih Kolonel Muhammad Aidi mengatakan bahwa "tidak bisa dipastikan kalau mayat-mayat itu murni warga sipil" karena mereka ditemukan di lokasi terjadinya penyerangan terhadap pasukan TNI. Tim bersama itu juga turun ke sejumlah distrik di Kabupaten Nduga pada 13 Desember 2018 untuk membantu evakuasi warga saat operasi militer sedang berlangsung. Wentius mengatakan satu korban di Mbulmu Yalma ditemukan masih bernafas, namun tidak tertolong. Adapun tiga jenazah lain ditemukan dalam keadaan membusuk dan hancur. Ketiganya diperkirakan sudah tewas lebih dari seminggu, sehingga tidak memungkinkan untuk dibawa, jenazah itu pun langsung dikubur.

(*https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46625432, diakses 21 Desember 2018*)

21 Desember

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi menyatakan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) tak seharusnya meminta TNI-Polri menarik seluruh pasukannya dari Kabupaten Nduga, Papua. Ia mengatakan jika TNI-Polri menarik pasukan, maka aparat bisa dianggap melakukan pembiaran. Sebab

menurutnya, di Nduga telah terjadi pelanggaran hukum berat dan perlu mendapatkan penindakan hukum. "Jadi menurut saya, gubernur dan ketua DPR serta pihak manapun tidak sepantasnya meminta aparat keamanan TNI-Polri ditarik dari Nduga di mana di daerah tersebut telah terjadi pelanggaran hukum berat yang harus mendapatkan penindakan hukum," kata Aidi dalam keterangan tertulis, Jumat (21/12). Aidi menegaskan kehadiran pasukan TNI-Polri di Nduga untuk menjalankan tugas utama melindungi dan menjaga wilayah Indonesia. Ia menyatakan kelompok separatisme di Papua telah melakukan pelanggaran HAM dan melawan kedaulatan NKRI.
(*https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181221150202-20-355527/tni-gubernur-papua-tak-pantas-minta-tarik-pasukan-dari-nduga, diakses 22 Desember 2018*).

Gubernur Papua dan tujuh fraksi yang ada di DPR Papua sepakat agar Presiden Joko Widodo (Jokowi), Panglima TNI, Kapolri dan para pemangku kepentingan di Jakarta menarik aparat keamanan (Polri dan TNI) dari Kabupaten Nduga. Gubernur Papua, Lukas Enembe usai paripurna ke-V DPR Papua dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap materi Raperda non-APBD, mengatakan sikap pihaknya bersama DPR Papua, tokoh masyarakat, tokoh gereja sudah jelas. Meminta Presiden Jokowi menarik pasukan dari Kabupaten Nduga. "Ini adalah momen Natal, tidak boleh lagi ada TNI dan Polri di sana. Kami juga sepakat membentuk tim independen sehingga tidak banyak pelanggaran terjadi terhadap masyakat sipil," kata Lukas Enembe, Kamis (20/12/2018) malam.

Menurut Enembe tim independen yang akan dibentuk terdiri dari Pemprov Papua, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, Komnas HAM dan pihak terkait lainnya. "Pasukan harus ditarik. Kita berbelasungkawa apa

yang terjadi pertama dan saat ini. Sudah cukup, jangan lagi ada korban jiwa di sana. Masyarakat belum diungsikan, mereka sudah masuk (kejar pelaku). Makanya kami minta tarik semua dulu," ujarnya. Selain itu, Pemprov Papua bersama pihak terkait juga akan melakukan langkah lain, salah satunya bertemu Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut.
(*https://tabloidjubi.com/artikel-22111-gubernur-dan-dpr-papua-sepakat-tarik-aparat-keamanan-dari-nduga.html, diakses 23 Desember 2018*).

23 Desember

Kementerian Luar Negeri Indonesia akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melawan media Australia The Saturday Paper yang dinilai telah membuat laporan yang tidak bertanggung jawab dan menyesatkan soal Nduga, Papua. Selain sangat menyesalkan praktik peliputan media Australia itu yang tidak bertanggung jawab, Kemlu pun menyanggahnya dengan fakta-fakta kebijakan Indonesia terkait penggunaan bahan kimia yang sesuai dengan aturan Organisasi Anti-Senjata Kimia (OPCW). (*Koran Jubi*)

Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menarik semua pasukan atau personil TNI dan POLRI dari Kabupaten Nduga menjelang Perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. (*Koran Jubi*)

Kementerian Dalam Negeri menilai pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe terkait kehadiran TNI-Polri di Kabupaten Nduga sudah melanggar konstitusi dan undang-undang. Kemendagri menganggap argumen yang disampaikan Lukas mengada-ada dan tidak pantas disampaikan oleh seorang gubernur. Kapuspen Kemendagri Bahtiar menjelaskan bahwa ucapan Lukas melanggar UUD 1945 tentang kewajiban TNI-Polri untuk menjaga keamanan,

ketenteraman, dan dan ketertiban masyarakat. Tak hanya gubernur kecaman Bachtiar juga dialamatkan kepada Ketua DPRD Papua. "Tidak seharusnya seorang pimpinan daerah dan ketua DPRD memberikan pernyataan seperti itu," kata Bahtiar dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/12). "Kehadirian TNI/Polri di Papua murni untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan negara dan menjaga stabilitas serta ketentraman ketertiban masyarakat di Nduga, Papua," ujarnya.
(*https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20181222222932-20-355765/kemdagri-kecam-gubernur-papua-soal-tarik-tni-polri-dari-nduga, diakses 27 Desember 2018*).

26 Desember

Puluhan warga Papua yang tergabung dalam Soladiritas #SaveNduga menggelar aksi damai memperingati tindakan kekerasan aparat TNI dan Polri yang terjadi di Kabupaten Nduga, Papua. Aksi damai dilakukan dengan membakar lilin di Taman Aspirasi, depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/12). Satu per satu peserta aksi memegang lilin yang menyela dengan berdiri di depan lilin yang diletakkan di lantai Taman Aspirasi. Mereka memakai ikat kepala berwarna hitam. Mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan, "Biarkan Dorang Merayakan Natal dengan Damai" dan "#SaveNduga". Aksi tersebut juga menjadi perayaan Hari Raya Natal 2018 dan bentuk solidaritas kepada warga di Kabupaten Nduga yang disebut tak merayakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya.

Ketua IPMNI Jawa-Bali Darson Lokbere mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan 'kado Natal' berupa kekerasan kepada warga di Kabupaten Nduga, dengan menggelar operasi bersenjata yang dilakukan TNI-Polri. "Kami ingin menunjukkan bahwa hadiah Natal untuk tahun 2018 yang diberikan Jokowi melalui TNI-Polri yang melakukan operasi di

Distrik Mbua, Mapenduma, dan sekitarnya, dengan melakukan penembakan dan pemboman," kata Darson di lokasi. Darson mengklaim banyak korban dari warga sipil dalam operasi bersenjata yang dilakukan TNI-Polri pasca-penembakan pekerja PT Istaka Karya oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat awal Desember 2018. Namun Darson tak menyebut jumlah korban warga sipil tersebut. "Banyak korban yang ada di sini. Sehingga kami di sini ingin menunjukkan bahwa di sana tidak ada Natal, yang ada hanya duka, yang ada hanya korban," ujarnya. (*https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181226204650-32356595/solidaritas-papua-jokowi-beri-kado-natal-kekerasan-nduga, diakses 28 Desember 2018*).

27 Desember

Sebanyak 50 orang lebih bergabung dalam aksi solidaritas #SaveNduga dengan menyalakan lilin dan ibadah doa kasih di Taman Aspirasi, seberang Istana Negara, Jakarta, hari Rabu (26/12) malam. Narahubung aksi solidaritas #SaveNduga, Darson Lokbere, mengatakan acara kali ini untuk merenungkan sekaligus untuk menciptakan tanah Papua yang penuh perdamaian, secara khusus terhadap konflik kekerasan di Nduga, Papua.

Menurutnya, hampir setiap tahun tanah Papua penuh dengan konflik berdarah akibat terjadinya gesekan kekerasan yang terjadi di sana. "Padahal semestinya dalam menyambut kelahiran Sang Isa Almasih (Yesus Kristus), sebagian besar umat Tuhan di Papua berharap dapat mempersiapkan diri dengan penuh damai dan sukacita untuk menerima kelahiran Yesus pada hari raya Natal. Namun realitasnya di Papua tidak sama dengan daerah-daerah lain yang mengadakan natal dengan penuh damai-kasih," kata Darson Lokbere kepada satuharapan.com, Rabu (26/12) malam.

Darson mengatakan, peran Komnas HAM sebagai lembaga independen, telah mengeluarkan pernyataan sepihak

padahal belum mempunyai data yang jelas dan lengkap dari lapangan, bahkan Komnas HAM belum ada tim khusus yang diturunkan ke Nduga, Papua. Aksi yang sama juga dilaksanakan di Tanah Papua seperti di Kota Jayapura, Sorong. Di Kota Jayapura, aksi mendapat perlawanan dari pihak aparat kepolisian. (*http://www.satuharapan.com/read-detail/read/solidaritas-savenduga-ibadah-kasih-di-depan-istana-negara, diakses 28 Desember 2018*)

7. PEMILIHAN KEPALA DAERAH

6 Januari

Sekitar 50 orang warga tergabung dalam massa Yunus Matuan dan Mesak Wakerkwa melakukan aksi demo di depan Panwas Jayawijaya meminta menghadirkan Panwaslu RI dan Bawaslu Provinsi untuk menganalisa kembali berkas calon independen yang ditolak oleh Panwas Kabupaten Jayawijaya, Jumat (5/1). (*Cenderawasih Pos*)

10 Januari

Aksi Demo masyarakat pada saat pedaftaran pasangan calon Bupati dan wakil Bupati di kantor KPU Kabupaten Jayawijaya selama dua hari berakhir bentrok antara aparat kepolisian dan pendemo, Selasa (9/1). (*Cenderawasih Pos*)

11 Januari

Pihak Polres Jayawijaya telah menyiapkan surat panggilan kepada dua pasangan Cabup yang membawa massa dan terlibat aksi perusakan di Kantor KPU Jayawijaya, Selasa (9/1). Ada pun Cabup tersebut setelah mendaftar malah bergabung dengan masa pendemo dan melakukan perusakan. (*Cenderawasih Pos*)

8 Februari

Belum adanya kejelasan dari DPRD Jayawijaya membentuk Pansus untuk memeriksa KPU dan Panwas Kabupaten Jayawijaya. Pembentukan Pansus tersebut terkait ratusan masyarakat yang berdemo damai dan memalang Kantor DPRD Jayawijaya, Rabu (7/2). Pemalangan kantor DPRD Jayawijaya dilakukan untuk mempertanyakan kelanjutan petisi agar adanya pembentukan Pansus DPRD terkait Pilkada Jayawijaya. (*Cenderawasih Pos*)

3 Maret

Seorang anggota Polres Jayapura, Brigpol Rachmat Santoso, dilarikan ke rumah sakit Yawari, Kamis (1/3). Korban mengalami luka karena dilempari batu, saat hendak membubarkan massa kampanye dari salah satu Pasangan Calon Bupati Jayapura yang melakukan pemalangan Jalan Raya Abepura Sentani Kemiri. (*Cenderawasih Pos*)

6 Maret

Musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua kembali dilakukan di ruang Sidang Kantor Bawaslu Papua, dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi, Senin (5/3). (*Cenderawasih Pos*)

6 April

Ratusan masa melakukan unjuk rasa damai ke Kantor KPU Biak Numfor, Kamis (5/4). Masa dari pasangan calon Bupati dan wakil Bapati no urut 2 Herry-Nehem datang bersama calon wakil Bupati Nehemia Wospakrik, ketua tim koalisi beserta anggota, simpatisan dan kuasa hukum. (*Cenderawasih Pos*)

25-26 Juni

Panitia Pilkada Yahukimo mengancam memboikot Pilgub Papua.

Ancaman tersebut disampaikan karena honor dari April – Juni 2018 belum dibayarkan oleh KPU Yahukimo. Hal ini disampaikan oleh salah satu anggota PPD, Kwikma Nius Silak, saat melakukan unjuk rasa di gudang logistik dan Kantor KPU Yahukimo, Sabtu (23/6). (*Koran Jubi*)

28 Juni

Kontak senjata di Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga kembali tejadi pada Rabu (27/6). Hal tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal. Dikatakan, kontak senjata antar aparat keamanan dengan Kelompok Kriminal Bersenjata di Bandara Kenyam itu terjadi sekitar pukul 08.00 Wit. Hal ini menyebabkan distribusi logistik Pilgub Papua ke 29 distrik menjadi tertunda. (*Cenderawasih Pos*)

29 Juni

Pasukan keamanan pemilihan gubernur-wakil gubernur yang bertugas di Distrik Torere, Puncak Jaya, dihadang dan ditembaki kelompok tak dikenal pada Selasa, (27/6). Dilaporkan setidaknya tiga orang meninggal dalam peristiwa tersebut. Ketiga korban adalah Kepala Distrik Torere Obaja Froaro dan dua anggota polisi yaitu Ipda Jesayas H. Nusi dan Brigpol Sinton Kabarek, keduanya anggota Polres Puncak Jaya. (*Cenderawasih Pos*)

30 Juni

Kapolda Papua dan Pejabat Gubernur Papua, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo memastikan jika situasi di Kabupaten Nduga aman dan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua berlangsung aman. Menurutnya, pasca penembakan dua pesawat jelang Pilgub di Nduga sudah tidak ada masalah, termasuk masalah stabilitas keamanan sudah terkendali, semua distrik sudah melakukan pemilihan, keamanan disana juga sudah dikendalikan oleh aparat keamanan. (*Cenderawasih Pos*)

2-3 Juli

Kapolda Papua dan Plt Gubernur Papua, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo memastikan jika situasi di Kabupaten Nduga aman dan pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua berlangsung aman. Menurutnya, pasca penembakan dua pesawat jelang Pilgub di Nduga sudah tidak ada masalah, termasuk stabilitas keamanan, semua distrik sudah melakukan pemilihan, keamanan disana juga sudah dikendalikan oleh aparat keamanan. (*Koran Jubi*)

7 September

Lukas Enembe dan Klemen Tinal resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua untuk kedua kalinya. Pekerjaan lima tahun sudah dilakukan dan kini melanjutkan periode keduanya. Dari pekerjaan lima tahun pertama sejumlah tokoh di Papua mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, LSM dan kelompok pemuda menaruh harapan dan memberi beberapa catatan. Gubernur dan wakilnya diminta lebih memperhatikan suara akar rumput termasuk catatan-catatan yang diberikan. (*Cenderawasih Pos*)

4 Oktober

Bentrokan dua kelompok massa pendukung Cabup Pegunungan Bintang Yance Tapyor dan Andi Balyo di Oksibil, ibukota Kabupaten Pegunungan Bintang memakan korban jiwa. Dilaporkan seorang warga sipil tewas dalam bentrok tersebut. Lalu korban yang mengalami luka-luka terdiri dari 3 warga sipil dan 1 anggota Brimob, telah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Bhayangkara. Hal ini dikatakan oleh Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. A M. Kamal. (*Cenderawasih Pos*)

8. TAMBANG PT FREEPORT

15 Januari

Anggota Komisi 1 DPR Papua, Laurenzus Kadepa, khawatir dengan pemberian 10 persen saham yang dilakukan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika. Menurutnya, berpotensi menimbulkan polemik, khususnya untuk 7 persen saham yang diberikan kepada Kabupaten Mimika, terdapat dua suku mendapat bagian, yakni suku Kamoro dan Amungme. (*Cenderawasih Pos*)

17 Januari

Kasus teror penembakan kembali terjadi di area PT Freeport Indonesia, pada selasa (16/1) sekitar pukul 18.00 WIT di Mile Point 69, Distrik Tembagapura. Penembakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, terhadap bus karyawan Underground Mine, dengan nomor lambung 8001682. (*Cenderawasih Pos*)

26 Januari

Kelompok TPN/OPM di Papua nampaknya terus berupaya menunjukkan eksistensinya di wilayah Papua. Salah satunya ditunjukkan dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora di SD Utikini dan Banti, Tembagapura Kabupaten Mimika, Selasa (23/1). (*Cenderawasih Pos*)

4-5 April

Kontak senjata antara TNI dengan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) kembali terjadi di kampung Opitawak Distrik Tembagapura, Rabu (4/4), sekitar pukul 10 10.15 Waktu Papua. Akibat kontak senjata ini, anggota KKSB Timotius Umabak (30) meninggal dunia, sedangkan Ruben Kapugau (30) dan Kaping Wamang (15) mengalami luka pada bagian paha dan lengan. Kodam XVII/Cenderawasih yang diwakili Kolonel Inf Muhamad

Aidi menyebutkan kontak senjata terjadi selama 15 menit hingga 30 menit, mengakibatkan 1 orang tewas dan 2 orang luka-luka. (*Cenderawasih Pos dan Koran Jubi*)

6-7 April

Peristiwa baku tembak antara TNI dengan TPN Papua Barat di Banti, Tembagapura, ditanggapi Mentrri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Wiranto. Di Kantor Menko Polhukam RI, 3 April, Wiranto mengatakan bahwa penambahan pasukan TNI di Papua merupakan kewenangan Panglima TNI Marsela Hadi Tjahnto. (*Koran Jubi*)

Baku tembak antara TPN Papua Barat dengan anggota TNI-Polri di Kampung Banti Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Rabu (4/4) pagi menelan korban dari warga sipil. Warga Opitawak, Timotius Omabak meninggal dunia tertembus peluru yang diduga berasal dari senjata aparat keamanan, tiga warga negara sipil lainnya mengalami luka. (*Koran Jubi*)

20 April

Pasukan TNI yang tergabung dalam Satgas Penanggulangan Kriminal Separatis Bersenjata, Kamis (19/4), berhasil mengevakuasi 13 guru yang menjadi korban penyiksaan KKSB di Aroanop, Distrik Tembagapura. Para korban dievakuasi ke Timika dengan menggunakan dua unit helikopter TNI. (*Cenderawasih Pos*)

20-21 April

Prosesi adat 'Patah Panah' menuju perdamaian dalam penyelesaian konflik sosial antara Kubu Atimus Komangal dan Hosea Ongomang dilakukan pada Rabu (18/4) di Kwamki Narama, Mimika. Proses ini difasilitasi oleh Bupati Mimika Etinus Omaleng dan Dandim Mimika. (*Koran Jubi*)

6-7 Juli

Perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sementara kembali diberikan pemerintah kepada PT Freeport Indonesia hingga 31 Juli 2018 dari yang seharusnya berakhir 4 Juli 2018. Hal ini karena belum rampungnya perundingan divestasi saham antara pemerintah dengan Freeport. (*Koran Jubi*)

13-14 Juli

Freepot-McMoran Inc memperkirakan pemerintah Indonesia bisa mengantongi dana sebesar US$60 miliar hingga US$90 miliar atau sekitar 864 triliun rupiah hingga 1.296 triliun rupiah dari kesepakatan harga dan skema divestasi 51 persen saham PT Freeport yang diteken. (*Koran Jubi*)

1 Agustus

Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy mengatakan, sebanyak 2000 masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Freeport Indonesia akan melaksanakan aksi demonstrasi damai di Gedung DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua pada Senin 9 Agustus. Aksi demo tersebut dilaksanakan untuk mendesak pemerintah Indonesia dan perusahaan tambang emas itu transparan soal pembagian dana 51%. (*Harian Papua*)

1-2 Agustus

Puluhan anggota MRP melakukan aksi demo di depan Gedung Pengadilan Pajak, Jakarta. Mereka menuntut PT. Freeport Indonesia membayar pajak air permukaan senilai 2,6 Triliun. (*Koran Jubi*)

8-9 Agutus

Riza Pratama, Vice President Corporate Communication PT.FI, mengatakan bahwa PT Freeport Indonesia tidak hutang Pajak Air Permukaan (PAP) sebagaimana ditagihkan oleh Pemprov Papua, seperti yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya. (*Koran Jubi*)

10 Agustus

Aksi demo damai berbagai komponen masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Papua Peduli Freeport (FMPPF) dilakukan serentak di beberapa kota, seperti di Jayapura, Timika dan di Manokwari. Demonstrasi ini dalam rangka memperingati Hari Masyarakat Pribumi Internasional 9 Agustus. (*Cenderawasih Pos*)

23 Agustus

Para buruh PT Freeport yang mendapatkan PHK sepihak atau program Furlough (merumahkan karyawan) sejak Februari 2017 lalu, melakukan aksi demonstrasi di halaman kantor DPR Papua, Selasa (22/8) lalu. Aksi massa yang tergabung dalam Koalisi Buruh, Mahasiswa, dan Rakyat Papua ini menuntut agar sekiranya persoalan Furlough Freeport ini bisa dituntaskan pemerintah, dalam hal ini DPR Papua. Terlebih, diketahui bahwa DPR Papua sendiri telah membentuk Pansus Freeport. (*Cenderawasih Pos*)

16 September

Pemerintah Indonesia telah menandatangani Head of Agreement (HoA) dengan Freeport Mc-MoRan terkait dengan divestasi saham. Lepas dari pro kontra divestasi yang menjadi salah satu poin negosiasi antara pemerintah Indonesia dan PT. Freeport Mc-MoRan/Freeport Indonesia, persoalan ini semestinya dilihat dari aspek lain yakni keadilan dan keberlanjutan. Direktur WALHI Papua, Maurits J Rumbekwan mengatakan persoalan ini

harus dilihat dari sejumlah sisi. Bukan hanya bagi Pemerintah Indonesia, tetapi bagi orang asli Papua, khususnya masyarakat adat dan lingkungan hidup. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa ada negara dalam negara dalam seluruh cerita investasi tambang, khususnya yang berhubungan dengan investasi asing di Indonesia. (*Koran Jubi*)

28 September

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan negosiasi divestasi saham antara PT Freeport Indonesia dan pemerintah yang pada akhirnya menghasilkan kesepakatan, prosesnya panjang dan pelik. Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa dengan selesainya proses negosiasi divestasi ini, menunjukkan bahwa Indonesia tempat yang baik untuk investasi, karena antara investor dan pemerintah harus sama-sama untung. (*Koran Jubi)*

21 Desember

Presiden Joko Widodo mengumumkan 51,2 % saham PT. Freeport telah sah dimiliki oleh PT. Inalum. Hal ini disampaikan oleh Kantor Staf Presiden, setelah Presiden Joko Widodo menerima laporan dari seluruh menteri terkait, Dirut PT Inalum, dan CEO dan Dirut PT Freeport-McMoran. "Saham PT Freeport 51,2 persen sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar," ujar Presiden Jokowi dalam transkrip pertemuan presiden dengan PTFI. (*Koran Jubi*)

9. PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN HAK ASASI MANUSIA

2-3 Februari

Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa Zeid Raad Al Husein mengunjungi Indonesia, 4-7 Februari 2018. Ia datang

untuk memenuhi undangan pemerintah Indonesia, sebelum ia melakukan kunjungan ke negara di kawasan Pasifik, yakni Fiji dan Papua New Guinea. (*Koran Jubi*)

5-6 Februari
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI akan membahas kasus pelanggaran HAM berat dan lainnya di Papua saat bertemu dengan Komisioner Tinggi HAM PBB, Zein bin Raad. (*Koran Jubi*)

Tiga jurnalis dari BBC Indonesia diusir saat meliput kematian anak-anak karena wabah campak dan gizi buruk di Asmat, Papua. Ketiga jurnalis itu Dwiki, Affran dan Rebeca. Akibatnya mereka tidak bisa melanjutkan aktifitas jurnalistiknya setelah diperiksa polisi di Agats, Asmat. (*Koran Jubi*)

5 Februari
Seorang warga Pulau Karaka diketahui bernama Kolaka Emakeparo, Sabtu (3/2) sekitar pukul 21.40 WIT lalu, tewas diduga akibat terkena tembakan saat terjadinya keributan di Cargo Dock-Porsite. (*Cenderawasih Pos*)

7-8 Februari
Komisioner Tinggi Hak Asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Zeid Ra,ad Al Husein betemu dengan delegasi Papua untuk mendengar lansung tentang situasi di Papua. (*Koran Jubi*)

21 Maret
Kepala Komnas HAM Papua, Frits Rumandey menilai bahwa negara-negara Uni Eropa memiliki perhatian dan komitmen yang besar, terkait dengan pelanggaran HAM di Papua. Komnas HAM Papua mendapat kunjungan dari Kedutaan Besar Uni Eropa yang dipimpin langsung oleh Duta Besar Vincen Guerend, Selasa (23/3). (*Cenderawasih Pos*)

2-3 Mei

Remaja 18 tahun bernama Geri Goo menjadi korban penembakan pada Jumat malam, (6/4), di Mauwa, Kabupaten Dogiyai. Ada luka bagian belakang tubuhnya dengan serpihan peluruh masih bersarang. Belum diketahui siapa pemilik senjata yang menembakan peluruh kepada Goo dan kawannya, Asis Euwa, 16 tahun. (*Koran Jubi*)

25-26 Juni

Majelis Rakyat Papua bersama Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Bomberai, siap membentuk tim investigasi untuk mengumpulkan fakta-fakta berkaitan dengan aksi koboy oknum anggota Brimob dalam insiden penembakan di Pelabuhan Puri Kota Sorong yang melukai Frans Kabarek pada 13 Juni. (*Koran Jubi*)

29 Juni

Kepala Komnas HAM perwakilan Papua Frits B. Ramandey menyebut tindakan yang dilakukan KKSB di beberapa daerah seperti Kabupaten Puncak Jaya dan Nduga hingga menyebabkan kehilangan nyawa manusia merupakan kejahatan serius. (*Cenderawasih Pos*)

6-7 Juli

Laporan yang diluncurkan oleh Amnesty Internasional (AI) di Jayapura, Papua, 2 juli 2018 dengan judul "Sudah, Kasih Tinggal Dia Mati: Pembunuhan dan Impunitas di Papua" menuai reaksi dari kepolisian dan TNI. Kedua institusi ini membantah laporan AI yang menyebut sejak Januari 2010-2018, aparat keamanan di Papua dan Papua Barat telah melakukan pembunuhan terhadap 95 orang di Papua, dimana 69 orang dibunuh di luar hukum, dan 85 orang korban merupakan orang asli Papua. (*Koran Jubi & Cenderawasih Pos*)

11 September

Pengacara HAM Papua, Gustav Kawer di Kantor Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia (PAHAM) Papua di Kotaraja, Jayapura, Papua, Selasa (11/9) menyatakan bahwa maraknya aksi penangkapan terhadap orang Papua yang berunjuk rasa oleh polisi, dengan rupa-rupa alasan; tidak ada izin, tertuduh dengan isu Papua merdeka, jual beli amunisi, merupakan tindakan yang menyalahi prosedur. Penangkapan-penangkapat tersebut dipandang telah melanggar hukum legal Indonesia. Tindakan ini dilakukan berulang-ulang. (*Koran Jubi*)

17 September

Yudas Gebze, warga Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke akhirnya tewas setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Merauke. Korban diduga tewas setelah dianiaya oknum aparat keamanan di Distrik Ilyawab. Yudas Gebze sempat dibawa ke Puskesmas Ilyawab, lalu diterbangkan dengan pesawat ke Kota Merauke untuk menjalani perawatan di RSUD Merauke, namun Jumat, 14 September sekitar pukul 17.30 WIT, korban menghembuskan nafasnya di rumah sakit. (*Koran Jubi*)

7 Desember

Amnesty International Indonesia (AII) mengharapkan agar aparat keamanan melakukan investigasi cepat, menyeluruh, independen, dan tidak memihak terhadap serangan Nduga, dan memastikan semua yang terlibat dibawa ke pengadilan lewat proses yang adil tanpa perlu hukuman mati. Namun Amnesty menegaskan respon tersebut tidak boleh mengarah pada pelanggaran HAM lebih lanjut. Direktur Eksekutif Amnesty, Usman Hamid mengungkapkan, "Yang sangat penting dipastikan saat ini adalah respons aparat keamanan terhadap pembunuhan tersebut tidak boleh mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia lebih lanjut". (*Koran Jubi*)

8 Desember

Obeth Gobay, orang tua dari Apius Gobay, salah satu siswa yang meninggal dunia dalam peristiwa Paniai Berdarah, 7 Desember 2014 menolak kompensasi senilai 4 miliar yang ditawarkan pemerintah. "Nyawa anak saya tidak dijual di pasar. Pak Jokowi, Kapolri, keadilan harus ada," kata Obeth Gobay di Kantor Amnesty International, Jakarta, Jumat (7/12/2018). Obeth datang ke Jakarta menagih Presiden Jokowi yang pernah berjanji menuntaskan kasus Paniai Berdarah. (*Koran Jubi*)

9 Desember

Juru bicara Komisioner Tinggi HAM PBB menyesalkan penangkapan lebih dari 500 orang di Indonesia pada 1 Desember lalu dan meminta pemerintah menjamin agar aparat keamanan menahan diri saat mengatur demonstrasi. Komisi HAM PBB mengeluarkan pernyataan khusus Jumat, (7/12/2018) menyikapi ratusan penangkapan terhadap mahasiswa/i Papua dan warga Indonesia yang bersolidaritas pada aksi peringatan Manifesto kemerdekaan West Papua 1 Desember. (*Koran Jubi*)

10 Desember

Peringatan hari Hak Asasi Manusia sedunia diperingati warga di Manokwari, Papua Barat dengan kembali menyuarakan hak penentuan nasib sendiri (self determination) bagi rakyat Papua. Gabungan organisasi perjuangan kemerdekaan Papua yang tergabung dalam Forum Solidaritas Rakyat Papua Peduli HAM menggelar aksi damai di Kantor DPR Provinsi Papua Barat. Dalam aksi ini mereka mendesak Pemerintah Indonesia tak menghalangi Papua untuk menentukan nasib sendiri. Selain itu, mereka juga menagih janji penuntasan berbagai pelanggaran HAM masa lalu di Papua. (*Koran Jubi*)

13 Desember

Memperingati empat tahun kasus Paniai berdarah yang jatuh pada 8 Desember lalu, sebuah organisasi yang berpusat di Australia 'Make Papua Safe" meluncurkan video di channel Youtube bertajuk Justice for Murdered Children. Video berdurasi 12.44 menit berisi cuplikan kejadian kasus Paniai Berdarah dan wawancara dengan orang tua korban meninggal dunia dalam kejadian tersebut. DR Jason Mac Leod dari Make Papua Safe mengatakan, "Kami membuat film ini untuk mengingat kembali dan mendukung keluarga serta kawan-kawan yang hingga saat ini masih mencari keadilan." (*Koran Jubi*)

15 Desember

Para Uskup di New Zealand dan Polynesia dari Gereja Anglikan mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam atas penindasan Pemerintah Indonesia terhadap Hak Asasi orang Papua. Dalam siaran persnya mereka mengatakan bahwa "kami berdiri bersama saudara dan saudari kami di West Papua dalam perjuangan hak untuk menentukan nasib politik mereka sendiri, dan kami berdoa agar Pemerintah Indonesia akan menghentikan semua penyalahgunaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang didukung Negara. (*suarapapua.com*)

10. PERTAHANAN DAN KEAMANAN

13 Februari

Kasus penembakan oleh kelompok Kriminal bersenjata terhadap aparat keamanan menimpa anggota satgas Ban Timsus Sinak, Pratus Sandi Novian, saat berbelanja di pasar Sinak Kabupaten Puncak, Senin (12/2) sekitar pukul 10.00 WIT. Pelaku penembakan diduga kelompok kriminal separatis bersenjata. (*Cenderawasih Pos*)

14 Februari

Penembakan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata yang diduga pimpinan Tenius terhadap anggota TNI yang menyebabkan tewasnya anggota Satgas Ban Timsus Sinak Pratu Sandi Novian, Senin, (12/2). (*Cenderawasih Pos*)

6 April

Polisi melepaskan 42 dari 45 orang yang diamankan dalam penggerebekan yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI dan Polri di Rusunawa Kampung Uncen, Waena, Rabu (4/4). Tiga orang lainnya menjalani pemerikasaan intensif terkait dengan kepemilikan ganja, laptop dan kendaraan yang diduga hasil curian. Kasat Resrim Polres Jayapura Kota, AKP Hendrikus Yossi menyebutkan pemulangan tersebut bergelombang, gelombang pertama 26 orang dipulangkan pada, Rabu (4/4) malam, lalu gelombang kedua dipulangkan Kamis (5/4) pagi, setelah menjalani pemeriksaan. (*Cenderawasih Pos*)

6-7 April

Rabu, 4 April 2018, pukul 09.00 Waktu Papua, empat ratus anggota Polres Jayapura, Polda Papua, Brimob dan TNI dari Kodim 1701 Jayapura mengeledah unit satu hingga enam, Asrama Mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) di Perumnas III Waena, kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura. (*Koran Jubi*)

21 Oktober

Masyarakat dan mahasiswa Kabupaten Tambrauw menolak rencana pembangunan markas TNI AL di daerah mereka. Robert Yekwan, mahasiswa Tambrauw yang bersekolah di Jayapura manyampaikan bahwa masyarakat Tambrauw tidak setuju dengan kehadiran armada TNI AL di Werur. Hal ini disampaikan oleh Robert, Minggu (20/10), di Kota Jayapura. Menurutnya kehadiran

TNI AL dikhawatirkan akan mengambil alih tanah adat sehingga di kemudian hari akan menganggu aktivitas masyarakat yang ada di wilayah Tambrauw, lebih khusus masyarakat di wilayah Abun, mulai dari Muraid, Sausapor, Werur, Kwoor hingga Waebem. (*Koran Jubi*)

11. KUNJUNGAN PEMERINTAH PUSAT KE PAPUA

23-24 Februari

Sebanyak empat menteri meninjau penanganan wabah campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Kamis (22/2). Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maha Maharani, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Indrus Marham dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Ikut serta pula dalam rombongan, kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (*Koran Jubi*)

23 Maret

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincen Gueren, melakukan kunjungannya selama empat hari di Provinsi Papua, termasuk ke Jayapura dan Wamena. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung dan memperoleh informasi perkembangan di Provinsi Papua tentang ekonomi, Pilkada, tata kelola pemerintahan, hak asasi manusia. (*Cenderawasih Pos*)

12. KEHIDUPAN TOLERANSI

23-24 Maret

Ketua MRP, Timotius Murip mengatakan, akan membasmi paham-paham radikal yang masuk ke Papua, termasuk paham radikal yang kini dipimpin oleh Jafar Umar Thalib di Kabupaten Keerom. Kelompok JUT ini telah membeli tanah seluas 28 hektare.

Hal ini dikatakan oleh Ketua MRP Timotius Murib, Rabu, (21/3). (*Koran Jubi*)

13. RUANG DEMOKRASI

4-5 April

Kepala Kantor Sekretariat Koordinasi ULMWP, Markus Haluk, tidak tahu adanya rencana deklarasi panitia persiapan kemerdekaan. Ia menyatakan selebaran tentang panitia persiapan Deklarasi Kemerdekaan Negara Repulik West Papua, pada 5 April 2018, bukan dari organisasinya. Dari luar pengetahuan dan koordinasi kami, ujar Markus Haluk kepada Jubi di Abepura Kota Jayapura, Rabu (3/4). (*Koran Jubi*)

9-10 April

Pada tanggal (5/4) ULMWP Uni Eropa menyelengarakan Konfrensi tentang Hak Penentuan Nasib Sendiri West Papua. Hal ini dikatakan oleh Benny Wenda pada 7 April. (*Koran Jubi*)

7-8 dan 9-10 Mei

Jurnalis Jubi Albertus You mengalami kekerasan oleh aparat kepolisian saat meliput debat kandidat Pilkada Deiyai di Kabupaten Nabire Sabtu, (5/5). Pemukulan itu terjadi di saat perayaan kebebasan pers dunia yang diperingati 3 Mei. (*Koran Jubi*)

1 Juli

Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua melaksanakan aksi demo damai di Taman Aspirasi Monas, Jakarta. Aksi ini memperingati hari proklamasi kemerdekaan West Papua pada 1 Juli 1976. Selain itu, mereka juga menuntut pemerintah menarik militer organik dan non-organik dari Tanah Papua, serta jaminan

kebebasan pers dan akses terhadap informasi di Papua. Sedangkan di Surabaya, kegiatan diskusi untuk mengenang Tragedi Kasus Biak Berdarah dibubarkan oleh Aparat Keamanan. (*https://tirto.id/aliansi-mahasiswa-tuntut-papua-bebas-dari-kolonialisme-indonesia-cNlm, diakses 3 Juli 2018*)

3 Juli

Acara diskusi dan pemutaran film tentang aspirasi kemerdekaan Papua yang digelar oleh mahasiswa Papua di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (01/07), dibubarkan oleh sekelompok anggota masyarakat. Pembubaran acara ini sempat diwarnai insiden adu mulut, perusakan barang-barang, serta serangan fisik terhadap mahasiswa Papua, tetapi insiden itu dibantah oleh kepolisian. Kepolisian Kota Malang menyebut sekelompok anggota masyarakat membubarkan acara itu karena materi diskusinya dianggap meresahkan warga. (*https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44682734, diakses 4 Juli 2018*).

12 Juli

Pada 1 Juli 2018, pihak kepolisian membubarkan kegiatan diskusi mahasiswa Papua di Asrama Mahasiswa Papua Malang. Tindakan ini menyebabkan beberapa mahasiswa Papua terluka, dan ada pula yang mengalami pelecehan seksual. (*Cenderawasih Pos*)

6-7 Agustus

Memperingati 49 tahun Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Papua Untuk West Papua (FRI-WP) menggelar aksi di 13 kota di Indonesia mulai dari Jakarta, Bandung hingga Ambon. (*Koran Jubi*)

17 Agustus

Ketua BEM Uncen Jayapura, Fery Kombo dan anggotanya, Agus Helembo sempat dimintai keterangan di Mapolres Jayapura Kota,

Kamis (16/8). Fery Kombo dimintai keterangan terkait kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), yang di dalam kegiatan tersebut terdapat aksi yang dianggap menyimpang dan bertentangan dengan aturan seperti meneriakan yel-yel Papua merdeka dan menggenakan atribut gelang dengan motif Bendera Bintang Kejora. (*Cenderawasih Pos*)

21 Agustus

Pada Senin (20/8) sekelompok mahasiswa dari pengurus BEM Uncen Jayapura memalang pintu masuk menuju Kampus Uncen Waena. Alasannya adalah memprotes surat pernyataan yang dikeluarkan polisi untuk Ketua BEM Uncen, Fery Kombo. Dalam surat tersebut, Fery menyepakati enam poin. Salah satunya berjanji tidak menggerakan mahasiswa Uncen untuk berbicara tentang sesuatu yang bertentangan dengan ideologi bangsa. (*Cenderawasih Pos*)

20-21 Agustus

Mahasiswa Papua yang berada di Surabaya mengalami persekusi dari Ormas-Ormas dan polisi di Surabaya. Menurut Allince Tekege, yang aktif di Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua (IPMAPA) Malang, Ormas-Ormas yang mengatasnamakan diri Sekber Benteng NKRI dan Pemuda Pancasila bisa merangsek masuk ke tempat mereka tanpa izin. Sepanjang peristiwa berlangsung, menurutnya, ada mobil polisi parkir di dekat asrama dan aparat polisi yang berada di lokasi membiarkan persekusi berlangsung. Menurutnya, yang menjadi korban sebenarnya mahasiswa Papua beserta fasilitas asrama. (*Koran Jubi*)

26 Agustus

Polres Mimika mengamankan seorang warga berinisial AY, pelaku pembuatan video Papua Merdeka dan menjadikan seorang anak

kecil sebagai objek dalam video tersebut. (*Cenderawasih Pos*)

3 September

Polisi menangkap 14 orang peserta aksi damai yang digelar oleh Gerakan Rakyat Demokratik Papua (Garda Papua), Senin (3/8). Mereka ditangkap di beberapa titik kumpul. Sebelum akhirnya dilepas kembali. "Di titik Merpati (yang ditangkap) berjumlah tiga orang, titik Uncen bawah lima orang, titik Ekspo Waena enam orang," kata Ketua Garda Papua, Yalmi Waro, kepada Jubi via selulernya, Senin (3/8/2018). Aksi damai itu, mengusung tiga isu sentral yakni, desakan untuk menutup PT Freeport, demiliterisasi dan pembangunan Pasar Mama mama di seluruh Tanah Papua. (*Koran Jubi*)

4 September

Puluhan massa aksi demo ULMWP yang berkumpul di titik kumpul Pos 7 Sentani ditahan oleh polisi. Samuel Wenda koordinator aksi wilayah Sentani mengatakan 45 orang ditahan di Polres Sentani Doyo. Penangkapan ini terjadi sekitar pukul delapan pagi, saat massa aksi berkumpul untuk menuju Abepura. Penangkapan ini terjadi lantaran tidak memiliki izin dari Kapolda Papua. Selain itu sebanyak 34 peserta aksi ULMWP yang berkumpul di halaman Kampus USTJ juga ditangkap. Total massa aksi yang ditangkap sebanyak 79 orang. (*Koran Jubi*)

Puluhan massa aksi United Liberation Movement for West Papua yang berkumpul di titik kumpul Pos 7 Sentani ditahan oleh polisi. "Kami 45 orang ada di Polres Jayapura di Doyo," ungkap Samuel Wenda, koordinator aksi wilayah Sentani, kepada Jubi, Selasa (4/09/2018). Penangkapan itu terjadi sekitar pukul 08.00, saat massa berkumpul untuk menuju Abepura. Penangkapan itu, menurutnya, karena polisi menyatakan tidak ada izin dari Kapolda

Papua. Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Pol. Martuani Somin sebelumnya mengatakan demo ULMWP bisa berjalan bila ada surat pemberitahuan dalam hukum Indonesia. (*https://tabloidjubi.com/artikel-19162-demo-ulmwp-45-orang-ditahan-di-polres-jayapura.html, diakses 5 September 2018*).

3-4 September

Komite Aksi ULMWP akan menggelar aksi mobilisasi massa rakyat West Papua dan doa bersama di seluruh Tanah Papua pada 4 September 2018. Bentuk dukungan terhadap pelaksanaan KTT Pasific Island Forum (PIF) di Nauru. Sekretaris Komite Legislatif, Elieser Anggaynggom mengatakan aksi yang akan digelar murni merupakan agenda Komite Legislatif ULMWP. Komite memutuskan agenda aksi dalam pertemuan legislatif nasional. Aksi ini menjadi tanggungjawab penuh para pemimpin ULMWP. Ketua Komite Legislatif menjadi penanggung jawab utama seluruh aksi. (*Koran Jubi*)

5-6 September

Dalam dua hari, 95 orang Papua ditangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia. Sebanyak 14 Demostran Garda-P ditahan pada senin 3 September 2018 dan 81 Demostran dari ULMWP pada 4 September 2018. (*Koran Jubi*)

12 September

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat menggelar diskusi terbatas mendukung FKLNS (Organisasi Perjuangan Pembebasan Suku Kanaky di New Caledonia). Organisasi itu telah diterima dengan baik oleh Melanesian Spearhead Group (MSG) untuk melakukan referendum sesuai mekanisme Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada November mendatang. (*Koran Jubi*)

24 September

Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di kota Jayapura yang melakukan aksi dukungan terhadap Vanuatu dan negara-negara Pasifik yang membawa isu Papua ke Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Sesi 73 pada akhir September 2018. Aksi unjuk rasa pada Senin (24/9/2018) itu berujung penangkapan dan pemukulan oleh polisi. Sekitar 67 mahasiswa ditangkap.

Satu mahasiswa, Petrus Kosamah dipukul di halaman kampus USTJ. Pemukulan terjadi saat polisi membubarkan mimbar bebas mahasiswa di halaman kampus sekitar pukul 11 siang waktu setempat. Polisi memaksa demosntran untuk ke truk Pengendali Massa (Dalmas) untuk dibawa ke Polresta Jayapura. Penangkapan massa aksi dimulai dari titik kumpul Expo, dan depan Kantor Pos Wilayah Maluku di Abepura. (*https://tabloidjubi.com/artikel-19741-demo-ulmwp-67-mahasiswa-ditangkap-satu-dipukul-polisi.html, diakses 25 September 2018*).

30 Oktober

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua menggelar aksi demo ke Kantor MRP, Selasa (30/10) siang. Massa aksi menuntut agar MRP menolak dengan tegas kedatangan transmigrasi ke Provinsi Papua. (*Cenderawasih Pos*)

30 November

Aparat keamanan menggerebek dan melakukan sweeping Markas KNPB Pusat, di Kampung Vietnam, Perumnas III Waena, Jayapura. Dalam Pengerebekan itu, ada ratusan aparat TNI/Porli menggunakan 6 truk tentara/polisi, 3 mobil polantas, 5 mobil strada belakang terbuka milik polisi, dan 6 mobil advanza milik intel-intel dan juga motor-motor polisi dengan satuan gabungan

TNI/Porli, dan Brimob. Menurut informasi yang dihimpun tim KNPB Pusat, sekitar ratusan aparat TNI/Porli bersenjata lengkap mengintimidasi Ketua Umum KNPB Pusat Agus Kossay, yang saat itu sedang makan, dan beberapa aktivis lainya.

Aparat keamanan melakukan teror, juga melepaskan tembakan untuk menakut-nakuti para aktivis, ada sekitar 3 kali tembakan ke arah udara. Aparat keamanan juga mencat ulang gambar "Bintang Fajar dan gambar KNPB Lawan", di pintu masuk, menggantikan dengan cat warna hitam, juga papan tulis yang biasa dipakai untuk belajar, dicat dengan warna hitam. Alat-alat yang dirusak oleh Aparat Gabungan TNI/Polri dalam sweeping di Markas Vietnam KNPB Pusat: 3 dandang untuk memasak nasi, 2 kuali untuk masak sayur, 2 wadah untuk menaruh nasi atau ubi, piring-piring makan yang diinjak-injak dan dibuang berhamburan di tanah. Menurut data KNPB Pusat, sudah 4 kali aparat TNI/Polri melakukan pengerebekan, perusakan, dan penangkapan di Sekretariat KNPB Pusat. (*Laporan KNPB Pusat*)

1 Desember

Sekitar 50 anggota Ormas Pemuda Pancasila dan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) mendatangi asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, Jumat, 30 November 2018. Mereka mendesak agar mahasiswa Papua tidak berunjuk rasa dengan membawa isu Papua Merdeka, Sabtu, 1 Desember 2018 di Surabaya. Massa hanya memasang dua spanduk bertuliskan "Arek Suroboyo Menolak & Siap Melibas Gerakan Sparatis", dan "Tangkap Provokator yang Berusaha Pecah Belah NKRI". Usai memasang spanduk di pagar asrama, massa pergi ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk beraudiensi. "Kami minta polisi melarang aksi mahasiswa Papua," kata Ibrahim da Silva dari FKPPI Jawa Timur. Menurut Ibrahim rencana demonstrasi mahasiswa Papua di Surabaya

pada 1 Desember telah dia dengar. Ibrahim mengaku tak mempermasalahkan demo yang rencananya digelar di monumen Gubernur Soerjo dan monumen kapal selam, asal tak mengusung isu Papua Merdeka. Bila mahasiswa ngotot, Ibrahim berujar tak segan berkeras menghadang. Massa Pemuda Pancasila, FKPPI dan elemen lain, kata dia, bakal mengusir mahasiswa Papua dari lokasi unjuk rasa. "Silakan demo di Papua sana, jangan bermain isu kemerdekaan di Surabaya," katanya. Pengacara Aliansi Mahasiswa Papua Veronica Koman mengatakan massa tak punya hak melarang demo mahasiswa Papua. Kalau FKPPI dan kawan-kawan akan demo kontra Papua Merdeka boleh. "Tapi jangan melarang pihak lain menyampaikan aspirasi," kata Veronica. (*https://nasional.tempo.co/read/1151111/pp-dan-fkppi-bakal-hadang-demo-mahasiswa-yang-usung-papua-merdeka/full&view=ok, diakses 3 Desember 2018*)

Pada 1 Desember 2018 rakyat Papua memperingati hari kemerdekaan bangsa Papua. Pada perayaan itu sekitar 309 orang ditangkap polisi. Berikut data yang dikumpulkan oleh KNPB Pusat terkait penangkapan para aktivis. Untuk di luar Papua: Kupang, NTT, sebanyak 18 orang ditangkap, Ambon, sebanyak 43 orang ditangkap, Ternate 99 orang ditangkap, Surabaya sebanyak 16 orang ditangkap termasuk 3 orang mendapatkan pukulan, Manado 29 orang ditangkap. Total semuanya adalah 211 orang yang ditangkap. Untuk di Papua: Kota Sentani 44 orang, Uniyap 37 orang, Kota Jayapura 8 orang, Kota Abepura 8 orang, Asmat Fait 10 orang. Jadi total aktivis yang ditangkap di Papua berjumlah 98 orang. (*Laporan KNPB, lihat juga video konferensi pers LBH Papua, KPKC Sinode GKI di Tanah Papua dan PAHAM Papua di https://www.youtube.com/watch?v=rpLySNZ_x1s*)

Sebanyak 595 orang dilaporkan ditangkap di berbagai tempat di Indonesia ketika merayakan peringatan 1 Desember, yang menuntut agar rakyat Papua diberikan hak menentukan nasib sendiri. Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat atau ULMWP mengklaim hampir 600 orang peserta aksi pada 1 Desember ditangkap di Jayapura, Kupang, Ternate, Ambon, Manado, dan Makassar. Akan tetapi, kepada BBC News Indonesia, Brigjen Dedi Prasetyo selaku Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, menepis klaim tersebut. "Nggak ada (ratusan yang ditangkap), cuma 44. Semua sudah dipulangkan, semua sudah diperiksa," ujarnya, pada Minggu (2/12). "Kita amankan karena aksinya melenceng daripada ijinnya mereka," tambahnya.

Dalam aksi peringatan 1 Desember di Surabaya sempat terjadi pemukulan anggota Aliansi Mahasiswa Papua. Sekitar 200 anggota AMP Surabaya dan Malang menggelar orasi selama tiga jam, menuntut hak menentukan nasib sendiri untuk West Papua. Veronica menambahkan bahwa banyak aktivis AMP diamankan petugas bahkan sebelum peringatan 1 Desember. "Di Kupang, sudah 18 orang ditangkap. Kemudian di Ambon ada 67 orang ditangkap. Kemudian Jayapura saat ini sudah ada massa yang ditangkap. Jadi memang di berbagai titik di mana-mana terjadi represi dan ditangkap," paparnya. (*https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46411149, diakses 3 Desember 2018*)

2 Desember

Para mahasiswa dan pemuda asli Papua memperingati hari kemerdekaan Bangsa Papua pada 1 Desember dengan aksi damai di berbagai daerah. Hampir di semua wilayah peserta aksi menjadi korban persekusi dan ujaran kebencian dari berbagai organisasi masyarakat. Sekitar 539 demonstran ditangkap kepolisian, baik sebelum, saat, dan usai menggelar aksi damai.

Berdasarkan data yang dihimpun The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Jumlah mereka yang ditangkap di luar Papua: 18 orang di Kupang, 99 orang di Ternate, 43 orang di Ambon, 27 orang di Manado, 24 orang di Makassar, dan 233 orang di Surabaya. Sedangkan di Papua, 95 orang ditangkap ketika berencana menggelar aksi di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, dan Kabupaten Asmat. "[Sebanyak] 41 orang di Sentani sudah di bebaskan jam 17.00 WIT [kemarin], sekarang kami masih menunggu perkembangan 44 orang yang [ditangkap] di Polresta dan KP3 Laut," kata Gustaf Kawer, kuasa hukum dari Perkumpulan Pengacara HAM untuk Papua kepada Tirto, Sabtu (1/12/2018), mengungkapkan penangkapan itu selalu terjadi dari tahun ke tahun dengan dalih yang sama: makar. "Indonesia masih mewarisi regulasi warisan Belanda yang kolonial, yakni pasal-pasal makar dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) seperti Pasal 106 KUHP, 110 ayat (1) KUHP dan pasal makar lainnya," jelasnya.

Peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju mengatakan, pasal-pasal terkait makar memang kerap digunakan untuk meredam kelompok yang tak sejalan dengan pemerintah. Penyebabnya adalah simplifikasi kata "aanslag" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan Belanda yang diterjemahkan menjadi "makar" dan dipakai hingga sekarang. Padahal, menurut Anggara, terjemahan "aanslag" yang ada dalam KUHP lebih tepat diartikan sebagai "serangan", ketimbang "makar". Menurutnya seharusnya aksi-aksi damai untuk peringatan 1 Desember tak bisa dikategorikan ke dalam perbuatan makar. "Kan prinsip hukum pidana terikat prinsip yang ketat: lex certa dan lex stricta. Dia harus pasti dan tidak bisa diartikan lain. Makar ya artinya serangan yang sifatnya fisik."(*https://tirto.id/tangkap-539-demonstran-aksi-damai-papua-rasisme-ala-jokowi-daQi?fbclid=IwAR2iSm9qGLclnYOAVXb7KFDXzHdx-UoUiWlMmuFia-GZlBbkzV9HIT630ws, diakses 3 Desember 2018*).

Sebanyak 233 mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) ditangkap oleh Kepolisian Polrestabes Surabaya pada Minggu (2/12/2018) pukul 01.00 WIB. "Massa yang ditahan berjumlah 233 orang," ujar Yohanes Giyai selaku biro organisasi pusat AMP yang juga ikut ditangkap. Menurut keterangan Veronica Koman pengacara pendamping AMP, massa ditangkap karena polisi beralasan mereka akan membuat kericuhan di Surabaya. Sehingga mereka harus pulang tengah malam itu juga ke kota masing-masing. "Ini permintaan yang tidak masuk akal. Itu kan tengah malam. Kalau jam 7 atau 8 masih bisa dinegosiasikan," ujar Vero kepada reporter Tirto. Selain massa AMP, ada satu Warga Negara Asing (WNA) yang sedang berkunjung ke asrama ikut ditangkap pihak imigrasi. Menurut Vero, massa AMP yang dari luar Surabaya sudah menjadwalkan pulang pada Minggu siang karena pada hari Senin (3/12/2018) harus kembali masuk kuliah. "Polisi sebenarnya sudah menawarkan fasilitas bus untuk mengantar pulang malam itu. Tapi AMP menolak. Mereka memang tidak menerima fasilitas dari polisi. Makan minum di Polrestabes mereka patungan beli sendiri," jelas Vero. (*https://tirto.id/biro-pusat-amp-sebut-233-mahasiswa-papua-ditangkap-di-surabaya-daQJ?fbclid=IwAR12Kkfft7fXBzRpCTRvjUyKulvLcJBm-u7I1MBBEenWe8AGzxG7Nemw5D4, diakses, 3 Desember 2018*).

10 Desember

Aksi damai memperingati hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2018 yang dimediasi oleh Komite Nasional Papua Barat di Tanah Papua diwarnai dengan penangkapan, pembubaran paksa, pembatasan dan pemukulan terhadap sejumlah massa aksi. Ada sekitar 136 anggota massa aksi ditangkap. (*suarapapua.com*)

Peringatan hari HAM sedunia pada 10 desember 2018 di Tanah Papua diwarnai penangkapan, pembubaran paksa, blokade, dan

pemukulan. Aksi peringatan yang dimediasi oleh KNPB di seluruh tanah Papua, Sorong sampai Merauke menyerukan pesan atau tema "Papua Zona Darurat HAM dan Demokrasi, Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Melalui Refrendum". Di kota Merauke sebanyak 41 orang ditangkap, sejumlah barang seperti pamplet, megaphone, dan spaduk serta atribut lainnya disita polisi. Sedangkan di Kota Timika sebanyak 90 orang ditangkap, sebagian mengalami pemukulan, dan perampasan peralatan dan barang milik anggota massa, seperti megaphone, pamhlet, spanduk, handphone, dan perangkat aksi lainya.
(*Laporan KNPB Pusat, video perayaan HAM di Kota Jayapura dapat diakses di https://www.youtube.com/watch?v=XwLcrOwsWLM*)

19 Desember

Aksi damai 19 Desember 2018, memperingati Trikora dan masuknya Indonesia ke Papua pada tahun 1961 diwarnai penangkapan, penyiksaan, pemukulan, pembubaran paksa. Berikut informasi yang dihimpun KNPB Pusat dari beberapa tempat aksi. Aksi di Kota Jayapura ada sekitar 50 orang ditangkap, penghadangan massa dilakukan di berbagai titik, polisi juga sempat mengeluarkan tembakan peringatan. Di kota Ternate sebanyak 7 orang ditangkap oleh TNI dan sempat tidak diketahui keberadaannya. Ketujuh orang ini dibotaki, ditelanjangi dan dihajar hingga babak belur. Ketika masuk ke Kodim 1501, mereka dipukul di bagian belakang, wajah, kepala, kaki. Ada satu orang yang ketika diinterogasi, tiap satu pertanyaan dipukul dengan balok, yang lainnya diancam akan dimasukkan asbak ke mulutnya bila tidak jujur (menjawab). Selain itu mereka diperintahkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sambil dijemur dan berguling di lapangan basket.

Di Kota Malang, sebanyak 64 ditangkap; 16 orang dipukul oleh aparat berpakaian preman dan Ormas, 3 orang mengalami

memar dan 4 orang mengalam luka dan keluarkan darah. Di Kota Bali, sebanyak 66 massa aksi dibubarkan paksa, 4 orang dipukul hingga 1 orang berdarah oleh aparat dan Ormas. Di Kota Merauke, sebanyak 4 orang ditangkap, dan masa aksi dihadang aparat sehingga tidak bisa melaksanakan aksi demo. Di Kota Timika, sebanyak 130 orang dihadang di Sekretariat KNPB sehingga tidak bisa melaksanakan aksi demo. Di Kota Jayapura, sebanyak 15 orang ditangkap polisi dan aksi dibubarkan paksa. Di kota Sentani, sebanyak 15 orang ditangkap dan massa aksi dibubarkan paksa. Nama-nama yang disiksa adalah: Jefri Wenda, Sely Tebai dan Arfi Asso. (*Bdk. Laporan KNPB Pusat*)

Komite Nasional Pembebasan Papua Barat (KNPB) menyebut aparat keamanan membubarkan aksi menolak Tri Komando Rakyat (Trikora) di berbagai daerah. Aksi menolak Trikora dilakukan pada 19 Desember 2018. Juru bicara KNPB Ones Suhuniap mengatakan pembubaran aksi terjadi di Jayapura, Ternate, Malang, Bali, Merauke, dan Timika. Ones mengklaim polisi juga menahan ratusan orang, bahkan sebagian yang masih ditahan di kepolisian. Ones menyebut beberapa orang dipukul oleh aparat. "Itu bukan hanya pemblokadean dan pembubaran paksa. Pemukulan dan penangkapan terjadi di Papua dan luar Papua. Massa aksi keluar ke jalan untuk kumpul massa, polisi sudah blokade," kata Ones kepada KBR, Rabu (19/12/2018).

Aksi damai itu dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP). Mereka menolak Trikora dan menyuarakan kemerdekaan Papua. Ones mengklaim sudah mengirimkan surat pemberitahuan aksi ke kepolisian. Dalam aksi itu diwarnai penangkapan. Data yang dihimpun KNPB, sebanyak 29 orang ditangkap di Jayapura, 4 orang di Merauke, Jayapura: Sentani 15 orang, Expo 9 orang, depan Universitas Cendrawasih 2 orang, sekitar asrama Rusunawa 3

orang, dan 7 orang di Ternate, serta 64 orang di Malang. Selain itu, kata Ones, aparat juga memblokade massa di Merauke dan Timika yang akan bergabung ikut aksi. (*https://kbr.id/nasional/122018/knpb__aparat_bubarkan_aksi_tolak_trikora_19_desember__ratusan_orang_ditahan/98489.html, diakses 20 Desember 2018*)

21 Desember

Aksi penolakan terhadap Trikora diwarnai penangkapan dan pemukulan di sejumlah daerah. Warga Papua tampaknya masih belum dapat menerima operasi militer Tri Komando Rakyat (Trikora) yang terjadi 57 tahun silam, tepat pada 19 Desember, sejumlah demonstrasi menolak Trikora digelar di sejumlah daerah di Indonesia. Di Jakarta, demonstrasi digelar oleh puluhan aktivis Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI) pada Rabu (19/12) pagi. Awalnya mereka bergerak ke Markas TNI AD, Jakarta Pusat, tapi dihadang polisi. Mereka lantas pindah ke pintu utara Monumen Nasional (Monas). Massa membawa sejumlah poster berisikan penolakan terhadap Trikora, serta tuntutan warga Papua bisa menentukan sendiri nasib bangsanya. "Seminggu lagi Natal, tapi kita masih demonstrasi. Kenapa kita masih demonstrasi? Karena 57 tahun yang lalu, seminggu sebelum Natal, Sukarno menyatakan invasi militer terbesar [Trikora]," ujar Juru Bicara FRI-West Papua Surya Anta saat berorasi di depan pintu Monas. (*https://tirto.id/demo-menolak-trikora-kembali-berujung-penangkapan-aktivis-papua-dcia, diakses 22 Desember 2018*).

31 Desember

Pada 31 Desember 2018, aparat kepolisian Mimika membubarkan paksa dan menangkap 6 aktivis KNPB tanpa ada surat perintah. Polisi juga merampas barang-barang milik KNPB. Peristiwa ini

terjadi ketika KNPB Mimika merayakan hari lahirnya KNPB dan syukuran penutupan tahun 2018. Padahal KNPB sudah melayangkan surat pemberitahuan ke polisi bahwa tanggal 31 Desember KNPB akan lakukan ibadah syukuran dalam rangka memperingati hari jadinya kantor KNPB sekaligus ibadah lepas sambut tahun baru 2019. "Kami juga menyampaikan kepada publik bahw pembongkaran Kantor KNPB di Timika dan mengambilali tanah adalah tidakan perampasan hak orang lain tanpa ada proses hukum. Tanah bangun kantor itu bukan milik polisi tetapi, tanah itu secara suka rela rakyat berikan kepada KNPB secara resmi untuk membangun kantor. Jadi polisi merampas tanah milik orang lainn melanggar HAM," ungkap Juru Bicara KNPB Pusat Ones Suhuniap. (*Bdk. Laporan KNPB*)

14. OTONOMI KHUSUS

9-10 Juli

Aksi protes ratusan mahasiswa Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat menyita perhatian berbagai kalangan termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke. Dengan membawa sejumlah spanduk, mahasiswa melakukan aksi di Kantor Bupati Merauke mengkritik berbagai persoalan, berkaitan dengan penggunaan dana Otsus bagi orang asli Papua. (*Koran Jubi*)

15. DUKUNGAN INTERNASIONAL TERHADAP PAPUA

5 September

Pacific Islands Association of NGOs atau Asosiasi LSM Kepulauan Pasifik (PIANGO) mengajak para pemimpin Kepulauan Pasifik mendukung Vanuatu membawa isu West Papua ke PBB. Direktur Eksekutif PIANGO, Emele Duituturaga, mengatakan isu West

Papua selama ini telah ada dalam agenda para pemimpin PIF, tanpa ada kemajuan yang berarti. PIANGO sebelumnya telah menyuarakan perhatian mereka atas isu West Papua tahun 2016 dan 2017 namun situasi belum menunjukkan perubahan. (*Koran Jubi*)

29 September

Isu penentuan nasib sendiri dan HAM West Papua terus disuarakan oleh negara-negara Pasifik dalam sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat selama bulan September. Empat negara sejauh ini telah menyinggung dua isu tersebut. Kepulauan Marshall menjadi negara pertama yang mengangkat isu West Papua dalam sidang itu. Hilda Heine, Presiden Kepulauan Marshall menegaskan posisi Forum Kepulauan Pasifik (PIF) tentang West Papua. (*Koran Jubi*)

SERI MEMORIA PASSIONIS NO.37

PAPUA BUKAN TANAH KOSONG

Beragam Peristiwa dan Fakta
Hak Asasi Manusia di Tanah Papua 2018

TANAH PAPUA terus bercerita tentang tragedi kemanusiaan dan situasi yang buruk dengan persoalan hak asasi manusia. Tahun 2018, dibuka dengan bencana kemanusiaan di Asmat. Duka kematian puluhan balita yang terserang wabah campak dan gizi buruk. Sekitar empat bulan Asmat menjadi sorotan publik dan media, tak hanya dalam negeri tapi juga luar negeri.

Tragedi Asmat mulai reda. Cerita kemanusiaan berganti. Konflik bersenjata kembali pecah di Nduga, Papua. Korban berjatuhan di kedua belah pihak, namun yang paling dikorbankan masyarakat sipil. Ada ribuan penduduk Nduga terancam keselamatannya dan menjadi pengungsi di tanahnya sendiri selama berbulan-bulan.

Kota punya cerita gejolak juga, tentang gerakan prodemokrasi, yang tak leluasa bergerak berkumpul dan menyuarakan pendapatnya di muka umum. Ruang gerak terbatas dan dikekang bukan hanya bagi mereka yang menyuarakan pandangan politik berbeda dengan negara, tetapi juga yang bersuara tentang situasi kemanusiaan dan hak asasi manusia di Tanah Papua.

Selain kebebasan, keadilan, dan perdamaian, alam Papua juga tergerus oleh keserakahan. Ribuan hektare hutan dibabat dan dirusak demi industri perkebunan sawit dan lainnya. Hutan yang menjadi kekayaan alam Papua, terus tergerus dengan cepat. Hutan yang melindungi Tanah Papua berada dalam ancaman yang serius.

Berbagai situasi hak asasi manusia di Tanah Papua itu diungkap dalam buku Seri Memoria Passionis No.37, "Papua Bukan Tanah Kosong", untuk kembali menegaskan kekayaan alam dan manusia di Tanah Papua harus dihormati dan dihargai. Dan buku laporan ini bagian SKPKC FP dalam merawat dan mempertahankan tradisi dokumentasi hak asasi manusia yang dilakukan sejak 1999. Seri Memoria Passionis ini menjadi gerakan memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan kemanusiaan di Tanah Papua.

Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan
Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua

ISBN 978-602-74463-8-0
9 786027 446380